



TEMANGGUNG BERSENYUM



LKJiP TAHUN 2019

KABUPATEN TEMANGGUNG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, merupakan tahun pertama periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, sehingga kinerja pemerintah di tahun 2019 akan menjadi pondasi capaian kinerja dan evaluasi di tahun selanjutnya.

DAFTAR ISI

Contents

BAB I	3
PENDAHULUAN	3
A. LATAR BELAKANG	3
B. ASPEK STRATEGIS.....	4
1. ASPEK GEOGRAFIS DAERAH.....	4
Kabupaten Lain	4
a. Letak dan Kondisi Geografis	6
b. Kondisi Topografi	6
c. Geologi.....	7
C. ASPEK DEMOGRAFI DAERAH	8
a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	8
b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	9
D. ASPEK EKONOMI DAERAH	10
a. Indeks Pembangunan Manusia	10
b. Angka Kemiskinan	17
c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	20
d. Pertumbuhan Ekonomi	21
e. Pendapatan Perkapita	24
f. Indeks Gini	25
E. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	26
1. SEKRETARIAT DAERAH.....	26
2. SEKRETARIAT DPRD	27
3. INSPEKTORAT	28
4. DINAS DAERAH	29
5. BADAN DAERAH.....	31
6. KECAMATAN.....	31
F. KEPEGAWAIAN	32
A. CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI	33
G. ISU STRATEGIS	36
1. Kemiskinan.....	37
2. Kualitas Sumber Daya Manusia	38
3. Ekonomi Kerakyatan.....	39
4. Tata Kelola Pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.....	41



H. SISTEMATIKA PENYUSUNAN	42
BAB II	44
PERENCANAAN KINERJA	44
A. LATAR BELAKANG	44
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	52
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN	56
D. PERJANJIAN KINERJA	56
E. INSTRUMEN PENDUKUNG PENGUKURAN KINERJA	62
F. INSTRUMEN PENDUKUNG PENGUKURAN KINERJA	69
BAB III	72
AKUNTABILITAS KINERJA	72
TAHUN 2019	72
A. CAPAIAN KINERJA	72
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	82
C. REALISASI ANGGARAN	224
D. ANALISA EFISIENSI	237
E. PROGRAM YANG MENDUKUNG SASARAN	242
BAB IV	246
PENUTUP	246
A. KESIMPULAN	246
B. SARAN DAN TINDAKLANJUT	247



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

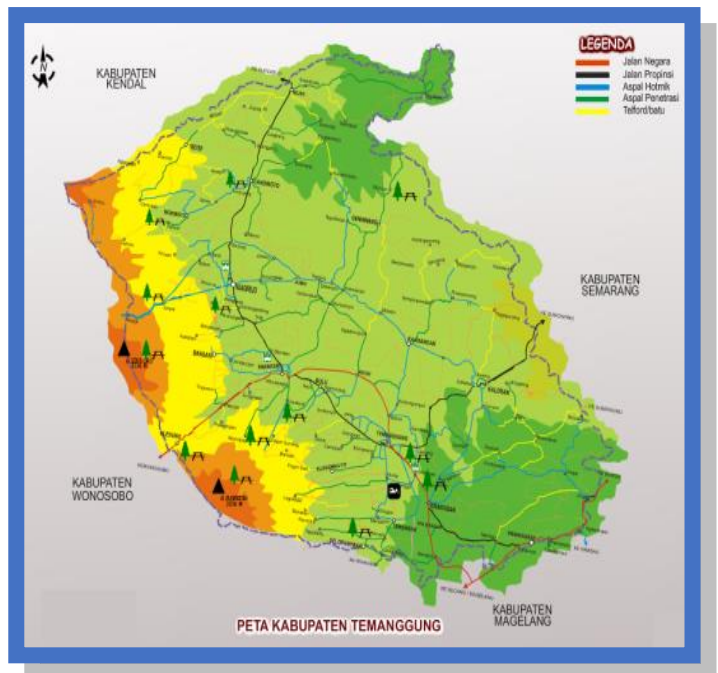
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan peraturan tersebut diamanatkan bahwa dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD, Bupati menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan laporan kinerja tahunan perangkat daerah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diimplementasikan secara *Self Assesment* oleh masing-masing instansi pemerintah. Hal ini dapat diartikan instansi pemerintah melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan pelaporan akuntabilitas kinerjanya kepada instansi yang lebih tinggi

Sebagai salah satu instrumen dari SAKIP, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan instansi pemerintah yang menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja instansi pemerintah yang selanjutnya akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya. Berdasarkan pelaporan kinerja tersebut, masing-masing unit kerja dapat melakukan evaluasi kinerja untuk memberikan umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja secara berkesinambungan.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung Tahun 2019 yang merupakan laporan kinerja tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2018-2023 dari pasangan Bupati HM. Al Khadziq dan Wakil Bupati Drs. R Heri Ibnu Wibowo. Penyusunan LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2019 ini adalah dalam rangka



mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, responsif, dan akuntabel, sekaligus sebagai bagian dari sistem manajemen pemerintahan daerah, yaitu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan monitoring, serta evaluasi, dan diakhiri dengan pelaporan.

B. ASPEK STRATEGIS

1. ASPEK GEOGRAFIS DAERAH

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki wilayah seluas 87.065 Ha, berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Batas-batas wilayah secara rinci terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Batas-batas Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No	Batas Wilayah	Kabupaten Lain	Kecamatan yang berbatasan
1.	Sebelah Utara	Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang	Bejen, Kandangan, Gemawang, Candirotto
2.	Sebelah Selatan	Kabupaten Magelang	Kranggan, Selopampang, Tlogomulyo, Pringsurat
3.	Sebelah Barat	Kabupaten Wonosobo	Kledung, Ngadirejo, Wonoboyo
4.	Sebelah Timur	Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang	Kaloran, Kandangan, Kranggan, Pringsurat

Sumber : Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2019



Dari kondisi di atas dapat dikatakan bahwa Kabupaten Temanggung dalam menyelenggarakan pembangunan dan pemerintahan harus memperhatikan kondisi daerah-daerah yang terletak di perbatasan wilayah dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Temanggung. Hal tersebut dikarenakan penanganan daerah perbatasan memerlukan pencermatan lebih karena harus bersinergi dengan pemerintah daerah yang menjadi batas wilayah serta bersinergi dengan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.

Secara administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 kecamatan, 266 Desa, 23 Kelurahan, 1.354 Dusun, 147 lingkungan, 1.529 RW, dan 5.692 RT dengan pusat pemerintahan berada di Kota Temanggung. Jumlah aparat pemerintahan desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung ada 253 kepala desa, 23 lurah, 3.132 perangkat desa dan 1.768 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Tabel 1.2 Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah	
		Desa	Kelurahan
1	Kecamatan Tretep	11	-
2	Kecamatan Wonoboyo	13	-
3	Kecamatan Bejen	14	-
4	Kecamatan Candiroto	14	-
5	Kecamatan Ngadirejo	19	1
6	Kecamatan Parakan	14	2
7	Kecamatan Bansari	13	-
8	Kecamatan Kledung	13	-
9	Kecamatan Bulu	19	-
10	Kecamatan Temanggung	6	19
11	Kecamatan Tlogomulyo	12	-
12	Kecamatan Tembarak	13	-
13	Kecamatan Selopampang	12	-
14	Kecamatan Kranggan	12	1
15	Kecamatan Pringsurat	14	-
16	Kecamatan Kaloran	14	-
17	Kecamatan Kandangan	16	-



18	Kecamatan Gemawang	10	-
19	Kecamatan Jumo	13	-
20	Kecamatan Kedu	14	-
Jumlah		266	23

Sumber : Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2019, data diolah

a. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Temanggung berada pada koordinat 110°23'–110°46'30" Bujur Timur dan 7°14'–7°32'35" Lintang Selatan. Posisi Geografis Kabupaten Temanggung berada di tengah-tengah tiga pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km).

b. Kondisi Topografi

1) Kemiringan Lahan

Topografi wilayah Kabupaten Temanggung kompleks dan beragam, meliputi: dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung dengan kemiringan antara 0% – 70%. Pola topografi wilayah mirip sebuah cekungan raksasa yang terbuka di bagian Tenggara, sedangkan di bagian Selatan dan Barat dibatasi oleh Gunung Sumbing (3.340 m dpl) dan Gunung Sindoro (3.115 m dpl) dan di bagian Utara dibatasi oleh Gunung Prahurju/Jurang Grawah (2.565 m dpl) dan pegunungan kecil lainnya yang membujur dari Timur Laut ke arah Tenggara. Berdasarkan klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Temanggung meliputi: datar seluas 968 Ha (1,17%), bergelombang seluas 32.492 Ha (39,31%), curam seluas 31.232 Ha (37,88%), dan sangat curam seluas 17.983 Ha (21,64%).

2) Ketinggian Lahan

Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung berada pada ketinggian 500 – 1.500 m dpl. Wilayah tersebut merupakan daerah lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang terhampar dari sisi selatan, barat sampai dengan utara.

Apabila ditinjau berdasarkan klasifikasi ketinggian Kabupaten Temanggung terbagi dalam 5 (lima) wilayah ketinggian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.



Pembagian Wilayah Berdasarkan Ketinggian Kabupaten Temanggung

No	Wilayah Ketinggian (meter) (dpl)	Luas (Ha)	Luas (%)	Kecamatan
1	0 – 500	8.538	9,77	Bejen, Candiroto, Gemawang, Kandangan, Kranggan, Temanggung, Tembarak, Selopampang, Pringsurat, Kaloran
2	500 – 750	38.421	43,99	Bejen, Candiroto, Gemawang, Jumo, Kedu, Kandangan, Parakan, Bulu, Temanggung, Kaloran, Kranggan, Pringsurat,
3	750 – 1.000	20.106	23,02	Bejen, Tretep, Wonoboyo, Ngadirejo, Candiroto, Jumo, Gemawang, Kandangan, Selopampang, Kedu, Parakan, Kledung, Bulu, Kaloran, Pringsurat, Tembarak, Tlogomulyo
4	1.000 – 1.250	7.834	8,97	Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang, Bejen, Kandangan, Kaloran
5	1.250 – 3.550	12.167	14,25	Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang
Jumlah		87.065	100	

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, Tahun 2019

c. Geologi

1) Struktur dan Karakteristik

Dilihat dari sisi geologi, dari lahan seluas 87.065 Ha jenis tanah di Kabupaten Temanggung meliputi: Latosol coklat 28.952 Ha (33,25%), Latosol coklat kemerahan 7.880 Ha (9,05%), Latosol merah kekuningan 31.209 Ha (31,06%), Regosol 16.874 Ha (19,38%), dan Andosol 2.150 Ha (2,47%).

2) Potensi Kandungan

Selanjutnya apabila dilihat dari jenis batuan dan mineral yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung dapat dikelompokkan menjadi: 1). Batuan Andesit, 2). Batu gamping, 3). Batu kali, 4). Batu tras, 5). Bentonit, 6). Diatomae, 7). Kerikil, dan 8). Pasir.



Luas wilayah Kabupaten Temanggung apabila dilihat secara administrasi, kemiringan dan ketinggian terdapat perbedaan disebabkan oleh perbedaan metode dan pendekatan dalam penghitungan

C. ASPEK DEMOGRAFI DAERAH

Jumlah penduduk pada Tahun 2019 berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri adalah 791.264 jiwa, terdiri dari laki-laki 398.687 jiwa (50,39%) dan perempuan 392.577 jiwa (49,61%). Sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak 201.015 rumah tangga dengan rata-rata penduduk per rumah tangga sebanyak 3,81 jiwa per rumah tangga. Kepadatan penduduk tahun 2019 rata-rata 864 jiwa/km² dengan persebaran penduduk relatif merata.

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Temanggung per-Kecamatan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Per-Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No	Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Keseluruhan	
	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	BULU	24.946	51.31	23.839	48,87	48.785	6,17
2	TEMBARAK	15.841	50.92	15.266	49,08	31.107	3,93
3	TEMANGGUNG	41.187	49.53	41.970	50,47	83.157	10,51
4	PRINGSURAT	26.132	50.14	25.990	49,86	52.122	6,59
5	KALORAN	22.897	50.18	22.734	49,82	45.631	5,77
6	KANDANGAN	26.340	50.5	25.820	49,5	52.160	6,59
7	KEDU	29.811	50.62	29.078	49,38	58.889	7,44
8	PARAKAN	26.929	50.25	26.659	49,75	53.588	6,77
9	NGADIREJO	28.384	50.48	27.849	49,52	56.233	7,11
10	JUMO	15.103	50.34	14.899	49,66	30.002	3,79
11	TRETEP	10.840	51.34	10.273	48,66	21.113	2,67
12	CANDIROTO	16.534	50.17	16.422	49,83	32.956	4,16
13	KRANGGAN	24.354	49.68	24.667	50,32	49.021	6,2
14	TLOGOMULYO	11.695	51.22	11.137	48.78	22.832	2,89
15	SELOPAMPANG	9.916	49.15	10.259	50.85	20.175	3,06
16	BANSARI	12.287	50.77	11.916	49,23	24.203	3,53
17	KLEDUNG	14.219	51.96	13.683	49,04	27.902	2,71
18	BEJEN	10.824	50.39	10.658	49,61	21.482	3,32
19	WONOBOYO	13.361	50.81	12.933	49,19	26.294	3,35
20	GEMAWANG	17.087	50.84	16.525	49,16	33.612	4,25
Jumlah		398.687	50,39	392.577	49,61	791.264	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, Tahun 2019



Dari tabel 1.3 di atas bisa dilihat bahwa di Kecamatan Temanggung jumlah penduduknya paling tinggi yaitu 83.157 jiwa (10,51%) dari total jumlah penduduk Temanggung 791.264 jiwa.

b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan										Jumlah
		Tidak / Belum sekolah	Belum tamat SD/Se derajat	SD/ Sederajat	SLTP / Sederajat	SLTA / Sederajat	Di plo ma I/II	Aka demi/ Di plo ma III/ Sarjana Muda	Di plo ma IV/ Stra ta I	Stra ta II	Stra ta III	
1	BULU	11.443	16.598	9.746	5.479	4.135	169	334	850	31	0	48.785
2	TEMBARAK	9.751	5.616	6.821	4.771	3.242	141	156	584	18	7	31.107
3	TEMANGGUNG	18.477	12.476	16.897	10.740	16.396	692	1.822	5.291	366	9	83.157
4	PRINGSURAT	18.360	4.508	12.622	9.088	6.195	187	267	853	41	1	52.122
5	KALORAN	17.716	5.361	10.399	6.906	4.141	224	194	667	19	4	45.631
6	KANDANGAN	22.609	7.003	10.276	6.631	4.257	253	272	822	32	5	52.160
7	KEDU	15.825	15.294	12.506	6.999	6.022	324	486	1.366	65	2	58.889
8	PARAKAN	17.378	9.782	9.084	6.523	7.817	326	747	1.815	96	20	53.588
9	NGADIREJO	12.351	10.387	16.504	9.479	6.045	280	463	1.147	26	1	56.233
10	JUMO	9.477	5.804	7.057	4.121	2.632	172	187	535	14	3	30.002
11	TRETEP	6.763	4.874	5.984	2.678	608	42	50	110	3	1	21.113
12	CANDIROTO	5.935	10.506	8.379	4.079	2.872	217	286	669	12	1	32.956
13	KRANGGAN	15.004	8.437	8.734	8.533	6.543	239	355	1.120	51	5	49.021
14	TLOGOMULYO	6.722	4.795	5.822	3.347	1.720	45	106	263	9	3	22.832
15	SELOPAMPANG	5.778	3.660	5.493	2.653	2.010	92	115	361	11	2	20.175
16	BANSARI	3.515	10.168	5.115	3.216	1.644	72	122	341	10	0	24.203
17	KLEDUNG	11.064	4.648	6.906	3.424	1.558	34	86	174	7	1	27.902
18	BEJEN	6.638	2.847	6.267	3.481	1.773	103	105	257	11	0	21.482
19	WONOBOYO	7.820	4.144	8.214	4.116	1.550	99	104	238	6	3	26.294
20	GEMAWANG	11.653	8.034	8.033	3.839	1.587	101	98	255	10	2	33.612
JUMLAH		234.279	154.933	180.409	110.103	82.747	3.812	6.355	17.718	838	70	791.264
Persentase (%)		29,61	19,58	22,80	13,91	10,46	0,48	0,80	2,24	0,11	0,01	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, Tahun 2019

Penduduk Kabupaten Temanggung yang belum tamat SD masih besar, yaitu sejumlah 154.933 orang (19,58%). Sedangkan yang sudah menamatkan pendidikan dasar (SLTP) baru sejumlah 110.103 jiwa (13,91%).



D. ASPEK EKONOMI DAERAH

a. Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dikenal secara universal ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indexs (HDI). IPM merupakan salah satu indikator yang dapat mewakili keterbandingan hasil pembangunan manusia antar daerah. Konsep pembangunan manusia sebagai ukuran pencapaian hasil pembangunan menempatkan manusia pada posisi yang sebenarnya yaitu manusia sebagai penerima akhir dari hasil-hasil pembangunan. Angka IPM mengindikasikan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan.

IPM Kabupaten Temanggung 68,34 termasuk kategori sedang dan masih berada di bawah IPM Jawa Tengah. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah kemajuan pembangunan Jawa Tengah pada umumnya. Perbandingan IPM Kabupaten Temanggung dengan kabupaten/kota dalam regional eks karesidenan Kedu dan Jawa Tengah ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.5 IPM dan Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Kedu, Tahun 2014-2018

Kab/Kota	IPM					Peringkat IPM				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Kab.Kebumen	65.67	66.87	67.41	68.29	68,80	5	5	5	5	5
Kab.Purworejo	70.12	70.37	70.66	71.31	71,87	2	2	2	2	2
Kab.Wonosobo	65.20	65.70	66.19	66.89	67,81	6	6	6	6	6
Kab.Magelang	66.35	67.13	67.85	68.39	69,11	3	3	3	3	3
Kab.Temanggung	65.97	67.07	67.60	68.34	68,83	4	4	4	4	4
Kota Magelang	75.79	76.39	77.16	77.84	78,31	1	1	1	1	1
JAWA TENGAH	68.78	69.49	69.96	70.52	71,12					
NASIONAL	68.90	69.55	70.18	70.81	71,39					

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2019



Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya. Di Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir kecepatan rata-rata pertumbuhan IPM per tahun sebesar 0,85%. Kecepatan pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 tersebut menempati peringkat ke 9 se Provinsi Jawa Tengah. Jika kondisi ini dipertahankan dan selalu ditingkatkan maka pada tahun yang akan datang Temanggung akan mencapai IPM kategori Tinggi.

IPM dihitung dengan 4 (empat) komponen yaitu angka harapan hidup (dimensi kesehatan), angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah (dimensi pendidikan), dan pengeluaran riil per kapita (dimensi ekonomi). Perkembangan angka IPM Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.6 Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018

No	Variabel	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	65,52	65,97	67,07	68,34	68,83
1.	Angka Harapan Hidup /AHH (Tahun)	75,34	75,35	75,39	75,42	75,47
2.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,69	11,89	12,06	12,07	12,08
3.	Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,18	6,52	6,55	6,90	6,94
4.	Pengeluaran riil per kapita per tahun (ribu rupiah)	8.062	8.369	8.593	8.794	9.142

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2019

1) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat. Angka Harapan Hidup



(AHH) yaitu rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Semakin tinggi AHH maka derajat kesehatan masyarakat semakin baik, begitu pula keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu daerah.

Angka Harapan Hidup (AHH) dihitung oleh BPS dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack* Angka Harapan Hidup penduduk di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2014 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

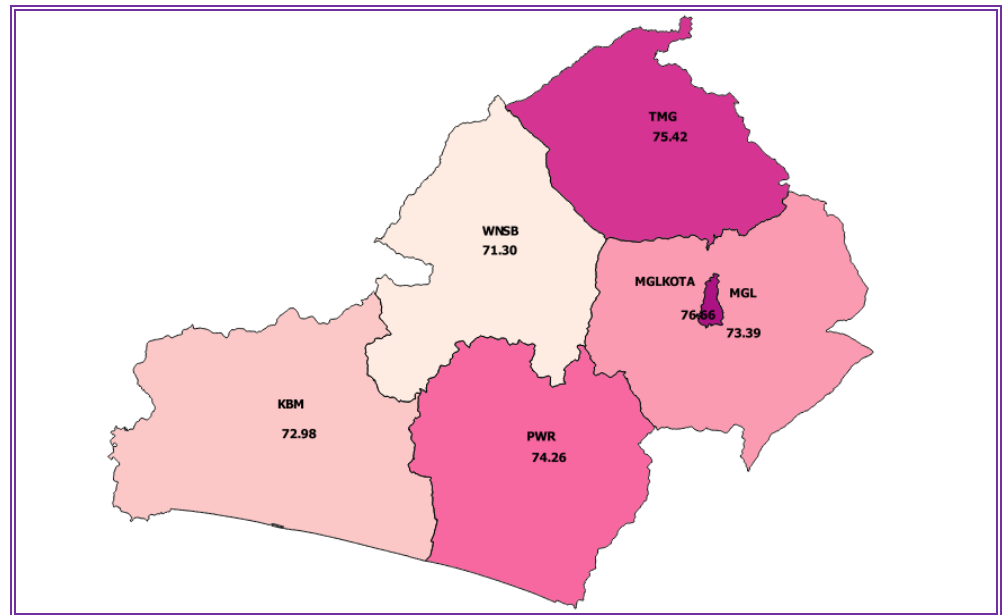
Tabel 1.7 Angka Harapan Hidup Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018

ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH)	2014	2015	2016	2017	2018
Kabupaten Temanggung	75,34	75,35	75,39	75,42	75,47
Jawa Tengah	73,88	73,96	74,02	74,08	74,18
Nasional	70,59	70,78	70,90	71,06	71,20

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Temanggung telah mencapai 75,47 tahun dan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selalu terjadi peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena lama hidup seseorang tidak terlepas dari tingkat kesehatan yang bersangkutan. Derajat Kesehatan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh peningkatan pelayanan kesehatan baik akses maupun mutu pelayanan, penyehatan lingkungan, asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan sehingga angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan pada umumnya.





Gambar 1. 2 Peta Tematik Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kedu, 2018

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2019

Angka Harapan Hidup Kabupaten Temanggung berada pada peringkat ke 2 di antara kabupaten/kota se eks Karesidenan Kedu, setelah angka harapan hidup Kota Magelang yang mencapai 76,66 tahun. Secara mikro, individu dengan harapan hidup yang tinggi secara ekonomis memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan yang tinggi. Keluarga dengan usia harapan hidup yang tinggi cenderung untuk menginvestasikan pendapatannya di bidang pendidikan dan menabung. Dengan demikian, tabungan nasional akan meningkat, investasi akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan pembangunan.

2) Angka Harapan Lama Sekolah

Untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak digunakan indikator Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling-EYS*).

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh



anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

AHLS dihitung berdasarkan rumus dari Badan Pusat Statistik. Penghitungan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung selama Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.8 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
		Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
1	2014	11.69	12.17	12.39
2	2015	11.89	12.38	12.55
3	2016	12.06	12.46	12.72
4	2017	12.07	12.57	12.85
5	2018	12,08	12,63	12,91

Sumber : BPS Kab. Temanggung dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Angka harapan lama sekolah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2017 berada pada peringkat ke 27 diantara 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 12,08 tahun dan di bawah harapan sekolah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada umumnya yang mencapai 12,63 tahun.

Berdasarkan tabel di atas AHLS di Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat, tetapi masih lebih rendah daripada AHLS Provinsi Jawa Tengah maupun AHLS Nasional. Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 AHLS Kabupaten Temanggung selalu mengalami kenaikan, sedangkan data AHLS tahun 2019 belum



tersedia. Peningkatan setiap tahun rata-rata 0,098. Masih rendahnya AHLS Kabupaten Temanggung disebabkan antara lain karena di Kabupaten Temanggung masih terdapat siswa yang putus sekolah, terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah, terdapat lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs, dan belum banyak perguruan tinggi yang memiliki program studi dan jurusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3) Angka rata-rata lama sekolah

Angka rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas, dengan asumsi usia penduduk 25 tahun sudah menyelesaikan semua pendidikan formal.

Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) dihitung berdasarkan rumus dari Badan Pusat Statistik. Penghitungan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Realisasi ARLS di Kabupaten Temanggung Tahun 2014 sampai 2018 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 1.9 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		
		Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
1	2014	6.18	6.93	7.73
2	2015	6.52	7.03	7.84
3	2016	6.55	7.15	7.95
4	2017	6.90	7.27	8.10
5	2018	6,94	7,35	8,17

Sumber : Dinas Kominfo.Kab. Temanggung dan BPS Prov. Jawa Tengah, 2019



Rata-rata lama sekolah Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 baru mencapai 6,94 tahun, lebih rendah dibandingkan rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada umumnya yang mencapai 7,35 tahun. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Temanggung masih memprihatinkan jika dibandingkan dengan target nasional yang mewajibkan pendidikan dasar 9 tahun. Rata-rata penduduk Kabupaten Temanggung bersekolah kelas 1 SMP/MTs. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Temanggung berada pada peringkat ke 23 diantara 35 kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan tabel di atas, ARLS Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat, tetapi masih lebih rendah daripada ARLS Provinsi Jawa Tengah maupun ARLS Nasional. Pada tahun 2014 ARLS Kabupaten Temanggung sebesar 6,18 meningkat menjadi 6,94 pada tahun 2018, data ARLS tahun 2019 belum tersedia. Peningkatan setiap tahun rata-rata sebesar 0,15; rata-rata peningkatan ARLS Kabupaten Temanggung lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata peningkatan ARLS Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,10 maupun rata-rata peningkatan ARLS Nasional sebesar 0,11.

Rendahnya ARLS Kabupaten Temanggung antara lain disebabkan karena di Kabupaten Temanggung masih terdapat siswa yang putus sekolah, masih terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah, masih terdapat lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs, dan belum banyak perguruan tinggi yang memiliki program studi dan jurusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

4) Pengeluaran Riil Perkapita yang Disesuaikan

Pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk dapat dikatakan bisa memenuhi standar hidup layak. Secara ekonomi dapat dilihat pada tabel 1.15 di atas bahwa kesejahteraan masyarakat Kabupaten



Temanggung semakin meningkat yang ditunjukkan dengan kenaikan pengeluaran riil perkapita. Pengeluaran riil perkapita masyarakat di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2018 sebesar Rp142.000,00.

b. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu global dan masih menjadi keprihatinan banyak pihak. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum yang sesuai dengan tingkat kelayakan hidup. Kemiskinan juga bisa diartikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan karena kemiskinan memiliki dampak yang menyebar terhadap aspek-aspek yang ada di masyarakat secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat permasalahan mendasar dalam masyarakat dapat teratasi, diantaranya pengentasan kemiskinan. Idealnya pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan sebagai dampak peningkatan pendapatan per kapita.

Sementara indikator keluarga fakir miskin yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI (Keputusan Menteri Sosial No. 146/ HUK / 2013), yaitu:

- a. Penghasilan rendah, atau berada di bawah garis kemiskinan yang dapat diukur dari tingkat pengeluaran per orang per bulan berdasarkan standar Badan Pusat Statistik (BPS) per wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Ketergantungan pada bantuan pangan kemiskinan (zakat/raskin/santunan sosial).
- c. Keterbatasan kepemilikan pakaian yang cukup setiap anggota keluarga per tahun (hanya mampu memiliki 1 (satu) stel pakaian lengkap per orang per tahun).



- d. Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga yang sakit.
- e. Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya.
- f. Tidak memiliki harta yang dapat dijual untuk membiayai kebutuhan hidup selama tiga bulan atau dua kali batas kemiskinan.
- g. Ada anggota keluarga yang meninggal dalam usia muda atau kurang dari 40 tahun akibat tidak mampu mengobati penyakit sejak awal.
- h. Ada anggota keluarga usia 15 tahun ke atas yang buta huruf.
- i. Tinggal di rumah yang tidak layak huni.

Angka kemiskinan mencakup besaran jumlah dan persentase penduduk miskin dan dihitung oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung. Realisasi angka kemiskinan tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.10 Angka Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Penduduk Miskin	87.450	87.090	86.770	75.571	72.570
2.	Jumlah Penduduk	745.778	752.509	758.980	765.659	770.382
3.	Angka Kemiskinan (%)	11,76	11,60	11,46	9,87	9,42

Sumber BPS Kabupaten Temanggung, 2019

Pada periode 5 (lima) tahun tersebut, perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung relatif berfluktuasi dari tahun ke tahun. Angka kemiskinan pada tahun 2015 adalah yang tertinggi sepanjang 5 (lima) tahun terakhir yaitu sebesar 11,76 persen. Pada tahun berikutnya, cenderung menurun menjadi 9,42 persen pada tahun 2019.

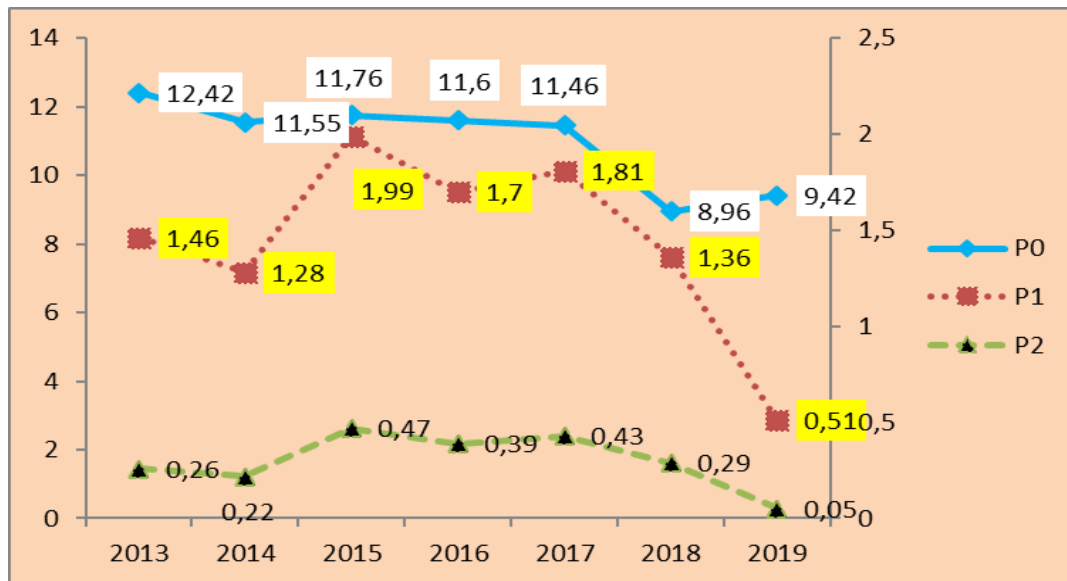


Meskipun data kemiskinan makro tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana si miskin tersebut, namun fluktuasi kemiskinan ini menunjukkan bahwa banyak penduduk Kabupaten Temanggung yang merupakan kelompok rentan miskin, yaitu kelompok yang berada sedikit di atas garis kemiskinan. Penduduk pada kelompok ini sangat rentan tererosok dalam kemiskinan ketika garis kemiskinan meningkat sedikit saja.

Distribusi pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kabupaten Temanggung, selain penduduk yang tergolong miskin di sebelah kiri garis kemiskinan kelompok penduduk yang tidak miskin namun hanya sedikit disebelah kanan garis kemiskinan masih cukup besar. Kelompok penduduk inilah yang dinamakan kelompok rentan miskin. Guncangan ekonomi yang relatif kecil sekalipun dapat menjadikan mereka kembali menjadi miskin.

pendudukan miskin saja, namun juga mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* atau P1) menjelaskan rata rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Penurunan pada P1 mengidentifikasi adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity indeks* atau P2). Kebijakan pembangunan tentu mengurangi jumlah dan persentase memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.





Gambar 1. 3 Perkembangan P0, P1 dan P2 Kabupaten Temanggung, Tahun 2013 – 2017

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, Tahun 2019

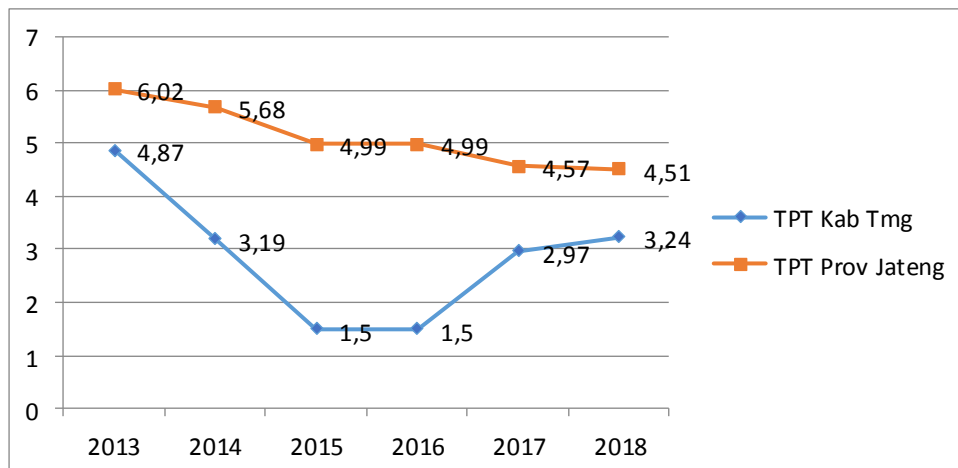
Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa meskipun sepanjang 3 tahun terakhir persentase penduduk miskin menurun, demikian juga nilai P1 dan P2 terlihat selalu menurun. P1 yang meningkat pada tahun 2017 menunjukkan bahwa rata rata pengeluaran penduduk miskin menurun semakin jauh dari garis kemiskinan. Hal ini mengindikasikan biaya yang dibutuhkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan semakin besar. Indeks P2 juga meningkat pada tahun 2017 yang mengindikasikan ketimpangan di antara penduduk miskin semakin melebar, sehingga ketepatan sasaran program-program dalam menjangkau terutama penduduk miskin semakin diperlukan.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT adalah persentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah angkatan kerja, digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT menunjukkan persentase orang yang mencari kerja terhadap penduduk angkatan kerja. Tingginya TPT merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja.



TPT sering menjadi topik diskusi karena terkait dengan masalah ekonomi dan sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. TPT 6% artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi



barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 6 orang merupakan pengangguran.

Gambar 1. 4 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Temanggung Tahun 2013–2018

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel di atas terlihat bahwa TPT Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, namun demikian masih tergolong rendah yaitu sebesar 3,24 persen. Sepanjang enam tahun terakhir TPT di Kabupaten Temanggung tergolong fluktuatif.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah perbandingan pencapaian kinerja perekonomian suatu daerah pada periode waktu tertentu terhadap periode waktu sebelumnya. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dapat diketahui dari besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan nasional 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 1.11 Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018

Pertumbuhan Ekonomi	2014	2015	2016	2017	2018
Nasional	5,02	4,79	5,02	5,07	5,17
Provinsi Jawa Tengah	5,42	5,4	5,27	5,27	5,25
Kota Magelang	4,9	5,07	5,17	5,18	5,59
Kabupaten Kebumen	5,80	6,29	4,97	4,89	5,52
Kabupaten Magelang	4,88	5,35	5,37	5,06	5,43
Kabupaten Purworejo	4,49	5,12	5,12	5,14	5,32
Kabupaten Temanggung	5,03	5,24	4,98	4,68	5,07
Kabupaten Wonosobo	4,89	5,12	5,13	3,16	4,94

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 lebih rendah bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Aktivitas perekonomian di Kabupaten Temanggung tetap berjalan namun mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena kontribusi sektor pertanian sebagai sektor yang dominan mengalami penurunan 0,19% sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi diperlukan daya ungkit sektor pertanian melalui pengembangan industri pengolahan berbasis produk pertanian lokal.

Jika dibandingkan dengan wilayah Eks Karesidenan Kedu yang meliputi 6 (enam) kabupaten, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung menempati posisi ke 5 (lima), lebih rendah dibandingkan Kota Magelang, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kebumen, namun lebih tinggi dari Kabupaten Wonosobo.

Sedangkan laju pertumbuhan seluruh kategori lapangan usaha atas dasar harga konstan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 1.12 Pertumbuhan PDRB per Lapangan Usaha Tahun 2014 – 2018 (persen)

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,85	4,78	3,23	1,87	3,39
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	-1,92	4,93	3,21	1,77	3,48
	a. Tanaman Pangan	-11,89	7,59	3,35	-1,46	1,26
	b. Tanaman Hortikultura	1,17	2,34	2,12	1,28	4,43
	c. Perkebunan	4,62	5,74	2,59	2,45	2,61
	d. Peternakan	3,04	4,95	5,80	6,77	6,04
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	2,29	4,26	1,24	2,59	1,56
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	-0,19	-0,02	1,38	3,17	1,37
3	Perikanan	-1,03	4,16	5,43	4,21	2,49
B	Pertambangan dan Penggalian	3,55	2,62	5,09	4,24	3,61
C	Industri Pengolahan	8,04	5,60	5,51	5,08	4,73
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,45	-0,45	5,60	9,28	4,62
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,98	2,07	3,43	4,94	4,67
F	Konstruksi	4,68	8,50	5,76	9,81	6,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,68	3,51	5,02	5,12	5,79
H	Transportasi dan Pergudangan	5,32	7,88	6,33	3,60	5,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,20	6,76	5,61	7,70	6,26
J	Informasi dan Komunikasi	13,30	8,10	5,12	10,58	13,75
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,46	7,94	7,77	4,70	3,52
L	Real Estate	6,48	6,97	5,81	7,85	5,65
M,N	Jasa Perusahaan	9,72	8,11	5,39	8,17	9,48
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,16	5,00	2,77	2,41	3,11
P	Jasa Pendidikan	9,86	6,17	6,08	4,99	6,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,51	5,42	7,43	9,92	8,15
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,20	2,86	7,28	7,85	7,72
	Produk Domestik Regional Bruto	5,03	5,24	4,98	4,68	5,07

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2018 pertumbuhan tercepat adalah kategori lapangan usaha informasi dan komunikasi, diikuti oleh jasa perusahaan, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Lapangan usaha informasi dan komunikasi tumbuh paling cepat karena seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan menjadi kebutuhan penting semua lapisan masyarakat. Pada era industri 4.0 ini koneksi internet menjadi kebutuhan yang penting sehingga mendorong penjualan paket internet yang menjadi penunjang utama kategori tersebut.



e. Pendapatan Perkapita

Secara konsepsional PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Semakin besar PDRB Perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut. PDRB perkapita merupakan nilai rata-rata pendapatan dari hasil seluruh sektor produksi. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.13 PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018

Tahun	ADHB		ADHK	
	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
2014	19.748.487,14	10,43	16.060.953,69	4,03
2015	21.641.442,46	9,59	16.746.799,37	4,27
2016	23.341.213,21	7,85	17.422.709,41	4,04
2017	24.810.094,42	6,29	18.080.083,48	3,77
2018	26.395.000,00	6,38	18.877.000,00	4,40

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Tahun 2019

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai PDRB Perkapita selalu naik yang menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik, namun dari persentase pertumbuhan mengalami perlambatan pada tahun 2017.

PDRB perkapita Kabupaten Temanggung, dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.14 PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Temanggung, dan Prov. Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 (dalam Juta Rupiah)

TAHUN	TEMANGGUNG	JAWA TENGAH
2014	19.748.487,14	27.599.082,11
2015	21.641.442,46	30.025.166,49
2016	23.341.213,21	31.077.240,10
2017	24.810.094,42	34.710.958,06
2018	26.395.000,00	36.780.000,00

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, Tahun 2019



Namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki dan dinikmati oleh warga Temanggung saja, akan tetapi ada juga yang dimiliki dan dinikmati oleh penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di Kabupaten Temanggung. Disamping itu, angka pendapatan perkapita belum memperlihatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

f. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan koefisien yang digunakan untuk mengukur ketimpangan atau ketidakrataan agregat yang dapat bervariasi antara 0 sampai 1. Koefisien Gini sama dengan 0 menunjukkan adanya pemerataan sepenuhnya, sedangkan koefisien Gini sama dengan 1 menunjukkan adanya ketidakmerataan distribusi pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup menjadi jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara merata. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi seyogyanya harus diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan agar hasil-hasil pertumbuhan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, sasaran pembangunan tidak hanya berhenti sampai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, melainkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas ketika semakin besar masyarakat yang terlibat dan menikmati hasil ekonomi produktif di dalam sistem perekonomian.

Tabel 1.15 Indeks Gini Kabupaten Temanggung 2014-2018

Variabel	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks Gini	0,38	0,38	n.a	n.a	0,38

Sumber: ASPM Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan perkembangan Gini rasio sepanjang 2014-2018 yang cenderung konstan, sedangkan data indeks gini tahun 2016 dan 2017 tidak tersedia.



E. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sebagai tindaklanjut dari kedua peraturan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan penataan kelembagaan organisasi pemerintahan pada akhir Tahun 2016 dan berlaku efektif sejak awal tahun 2017.

Menindaklanjuti Permendagri 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pada tahun 2018 Pemerintah kabupaten Temanggung melakukan penataan kelembagaan organisasi pada UPT Dinas. Menindaklanjuti Permendagri 111 tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan/Barang Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2019 penataan kelembagaan organisasi pada Sekretariat Daerah dengan membentuk satu Bagian Pengadaan/Barang Jasa dan menghapus Bagian Pemerintahan Desa digabung menjadi 1 bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu bidang Pemerintahan Desa. Adapun Perangkat daerah di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah.
3. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah;



4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah;
5. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat Daerah, terdiri dari Sekretaris Daerah, 3 Asisten, 9 Bagian, dan kelompok jabatan fungsional, serta merupakan perangkat daerah Tipe B;

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi 3 Bagian, yaitu: Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum dan Bagian Kesejahteraan Rakyat.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi 3 Bagian, yaitu: Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
3. Asisten Administrasi, membawahi 3 Bagian yaitu: Bagian Umum, Bagian Organisasi dan Tatalaksana, dan Bagian Hubungan Masyarakat.

2. SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi rapat-rapat DPRD;
4. Penyediaan tenaga ahli dan tim ahli DPRD; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat DPRD, terdiri dari Sekretaris, 3 Bagian, dan kelompok jabatan fungsional, serta merupakan perangkat daerah Tipe B; sekretaris membawahi tiga Bagian, yaitu: Bagian Umum dan Hubungan



Masyarakat, Bagian Keuangan, dan Bagian Rapat dan Perundang-Undangan.

3. INSPEKTORAT

Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektur mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan daerah bidang pengawasan;
2. Perencanaan program pengawasan;
3. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
4. Penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
5. Penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
6. Penyelenggaraan kegiatan konsultasi (counsulting) dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah dan desa;
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan;
8. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Inspektorat; dan
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Inspektorat, terdiri dari Inspektur, Sekretariat, 4 Inspektur Pembantu, dan kelompok jabatan fungsional, serta merupakan perangkat daerah Tipe A.



4. DINAS DAERAH

Dinas Daerah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidangnya, dengan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidangnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan bidangnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya;
4. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Dinas Daerah; terdiri dari 18 Dinas, dengan berbagai Tipe sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakannya, yaitu:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan, bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan;
4. SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Sub Urusan Kebakaran;
5. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga



Berencana serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. Dinas Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
14. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
15. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan;
16. Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan, dan bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan;
17. Dinas Pertanian dan Katanahan Pangan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Pangan;dan
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang perpustakaan.



5. BADAN DAERAH

Badan Daerah, sebagai pelaksana fungsi penunjang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di fungsi penunjangnya dengan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan fungsi penunjangnya;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan fungsi penunjangnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsi penunjangnya;
4. Pelaksanaan kesekretariatan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya;

Badan Daerah, terdiri dari 3 Badan, dengan berbagai Tipe sesuai dengan fungsi penunjang yang dilaksanakannya, yaitu:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi Penunjang Keuangan; dan
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

6. KECAMATAN

Kecamatan dipimpin Camat yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Camat mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;



6. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
7. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
9. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kabupaten Temanggung memiliki 20 Kecamatan, sedangkan 23 kelurahan yang ada menjadi perangkat kecamatan dan bukan perangkat daerah tersendiri. Kelurahan tersebut terbagi di 4 Kecamatan sebagai berikut:

- Kecamatan Temanggung : 19 Kelurahan
- Kecamatan Parakan : 2 Kelurahan
- Kecamatan Ngadirejo : 1 Kelurahan
- Kecamatan Kranggan : 1 Kelurahan

F. KEPEGAWAIAN

Profil Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya PNS di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019 menurut golongan, eselon/jabatan, dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 1.16 Profil Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Temanggung

NO	JENIS DATA	2015	2016	2017	2018	2019
I.	Jumlah PNS	8.156	7.277	7.213	6.778	6.670
	1. Golongan I	418	373	370	338	315
	2. Golongan II	1.519	1.322	1.301	1.128	1.082
	3. Golongan III	3.485	3.262	3.328	3.245	3.395
	4. Golongan IV	2.734	2.320	2.214	2.067	1.878
II.	Jumlah Pejabat Struktural	847	763	784	710	633
	1. Eselon I	0	0	0	0	0
	2. Eselon II (pimpinan Tinggi Pratama)	25	25	30	23	22
	3. Eselon III (administrator)	150	136	156	144	134
	4. Eselon IV (Pengawas)	620	566	598	543	477
	5. Eselon V	52	52	0	0	0
III.	Jumlah PNS	8.156	7.277	7.213	6.778	6.670
	Laki-Laki	3.929	3.438	3.336	3.089	2.959
	Perempuan	4.227	3.839	3.877	3.689	3.711

Sumber : BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2019



Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2019 merupakan tahun dimana jumlah PNS di kabupaten Temanggung berada di angka terendah yaitu sejumlah 6.670 orang dan hal tersebut menjadi pola yaitu semakin turun di tiap tahunnya. Semakin sedikitnya jumlah PNS diakibatkan moratorium pengadaan CPNS yang sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu. Dapat terlihat pula bahwa jumlah PNS berjenis kelamin perempuan lebih besar dari pada yang berjenis kelamin laki-laki.

Jumlah pejabat struktural juga naik turun karena pola pembinaan karier terutama yang bersifat pengisian jabatan yang kosong tidak dapat dilakukan setiap saat, baik bagi jabatan eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) atau Jabatan Eselon III (Jabatan Administrator), atau IV (Jabatan Pengawas).

Jabatan eselon IV (Jabatan Pengawas) menjadi jabatan terbanyak yang ada yaitu sejumlah 477 (75,35%) pejabat sedangkan PNS yang memiliki golongan III yaitu sejumlah 3.395 (50,89%) menjadi komposisi terbesar PNS di Kabupaten Temanggung.

A. CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Model Penilaian yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah.



Rumus penghitungan dari indek reformasi birokrasi adalah penggabungan penilaian dari total proses 60 % (indikator 8 area perubahan) dan total hasil 40 % (kapasitas akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih bebas KKN, dan kualitas pelayanan publik). Untuk indikator penilaian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.17 Indikator Pengungkit (60%):

No	Unsur	Bobot
1	Manajemen Perubahan	5 %
2	Penataan Tatalaksana	5 %
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15 %
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10 %
5	Penguatan Pengawasan	15 %
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10 %

Tabel 1.18 Indikator Hasil (40%):

No	Unsur	Bobot
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20 %
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20 %

Data penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung dari tahun 2013-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.19 Penilaian Reformasi Birokrasi Kab. Temanggung Tahun 2013-2019

No.	TAHUN	NILAI
1	2014	47,50
2	2015	58,07
3	2016	66,68
4	2017	72,23
5	2018	72,34
6	2019	78,32

Sumber : Bagian Ortala Setda Kabupaten Temanggung

Berdasarkan tabel di atas, nilai indeks penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung dari Tahun 2013 sampai dengan 2019 terus mengalami kenaikan dari 47,5 menjadi 78,32.



Selain penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan secara mandiri juga dilakukan penilaian dari Kementrian PAN dan RB, namun untuk penilaian tahun 2019 sampai dengan laporan ini disusun hasilnya belum diumumkan. Sementara untuk penilaian pada tahun 2018 dengan hasil Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah **60,15** dengan kategori **"B"** terinci sebagai berikut:

Tabel 1.20 Penilaian Reformasi Birokrasi Kab. Temanggung Tahun 2018 dari Kementerian PAN dan RB

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2017	2018
I	Komponen Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5	2,37	2,37
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5	2,09	1,66
3	Penataan dan penguatan Organisasi	6	2,49	2,49
4	Penataan Tata Laksana	5	3,47	2,88
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	8,44	9,63
6	Penguatan Akuntabilitas	6	3,22	3,40
7	Penguatan Pengawasan	12	4,60	4,60
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	3,07	3,91
Total Komponen Pengungkit (A)		60	29,75	30,94
II	Komponen Hasil			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14	7,25	8,27
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6	4,71	3,83
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7	5,85	5,93
4	Opini BPK	3	3,00	3,00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10	7,90	8,18
Total Komponen Hasil (B)		40	28,70	29,21
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100	58,45	60,15

Sumber : Bagian Ortala Setda Kabupaten Temanggung

Dari data di atas, untuk meningkatkan kualitas penataan birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan diantaranya:



- a. Meningkatkan internalisasi budaya kerja dan perubahan mindset terhadap para pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
- b. Melakukan identifikasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis secara keseluruhan serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan system pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkala untuk menyempurnakan produk hukum yang dibentuk
- c. Melakukan evaluasi kelembagaan yang berfokus kepada pencapaian kinerja yang akan dihasilkan
- d. Menyusun peta bisnis proses dari level instansi hingga unit kerja sehingga dapat menggambarkan hubungan dan sinergitas antara unit kerja
- e. Meningkatkan pengelolaan system manajemen SDM antara lain melakukan assessment pegawai secara menyeluruh, dan menyempurnakan ukuran kinerja individu yang mengacu kepada kinerja organisasi dan dapat dijadikan dasar pemberian *reward and punishment*
- f. Menetapkan kebijakan tentang *whistle blowing system* dan benturan kepentingan serta meningkatkan implementasi atas penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, dan penerapan SPIP
- g. Meningkatkan penerapan menuju WBK/WBBM di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung sehingga dapat semakin mempercepat implementasi RB
- h. Mengoptimalkan implementasi pelayanan publik khususnya di unit kerja dalam hal pemberian *reward and punishment*.

G. ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa datang.



Isu strategis disusun berdasarkan gambaran kondisi daerah dan permasalahan perangkat daerah, memperhatikan juga dokumen rencana pembangunan RPJPD Kabupaten Temanggung, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2020, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, berdasarkan Peraturan Daerah RTRW Nomor: 1 Tahun 2012 Kabupaten Temanggung 2011-2031. Adapun Isu-isu Strategis Kabupaten Temanggung periode 2018-2023 sebagai berikut:

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat kompleks, bukan hanya masalah pendapatan, akan tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang. Penanggulangan kemiskinan merupakan sasaran utama dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pada tingkat global, nasional, provinsi maupun di Kabupaten Temanggung. Bahkan dalam amanat SDG's di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (*zero poverty*).

Penduduk Kabupaten Temanggung yang berada pada garis kemiskinan sampai dengan Maret 2018 sebanyak 9,87 persen atau 75.390 jiwa. Capaian ini lebih baik dibandingkan tahun 2017 sebesar 11,46 persen atau 86.770 jiwa. Capaian tersebut lebih baik dari Jawa Tengah dimana angka kemiskinan sebesar 11,46 persen atau sebanyak 3.897.200 jiwa. Namun angka tersebut masih di bawah nasional yaitu sebesar 9,82 persen.

Penduduk miskin di Kabupaten Temanggung memiliki ciri-ciri antara lain rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya kondisi kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya keahlian, rendahnya akses terhadap tanah dan modal, sangat rentan terhadap gejolak ekonomi, bencana alam, dan rendahnya partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan, serta masih kurangnya keamanan individu. Adapun faktor yang mempengaruhi kemiskinan antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan kondisi lingkungan.



Dalam rangka mengoptimalkan ketepatan sasaran program dan kegiatan maupun lokasi intervensi penanganan kemiskinan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung telah melakukan upaya yang komprehensif dalam penanggulangan kemiskinan dengan mensinergikan antara peran masyarakat, pemerintahan desa dan kebijakan Pemerintah Daerah. Bahkan pada tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung secara kelembagaan telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Temanggung.

Kemiskinan juga dipengaruhi oleh dimensi politik yang dikarenakan oleh struktur ekonomi politik yang timpang sehingga pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan yang mengacu pada strategi penanggulangan kemiskinan yaitu memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan menciptakan pembangunan yang inklusif, memperluas pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan dan kesempatan kerja, dan melakukan evaluasi efektivitas program/ kegiatan penanggulangan kemiskinan.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data BPS pada tahun 2017 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Temanggung sebesar 68,34 dengan kategori sedang (peringkat 26 se-Jawa Tengah), yang meliputi (1) Angka Harapan Hidup (AHH) 75,42 tahun (2) Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) 12,07 tahun dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) 6,9 tahun. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa Angka IPM Kabupaten Temanggung berada di bawah rata-rata kabupaten/kota lain di Jawa Tengah ataupun nasional.

Angka IPM yang belum optimal, dikarenakan belum optimalnya kemampuan masyarakat mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan.



Kabupaten Temanggung sampai pada tahun 2017 teridentifikasi beberapa pelayanan pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi. Seperti cakupan akses layanan angka lama sekolah misalnya, yang berdasarkan analisis disebutkan masih rendah. Demikian pula halnya dengan akses pendidikan 12 tahun yang belum mampu tercapai secara optimal. Selain itu, akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi dan pendidikan inklusif di Kabupaten Temanggung juga masih rendah. Sedangkan di bidang kesehatan masih perlu peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan.

Dengan ditetapkan UU No 6 tahun 2014 menjadi isu strategis yang sangat penting untuk dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dan kelembagaan desa. Karena pemerintahan desa mempunyai peran strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan serta sebagai tempat terdepan pelayanan yang bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga peningkatan kapasitas SDM di desa menjadi sangat penting untuk membentuk pemerintahan desa dan masyarakat desa yang berkualitas.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan Indeks pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Temanggung perwujudan peningkatan aksesibilitas serta optimalisasi kualitas pelayanan baik itu di bidang kesehatan, pendidikan maupun kebutuhan dasar lainnya perlu untuk menjadi skala prioritas, mengingat sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan wujud nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Ekonomi Kerakyatan

Parameter keberhasilan pembangunan Kabupaten Temanggung salah satunya diukur dengan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung tahun 2017 sebesar 4,68 persen. Namun pertumbuhan ekonomi lebih didominasi sektor konsumsi keluarga dan tidak diimbangi dengan peningkatan sektor investasi. Satu hal sisi positif perekonomian di Kabupaten Temanggung adalah rendahnya laju inflasi pada tahun 2018 sebesar 4,0 persen, tingkat inflasi tersebut di bawah pertumbuhan ekonomi Temanggung.



Pertumbuhan ekonomi dan daya saing akan lebih signifikan jika didorong pula peningkatan sarana dan prasarana penunjang produktivitas pertanian, dan pemasaran produksi pertanian yang difasilitasi dengan kemudahan akses pasar produk-produk pangan lokal yang sehat yang didukung dengan penyediaan jaringan informasi tepat guna hingga level desa guna memudahkan akses informasi pasar dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan pertanian lokal.

Dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah di Kabupaten Temanggung perlu distimulasi melalui penguatan peranan UMKM dalam peningkatan daya saing daerah, melalui Pembinaan dan pembekalan sumberdaya wirausahawan agar usaha mikro dan informal dapat meningkatkan produktivitas.

Selain sektor pertanian dan sektor UMKM, pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah juga ditingkatkan melalui sektor pariwisata, khususnya pariwisata yang berbudaya dan berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan potensi geografis dan sosiografis yang dimiliki Temanggung dan diharapkan dapat dikembangkan menjadi daya tarik serta sektor unggulan yang memiliki keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan ke belakang (*backward linkage*) yang kuat sebagai motor penggerak produktivitas perekonomian daerah. Pengembangan pariwisata juga diarahkan dengan menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan serta didukung interkoneksi antar desa, pemerintah, swasta, perguruan tinggi, komunitas dan pelaku wisata.

Bukan hanya daya saing ekonomi, namun juga ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan merata untuk mengatasi kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Untuk itu membuka akses antar wilayah menjadi isu penting, terutama untuk menghubungkan daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan, transportasi kota-desa, pergantian antar moda, serta untuk meningkatkan kemudahan distribusi barang dan jasa dengan penyediaan akses infrastruktur berupa prasarana jalan dan jembatan, dilengkapi dengan transportasi publik yang memadai, jaringan komunikasi, dan jaringan energi yang penting.



4. Tata Kelola Pemerintahan dan kualitas pelayanan publik

Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan publik yang berkualitas merupakan bagian dari manajemen pembangunan yang meliputi kualitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi relevan untuk menciptakan pelayanan publik yang prima dalam perijinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan .

Dengan dikembangkan teknologi informasi sebagai dasar pelayanan kepada masyarakat ruang komunikasi dengan masyarakat semakin terbuka dan mudah diakses sehingga masyarakat dengan mudah dan cepat dapat memberikan masukan dan pengaduan.

Untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah kabupaten Temanggung akan diukur dengan beberapa kriteria yaitu:

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Temanggung terlihat pada hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 60,00 pada tahun 2018.

b. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada Tahun 2018 telah mencapai 83 dengan predikat B. Capaian tersebut mencerminkan tingkat pelayanan publik yang akuntabel, transparansi, supremasi hukum, serta mampu menjawab pengguna layanan.

c. Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Nilai AKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2018 sebesar 60,16 dengan predikat B (baik). Dengan hasil tersebut masih diperlukan perbaikan secara bertahap agar dapat meningkat menjadi kategori B (baik) dengan nilai yang lebih besar.



d. Pengukuran Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Layanan.

Pada tahun 2018 mendapatkan nilai 84,04 termasuk zona hijau, meskipun telah mengalami peningkatan diperlukan peningkatan secara terus menerus.

e. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Adapun hasil Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan tahapan penilaian evaluasi mandiri SPBE ini dan mendapatkan nilai kematangan 2.04 dengan predikat cukup dan masih diperlukan peningkatan.

f. Indeks profesionalisme ASN

Digunakan untuk mengukur dan mewujudkan profesionalitas ASN.

g. Indeks Manajemen Kearsipan (IMK)

Merupakan nilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan.

Tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung oleh ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang efektif. Untuk itu peningkatan kompetensi dan kualitas ASN serta penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya menjadi hal sangat penting yang harus dilakukan.

H. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyajian LKjIP Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.



Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III: Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan kinerja organisasi dan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMN dan RPJMD Provinsi. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebagai perwujudan dari Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih telah ditetapkan visi daerah yaitu:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.



- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

Guna mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil risiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk



dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.



Tabel 1.21 Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kabupaten Temanggung

MISI 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN / BIDANG
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya.	1. Indek Pembangunan Manusia (IPM) 2. Angka kemiskinan	1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	1. Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	Pendidikan
			2. Angka Harapan Lama Sekolah (AHL)	
		2. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	3. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Pemuda dan Olah Raga
		3. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	4. Angka Harapan Hidup (AHH)	Kesehatan
			5. Angka Kematian Ibu (AKI)	
			6. Angka Kematian Bayi (AKB)	
			7. Prevalensi balita gizi buruk	
			8. Persentase rumah tangga yang memiliki jamban	
			9. Indeks Kinerja RSUD	
		4. Meningkatnya budaya literasi masyarakat	10. Persentase peminjam di perpustakaan	Perpustakaan
		5. Meningkatnya pengembangan	11. Persentase pelestarian cagar budaya	Kebudayaan



		n seni dan pelestarian budaya lokal	12. Persentase kelompok seni budaya yang aktif	Kesatuan Bangsa dan Politik
		6. Meningkatkan nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	13. Indeks Gotong Royong	
				14. Indeks Toleransi
		7. Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	15. Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Sosial
			16. Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial	
		8. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	17. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Pengendalian Penduduk
9. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	18. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	19. Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan			
MISI 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	URUSAN / BIDANG
Meningkatnya pertumbuhan	3. Pertumbuhan Ekonomi 4. Inflasi 5. Pendapatan	1. Meningkatnya kesejahteraan petani	20. Nilai Tukar Petani (NTP)	Pertanian



Indikator ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2. Meningkatkan kedauletan pangan	21. Skor Pola Pangan Harapan	Pangan
			22. Tingkat Konsumsi Ikan	Perikanan
		3. Meningkatkan pariwisata daerah	23. Pertumbuhan jumlah wisatawan (length	Pariwisata
			24. Lama tinggal wisatawan	
		4. Meningkatkan investasi sektor riil	25. Kontribusi sektor perindustrian	Perindustrian
			26. Kontribusi sektor perdagangan	Perdagangan
			27. Persentase Koperasi sehat	Koperasi dan UKM
			28. Persentase UKM aktif	
			29. Pertumbuhan investasi daerah	Penanaman Modal
			30. Tingkat Partisipasi Angkatan	Tenaga Kerja
		5. Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	31. Persentase Infrastruktur	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			32. Persentase pemanfaatan ruang sesuai	
			33. Persentase kawasan kumuh perkotaan	Perumahan dan Kawasan Permukiman



			34. Persentase menurunnya angka kecelakaan	Perhubungan
		6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	35. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas				
TUJUAN	INDIKATOR TILIHAN	SASARAN	INDIKAT OR	URUSAN / BIDANG
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.	7. Indeks Reformasi Birokrasi 8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	36. Tingkat Konsistensi Program Pembangunan	Perencanaan
			37. Opini Laporan Keuangan Pemerintah	Keuangan
			38. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Administrasi Pemerintahan
			39. Persentase kegiatan yang selesai tepat	
			40. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Pengawasan
			41. Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	



			42. Indeks Persepsi Anti Korupsi	
			43. Indeks Profesionalisme	Kepegawaian dan Diklat
			44. Indeks Manajemen	Kearsipan
			45. Persentase RAPERD A yang disahkan tepat waktu	Sekretariat Dewan
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	46. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Komunikasi dan Informatika
			47. Nilai Keterbukaan Informasi	
			48. Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Layanan	Adminduk
		3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	49. Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			50. Persentase desa yang berprediksi	
		4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	51. Indeks Rasa Aman	Ketentraman dan Ketertiban Umum
		5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	52. Cakupan Desa tangguh bencana	Sosial-Kebencanaan

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2020.



B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) di Pemerintah Kabupaten Temanggung, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yaitu dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.22 Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Tujuan 1: Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya				
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	7,20 tahun	Dindikpora
		Angka Harapan Lama Sekolah (AHLs)	12,21 tahun	Dindikpora
2	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	0,63	Dindikpora
3	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	75,45 tahun	Dinkes
		Angka Kematian Ibu (AKI)	83,50 angka maks	Dinkes
		Angka Kematian Bayi (AKB)	12,8 angka maks	Dinkes
		Prevalensi balita gizi buruk	0,30 % maks	Dinkes
		Persentase rumah tangga yang memiliki jamban	79,84 %	Dinkes
		Indeks RSUD	79,20	Dinkes
4	Meningkatnya budaya literasi masyarakat	Persentase peminjam perpustakaan	75 %	Dinarpus
5	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	Persentase pelestarian cagar budaya	6,10 %	Dinbudpar
		Persentase kelompok seni budaya yang	44,33 %	Dinbudpar



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		aktif		
6	Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	Indeks Gotong Royong	0,63	Kesbangpol
		Indeks Toleransi	0,63	Kesbangpol
7	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	10,57 %	Dinsos
		Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial diluar panti sosial	1,22 %	Dinsos
8	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,84 %	BPPKBPPA
9	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,55	BPPKBPPA
		Presentase perempuan dan anak korban kekerasan	0,015 %	BPPKBPPA
Tujuan 2: Meningkatkan perekonomian daerah				
1	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	102,8	Dintanpangan
2	Meningkatnya kedaulatan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	73,1	Dintanpangan
		Tingkat Konsumsi Ikan	21,11 Kg/org/th	Dintanpangan
3	Meningkatnya pariwisata daerah	Pertumbuhan jumlah wisatawan	17 %	Dinbudpar
		Lama tinggal wisatawan	1 hari	Dinbudpar
4	Meningkatnya investasi sektor riil	Kontribusi sektor perindustrian	26,83 %	Dinperindagkop ukm
		Kontribusi sektor perdagangan	20,35 %	Dinperindagkop ukm
		Persentase Koperasi sehat	9,05 %	Dinperindagkop ukm



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		Persentase UKM aktif	36 %	Dinperindagkop ukm
		Laju investasi daerah	20 %	DPMPTSP
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75,53 %	Dinas Tenaga Kerja
5	Meningkatnya pemerataan infrastruktur wilayah	Persentase infrastruktur kondisi baik	80,03 %	DPUPKP
		Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	87,70 %	DPUPKP
		Persentase kawasan kumuh perkotaan	19,25 %	DPUPKP
		Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	1,22 %	DPUPKP
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,33 %	DLH
Tujuan 3: Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi				
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Tingkat Konsistensi Program Pembangunan	100 %	Bappeda
		Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	BPPKAD
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,3	Bagian Pemerintahan
		Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	100 %	Bagian Pembangunan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	62	Bagian Ortala



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,045	Inspektorat
		Indeks Persepsi anti Korupsi	3,40	Inspektorat
		Indeks Profesionalisme ASN	49	BKPSDM
		Indeks Manajemen Kearsipan	61	Dinarpus
		Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	50 %	Bagian Hukum
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,50	Kominfo
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	78,30	Kominfo
		Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggara Layanan Publik	77	Ortala
3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	0,63	Dinpermades
		Persentase desa yang berpredikat mandiri	4,14 %	Dinpermades
4	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Indeks rasa aman	0,63	Satpol PP
5	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Cakupan Desa tangguh bencana	6,67 %	BPBD

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2020.



C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2019 ada pada Lampiran III.

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Pada dasarnya perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;



3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah



Gambar 2.1 Penandatanganan Perjanjian kinerja Tahun 2019 secara langsung

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan target kinerja yang merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan, misi dan visi. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan target yang telah ditetapkan sebagai berikut:



Tabel 1.23 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN	TARGET
1	2	3	4	
Tujuan 1: Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya				
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal	7,20 tahun
		Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang	12,21 tahun
2	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Penghitungan dilakukan oleh pihak ketiga/independen	0,63
3	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	dihitung dengan program MCPDA atau <i>Mortpack</i>	75,45 tahun
		Angka Kematian Ibu (AKI)	jumlah ibu yang meninggal karena hamil bersalin, dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun yang sama dikali 100.000 kelahiran hidup	83,50 angka maks
		Angka Kematian Bayi (AKB)	jumlah bayi (berumur kurang dari 1 tahun) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun yang sama dikali 1.000 kelahiran hidup	12,8 angka maks
		Prevalensi balita gizi buruk	jumlah balita gizi buruk (0 sampai 60 bulan) yang ditemukan dibagi jumlah seluruh anak balita dikali 100%	0,30 % maks
		Persentase rumah tangga yang memiliki jamban	Jumlah rumah tangga yang memiliki jamban dibagi jumlah rumah tangga dikali 100%	79,84 %
		Indeks RSUD	Total score aspek penilaian kinerja keuangan ditambah kinerja non keuangan(Kategori Sehat > 65)	79,20
4	Meningkatnya budaya literasi masyarakat	Persentase peminjam perpustakaan	Jumlah peminjam buku dibagi jumlah pengunjung perpustakaan dikali 100%	75 %



5	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	Persentase pelestarian cagar budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dibagi jumlah cagar budaya yang ada dikali 100%	6,10 %
		Persentase kelompok seni budaya yang aktif	Jumlah kelompok seni budaya teregistrasi yang aktif dibagi jumlah keseluruhan kelompok seni budaya yang teregistrasi	44,33 %
6	Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	Indeks Gotong Royong	Indeks gotong royong terdiri dari 4 parameter yaitu 9.kerjasama sosial, jejaring sosial, aksi kolektif dan kepercayaan sosial	0,63
		Indeks Toleransi	Diukur denga 4 parameter yaitu inklusi terhadap minoritas, dukungan sosial kepada minoritas, penerimaan terhadap sosial budaya dan kesetaraan gender	0,63
7	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dibagi jumlah rumah dikali 100%	10,57 %
		Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial diluar panti sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial di luar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dasar dibagi jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar di luar panti sosial yang membutuhkan rehabilitasi sosial dikali 100%	1,22 %
8	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Jumlah penduduk tahun n dikurangi jumlah penduduk tahun sebelumnya dibagi jumlah penduduk tahun sebelumnya dikali 100%	0,84 %
9	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$IPG=1/3[(Xede(1) + Xede(2) + 1inc-dis)]$	94,55
		Presentase perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dibagi jumlah rumah tangga	0,015 %
Tujuan 2: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan				
1	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks yang diterima petani dibagi indeks yang dibayar petani dikali 100	102,8
2	Meningkatnya kedaulatan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) dikali bobot masing-masing kelompok pangan	73,1
		Tingkat Konsumsi Ikan	Jumlah Konsumsi Ikan per orang dalam satu tahun	21,11 Kg/org/th



3	Meningkatnya pariwisata daerah	Pertumbuhan jumlah wisatawan	Jumlah wisatawan tahun berjalan dikurangi jumlah wisatawan tahun sebelumnya dibagi jumlah wisatawan tahun sebelumnya dikali 100%	17 %
		Lama tinggal wisatawan (<i>length of stay</i>)	Jumlah LOS Hotel di Temanggung dibagi jumlah hotel	1 hari
4	Meningkatnya investasi sektor riil	Kontribusi sektor perindustrian	Kontribusi Lapangan Usaha Industri terhadap PDRB	26,83 %
		Kontribusi sektor perdagangan	Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan terhadap PDRB	20,35 %
		Persentase Koperasi sehat	Jumlah koperasi sehat dibagi jumlah koperasi dikali 100%	9,05 %
		Persentase UKM aktif	Jumlah UKM binaan dibagi jumlah seluruh UKM dikali 100%	36 %
		Pertumbuhan investasi daerah	Nilai investasi tahun berjalan dikurangi nilai investasi tahun sebelumnya dibagi nilai investasi tahun sebelumnya dikali 100%	20 %
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah penduduk Angkatan Kerja dibagi Jumlah penduduk usia kerja (15-64 Tahun) dikali 100%	75,53 %
5	Meningkatnya pemerataan infrastruktur wilayah	Persentase infrastruktur kondisi baik	Rata-rata dari variabel-variabel persentase infrastruktur kondisi baik	80,03 %
		Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	Luasan yang sesuai peruntukannya dibagi luas kabupaten temanggung dikali 100%	87,70 %
		Persentase kawasan kumuh perkotaan	Luasan kumuh perkotaan di bagi luasan permukiman perkotaan dikali 100%	19,25 %
		Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Angka kecelakaan lalu lintas tahun n dikurangi angka kecelakaan lalu lintas tahun (n-1) dibagi angka kecelakaan tahun (n-1) dikali 100%	1,22 %
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$(30\% \times IKU) + (30\% \times IKA) + (40\% \times IKTL)$	66,33 %
Tujuan 3: Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi				
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Tingkat Konsistensi Program Pembangunan	Jumlah program dalam RKPD dibagi Jumlah Program dalam RPJMD dikali 100	100 %
		Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyajian sesuai SAP Kepatuhan peraturan perundangan	WTP



			Tingkat materialitas temuan Sistem pengendalian internal	
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Akumulasi dari penilaian terhadap variabel indeks capaian kinerja	3,3
		Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	Jumlah kegiatan yang selesai tepat waktu dibagi jumlah kegiatan yang dilaksanakan dikali 100%	100 %
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai kumulatif dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian di Kabupaten Temanggung	62
		Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Penilaian maturitas SPIP atas unsur-unsur SPIP yang didukung oleh semua PD di Kabupaten Temanggung	3,045
		Indeks Persepsi anti Korupsi	Nilai IPAK diperoleh dengan mensurvey atas aspek-aspek yang ditentukan oleh Kementerian PAN dan RB	3,40
		Indeks Profesionalisme ASN	Indikator penilaian Indeks Profesionalisme ASN, dihitung dari angka kumulatif dimensi : kualifikasi pendidikan (bobot 25%), dimensi kompetensi (bobot 40%), dimensi kinerja (bobot 30%), dan dimensi disiplin (5%). Dihitung dengan formula rumus : $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP1 + IP2 + IP3 + IP4$	49
		Indeks Manajemen Kearsipan	Akumulasi dari hasil audit internal dan eksternal	61
		Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	Jumlah raperda yang diajukan dibagi jumlah perda yang ditetapkan dikali 100%	50 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Bobot Nilai dari 3 Domain Tingkat Kematangan : Domain Kebijakan Internal, Domain Tata Kelola, Domain Layanan.	2,50
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Bobot Nilai dari 4 Indikator : mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, pelayanan informasi publik dan	78,30



			pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi publik	
		Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggara Layanan Publik	Bobot dari 10 komponen indikator : standar pelayanan, maklumat layanan, SIPPP, sarpras fasilitas, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja, visi misi dan moto layanan, atribut, pelayanan terpadu	77
3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	Akumulasi nilai IDM seluruh desa dibagi jumlah desa	0,63
		Persentase desa yang berpredikat mandiri	Jumlah desa yang berpredikat mandiri dibagi jumlah desa dikali 100%	4,14 %
4	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Indeks rasa aman	Diukur dengan 4 indikator yakni kesadaran hukum, organisasi sipil, mitigasi risiko sosial dan penyelesaian sengketa secara beradab	0,63
5	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Cakupan Desa tangguh bencana	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dibagi Jumlah Desa/ Kelurahan rawan bencana dikali 100%	6,67 %

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2020.

E. INSTRUMEN PENDUKUNG PENGUKURAN KINERJA

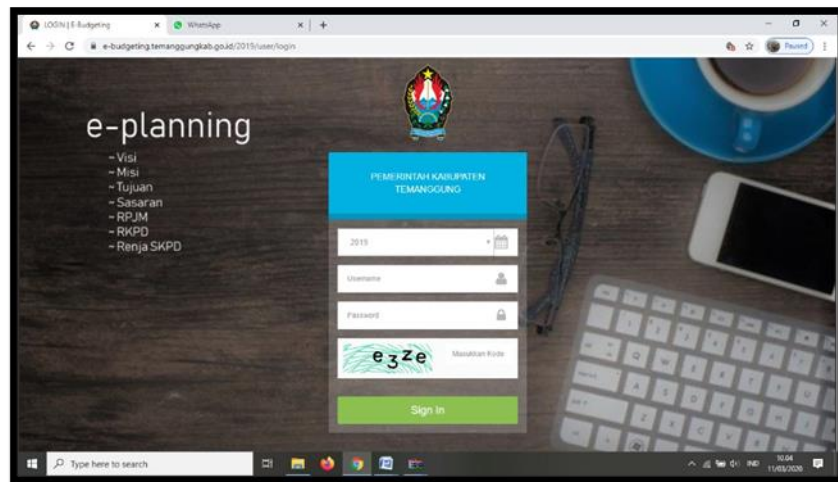
Dalam rangka peningkatan kinerja baik pada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan telah diterapkan beberapa inovasi sistem teknologi informasi yang saling terintegrasi antara lain:

Perencanaan

h. *e-planning* : Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Sistem ini digunakan untuk menyelaraskan antara perencanaan di level tertinggi sampai dengan level terendah, sehingga sasaran, indikator, program, dan kegiatan akan selaras. Dengan adanya sistem ini diharapkan tidak ada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan tanpa ada perencanaan





Gambar 2.2 e-planning

i. Planning Decision Support System (Planning DSS)

Merupakan sistem pendukung dalam pengambilan keputusan para verifikator Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan. Sistem ini menyajikan informasi tentang data aset, jumlah SDM dan informasi pengendalian kegiatan tiap perangkat daerah.

NO	Kode Barang	Jenis/Nama Barang	Harga Persewaan	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran CC	Bahan	Tahun Pembuatan	Nomor Polisi	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	Asal-usul	Jumlah	Harga (Rp)	Keterangan
1.	0203010501	Sepeda Motor	15.221.900		HONDA SuperAFX 12U21C87 MT	125 CC	besi	06-10-2014	2	MH1JEN115EK054413	JEN1E1054481	AA 9022 PE	06-10-2014	APED 8	1	15.221.900	Diperoleh tahun 2014 BAHAN PERENCANAAN PEMANGGUNGAN DAERAH
2.	0203010501	Sepeda Motor	15.221.900		Honda/Supra 125AF X12U21C87 MT	125 CC	besi	06/10/2014	-	MH1JEN115EK054261	JEN1E1054477	AA 9026 PE	-	APED 8	1	15.221.900	Persewaan 2014 BAHAN PERENCANAAN PEMANGGUNGAN DAERAH
3.	0203010501	Sepeda Motor	14.625.000		Yamaha/UE 11 (JARO-JARO)	113 CC	besi	12-08-2015	2	MH3JUE1110FJ001502	E3R0E0011312	AA 9028 PE		APED 1	1	14.625.000	Diperoleh Tahun 2015 BAHAN PERENCANAAN PEMANGGUNGAN DAERAH
4.	0203010501	Sepeda Motor	14.625.000		Yamaha/UE 11 (JARO-JARO)	113 CC	besi	12-08-2015	2	MH3JUE1110FJ001150	E3R0E0009266	AA 9028 PE		APED 1	1	14.625.000	Diperoleh Tahun 2015 BAHAN PERENCANAAN PEMANGGUNGAN DAERAH

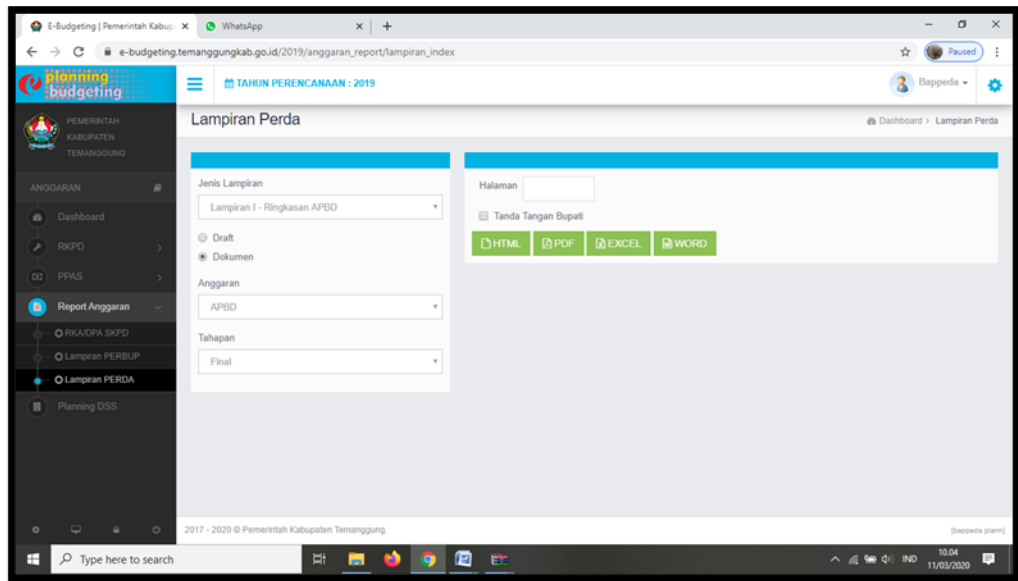
Gambar 2.3 Planning Decision Support System

j. Penganggaran

a. e-budgeting : Sistem Penganggaran Keuangan Daerah

Merupakan sistem informasi dalam penyusunan dokumen penganggaran yang terintegrasi dengan e-planning.

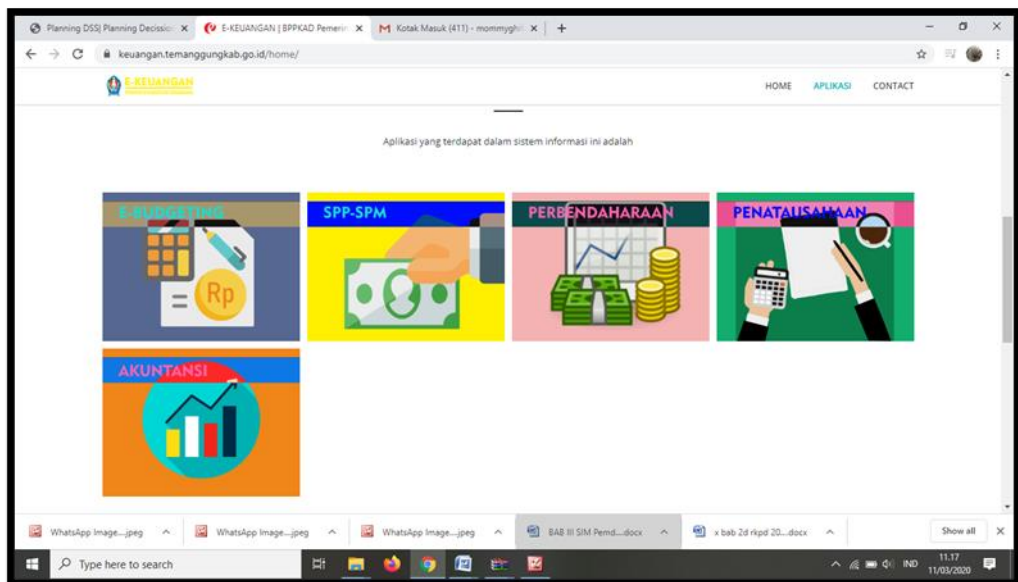




Gambar 2.4 e-budgeting

b. e-keuangan : Sistem Informasi Akuntansi Keuangan

Sistem ini membantu dalam pengelolaan keuangan daerah, pada masing-masing Perangkat Daerah dimulai dari penyusunan RKA, DPA, DPA sampai akuntansi dan pelaporan keuangan sehingga diketahui penyerapan anggaran setiap bulannya.



Gambar 2.5 e-keuangan

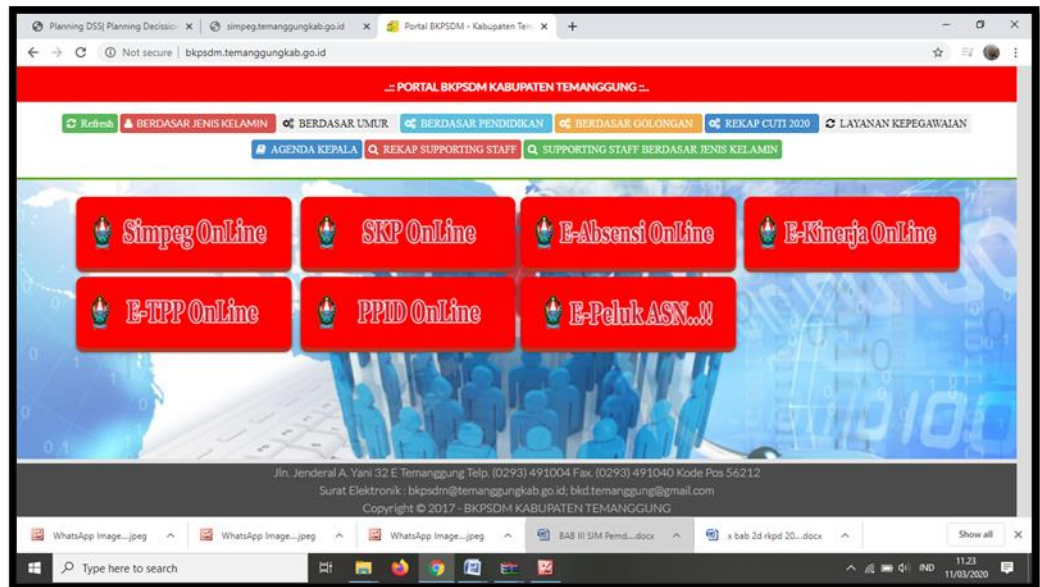
1. Pelaksanaan

a. Simpeg

Digunakan untuk mengukur dan mewujudkan profesionalitas ASN

Merupakan sistem informasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian.

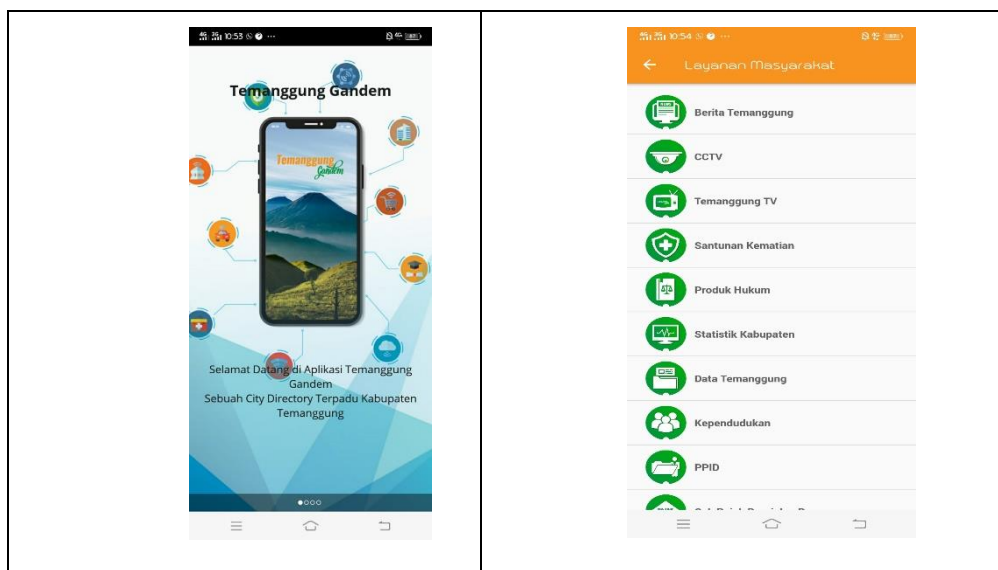




Gambar 2.5 Simpeg

b. Temanggung GANDEM

Merupakan aplikasi pelayanan terpadu resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung berbasis android yang merangkum pelayanan informasi publik, dan informasi potensi daerah.

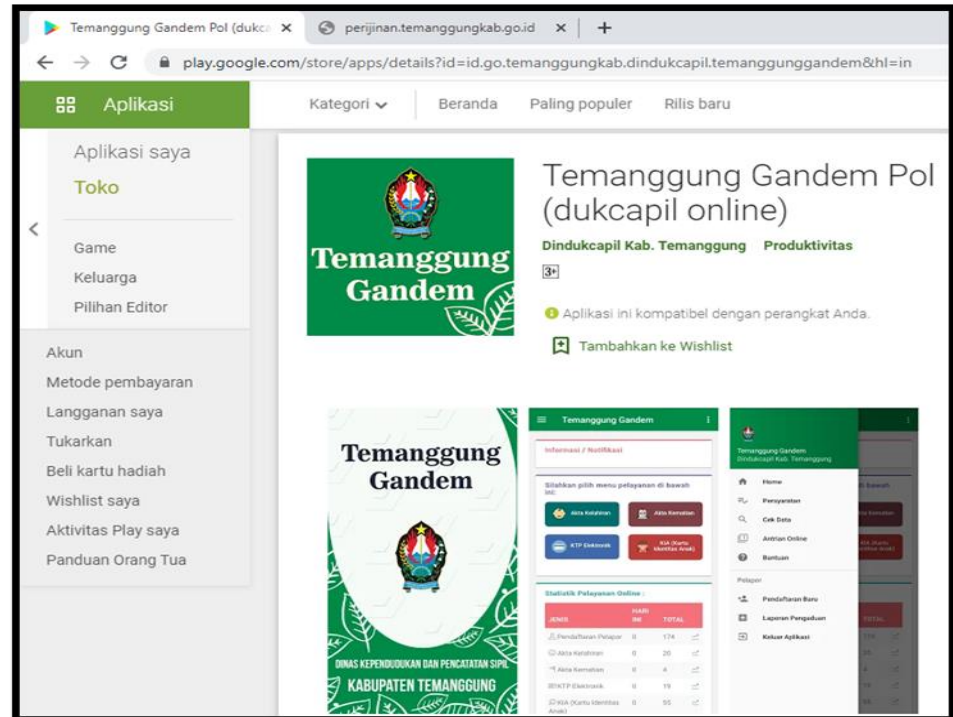


Gambar 2.5 Temanggung Gandem



c. Temanggung Gandem Pol

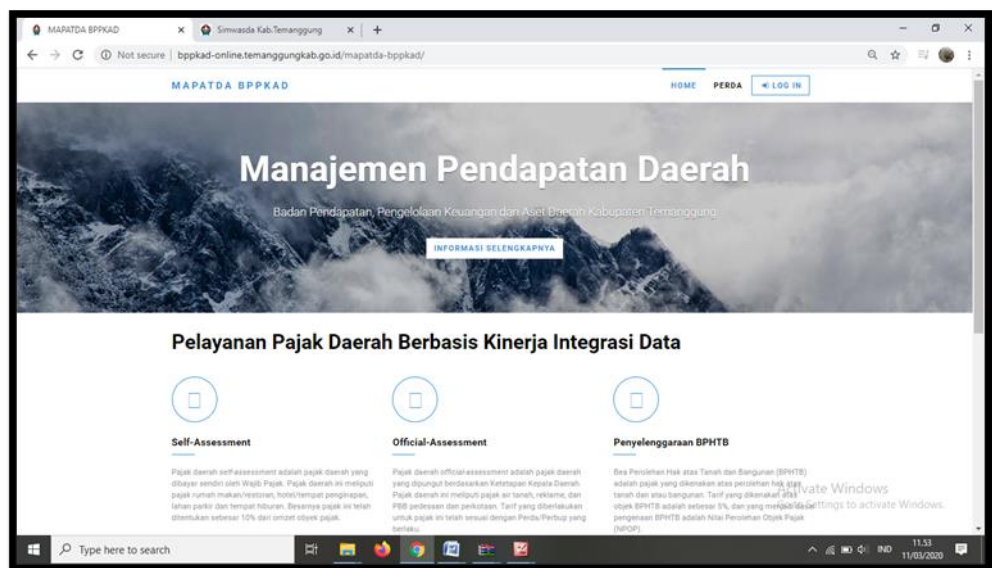
Merupakan aplikasi pelayanan kependudukan berbasis android.



Gambar 2.6 Temanggung Gandem Pol

d. Mapatda : Manajemen Pendapatan Daerah

Merupakan aplikasi pelayanan pajak daerah berbasis kinerja integrasi data.

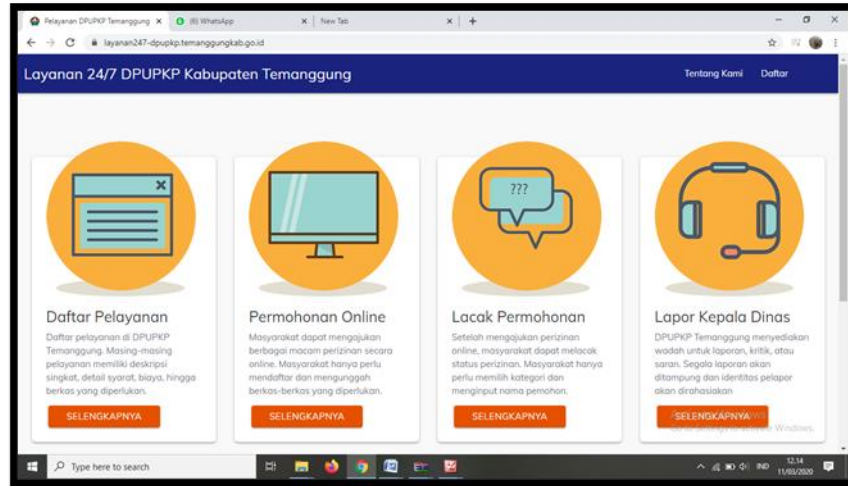


Gambar 2.7 Mapatda



e. Layanan 24/7 DPUPKP Kabupaten Temanggung

Merupakan aplikasi pelayanan dan perijinan online lingkup DPUPKP Kabupaten Temanggung.

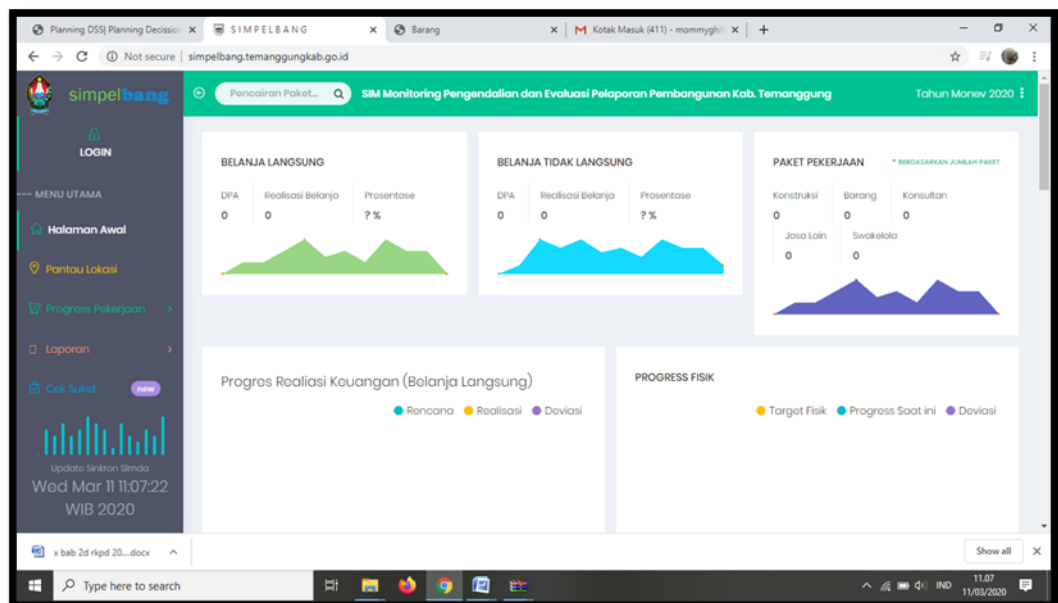


Gambar 2.8 Mapatda Layanan 24/7 DPUPKP Kabupaten Temanggung

2. Pengendalian

a. SIMPELBANG : Sistem informasi pengendalian pembangunan Daerah

Merupakan sistem informasi dalam mengendalikan kegiatan di tahun berjalan, terutama yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa.

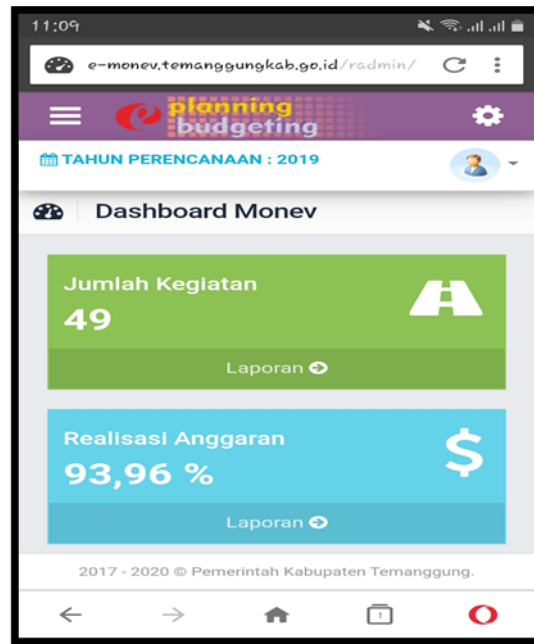


Gambar 2.9 Simpelbang



b. e-monev : Sistem informasi pengendalian pembangunan Daerah

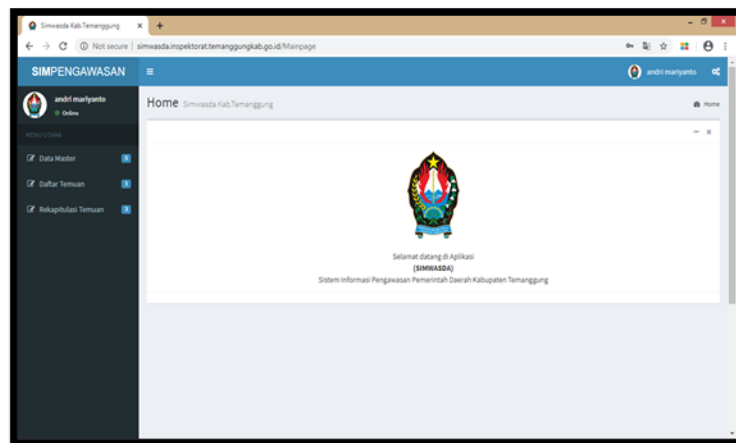
Merupakan sistem informasi yang menjadi alat bantu dalam kegiatan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan secara triwulanan baik output maupun outcome..



Gambar 2.10 e-monev

c. SIMWAS : Sistem Informasi Pengawasan

Merupakan sistem aplikasi berbasis web untuk pengelolaan data dan pelaporan hasil pengawasan, serta tindak lanjutnya. Aplikasi SIMWAS dipergunakan untuk menghasilkan informasi dan berbagai laporan secara cepat dan akurat, menghindari duplikasi pekerjaan, mengurangi risiko kemungkinan salah input data.



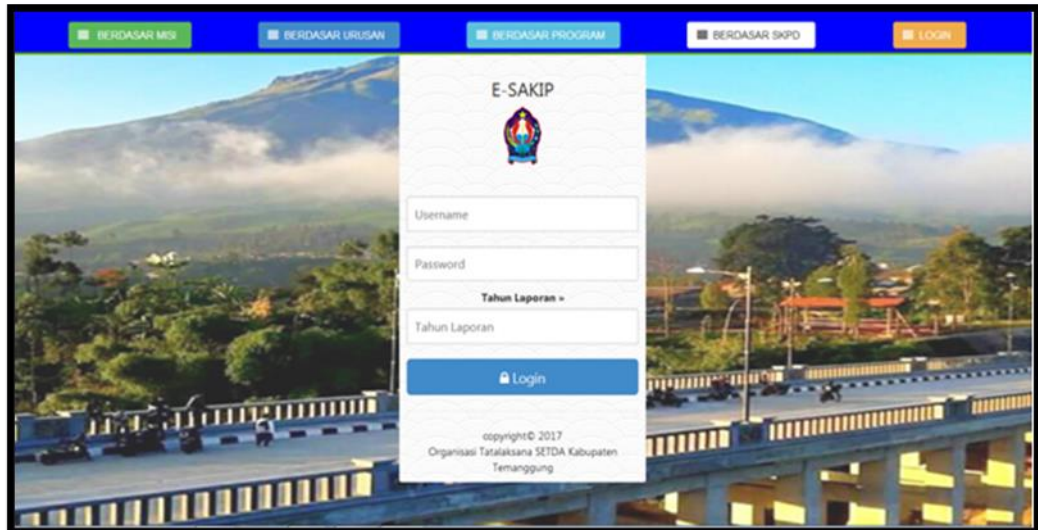
Gambar 2.11 SIMWAS



3. Pelaporan

a. e- SAKIP : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Melalui aplikasi ini pelaksanaan system akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar 2.11 e-SAKIP

F. INSTRUMEN PENDUKUNG PENGUKURAN KINERJA

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dalam rangka mewujudkan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) 2019 yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019. Sedangkan untuk perubahan anggaran di tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019.



Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp1.910.778.255.471,00, dengan adanya perubahan anggaran bertambah sejumlah Rp35.887.123.457,00 sehingga menjadi Rp1.946.665.378.928,00 dengan komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp1.168.792.735.222,00 dan belanja langsung sebesar Rp777.872.643.706,00 Adapun komposisi belanja langsung APBD Perubahan Tahun 2019 yang berasal dari program/kegiatan yang menunjang sasaran RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 1.24 Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2019

No	Sasaran RPJMD	Rencana Anggaran (Rp)
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	124.374.492.704,00
2	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	1.421.959.950,00
3	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	296.172.958.237,00
4	Meningkatnya budaya literasi masyarakat	1.887.890.700,00
5	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	2.494.756.800,00
6	Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	1.058.330.800,00
7	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	4.133.264.500,00
8	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	7.902.254.000,00
9	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	307.186.050,00
10	Meningkatnya kesejahteraan petani	22.848.651.875,00
11	Meningkatnya kedaulatan pangan	2.705.531.700,00
12	Meningkatnya pariwisata daerah	4.612.948.700,00
13	Meningkatnya investasi sektor riil	9.690.368.600,00
14	Meningkatnya pemerataan infrastruktur wilayah	125.114.726.230,00
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	10.441.554.525,00
16	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	108.150.083.137,00
17	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	8.490.309.360,00
19	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	2.300.599.000,00
20	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	2.883.790.800,00
21	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	7.046.319.850,00



Untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Temanggung mengalokasikan anggaran melalui beberapa program penunjang urusan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan antara lain:

Tabel 1.25 Rencana Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2019

No	Program	Rencana Anggaran (Rp)
1	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan	1.768.656.250,00
2	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	1.189.982.300,00
3	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	474.835.650,00
4	Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	446.770.250,00
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan	21.418.741.036,00
6	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan	5.418.955.512,00

Disamping program penunjang urusan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan, untuk mendukung kinerja Perangkat Daerah juga dialokasikan anggaran untuk Program Pendukung Urusan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.26 Rencana Anggaran Program Pendukung Urusan Perangkat Daerah Tahun 2019

No	Program	Rencana Anggaran (Rp)
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	37.932.911.766,00
2	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	22.632.539.705,00
3	Program peningkatan disiplin aparatur	1.185.949.800,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN 2019

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung Tahun 2019 ini disusun dalam rangka menyajikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung selama tahun 2019 sebagai pelaksanaan amanah RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. LKjIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung di masa mendatang. Sistem pengukuran kinerja yang disajikan dalam LKjIP dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator kegiatan sampai kepada sasaran sebagaimana tercantum dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 -2023).

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja pemerintah disajikan berdasarkan hasil pengukuran kinerja pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD. Yang selanjutnya diukur berdasarkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan



Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	100%	Memuaskan
2	85,00% < Capaian < 99,99%	Sangat Baik
3	70,00% < Capaian < 85,00 %	Baik
4	55,00% < Capaian < 70,00%	Cukup
5	Kurang dari 55 %	Kurang

Sumber: Permenpan 53 Tahun 2014

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.



Pemerintah Kabupaten Temanggung telah berusaha maksimal dengan mengerahkan seluruh sumberdaya yang dimiliki guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang terdiri dari 3 tujuan dan 8 indikator tujuan, serta 20 sasaran 52 indikator sasaran.

Ringkasan capaian kinerja tujuan dan capaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Temanggung sesuai dengan kategorinya masing-masing adalah sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No	Kategori	Jumlah Tujuan	Jumlah Indikator Tujuan	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja
1	Memuaskan (100)	0	1	9	34
2	Sangat Baik	3	7	11	14
3	Baik			0	1
4	Cukup			0	0
5	Kurang			0	3
	Jumlah	3	8	20	52

Dari tabel di atas dapat dilihat dari 3 tujuan dan 8 indikator tujuan, serta 20 sasaran 52 indikator sasaran, 3 tujuan memiliki kategori sangat baik, 1 Indikator tujuan memiliki kategori memuaskan, 7 indikator tujuan memiliki predikat sangat baik. Dilihat dari aspek Sasaran, 9 sasaran memiliki predikat memuaskan dan 11 sasaran memiliki predikat sangat baik. Dari 57 Indikator Sasaran, sebagian besar yaitu sebanyak 34 indikator sasaran berkategori Memuaskan, kemudian 14 indikator sasaran berkategori Sangat Baik, 1 indikator sasaran berkategori Baik, dan 3 indikator sasaran berkategori Kurang. Realisasi dan capaian kinerja tujuan dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tujuan

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2023
				T	R		T 2023	R 2019	
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Indek Pembangunan Manusia (IPM) (Sangat Baik)	-	68,69	69,22	68,83	99,44	70,49	68,83	97,65
	Angka Kemiskinan (Sangat Baik)	%	9,87	9,36	9,42	99,36	7,32	9,42	71,31
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,07	5,20	5,07	96,50	6,00	5,07	83,6
	Inflasi	%	2,89	4,0	2,66	100	4,0	2,66	100
	Pendapatan Perkapita	Jutaan rupiah	26,39	27,5	26,39	95,96	31,9	26,39	100
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,24	3,20	3,24	98,75	2,97	3,24	90,90
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks reformasi Birokrasi	Angka	60	62	60,15	97	70	60,15	85,92
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	83	84	81,36	96	89	81,36	91,41



Sedangkan realisasi dan capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019-2023 (%)
				T	R		T 2023	R 2019	
Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (ARLS) (sangat baik)	Tahun	7,05	7,20	6.94	96,39	7,80	6.94	88.97
	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) (sangat baik)	Tahun	12,14	12,21	12.08	98,94	12,49	12.08	96.72
Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (memuaskan)	Angka	n.a	0,63	0.67	100	0,67	0.67	100
Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH) (Memuaskan)	Tahun	75,43	75,45	75.47	100	75,53	75.47	99.92
	Angka Kematian Ibu (AKI) (Sangat Baik)	Angka maks	87,62	83,50	85.27	97.88	67,50	85.27	73.68
	Angka Kematian Bayi (AKB) (Memuaskan)	Per 1000 kelahiran	12,85	12,80	12.51	100	12,00	12.51	95.78
	Prevalensi balita gizi buruk (Memuaskan)	%	0,30	0,30	0.27	100	0,30	0.27	91.14
	Persentase rumah tangga yang memiliki jamban (Memuaskan)	%	77,92	79,84	89.14	100	83,84	89.14	100



Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019-2023 (%)
				T	R		T 2023	R 2019	
	Indeks kinerja RSUD (Sangat Baik)	Angka	79,00	79,20	73.45	92,74	80,00	73.45	91.81
Meningkatnya budaya literasi masyarakat	Persentase peminjam di perpustakaan (Memuaskan)	%	74,39	75,00	77.87	100	82,00	77.87	94.97
Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	Persentase pelestarian cagar budaya (Memuaskan)	%	5,16	6,10	6.10	100	10,79	6.10	56.53
	Persentase kelompok seni budaya yang aktif (Memuaskan)	%	38,60	44,33	46.56	100	47,67	46.56	97.67
Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	Indeks gotong royong (Memuaskan)	Angka	n.a	0,63	0.83	100	0,67	0.83	100
	Indeks toleransi (Memuaskan)	Angka	n.a	0,63	0.828	100	0,67	0.828	100
Meningkatnya penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase rumah tidak layak huni (RTLH) (sangat baik)	%	12,04	10,57	11.94	87,13	5,00	11.94	1.44
	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di panti sosial (Memuaskan)	%	1,18	1,22	1.31	100	1,22	1.31	100
Terkendalita laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk (LPP) (Sangat Baik)	%	0,85	0,84	0.88	95,24	0,81	90.91	



Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019-2023 (%)
				T	R		T 2023	R 2019	
Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembanguna Gender (IPG) (Memuaskan)	Angka	94,65	94,55	95.62	100	94,25	95.62	100
	Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Memuaskan)	%	0,016	0,015	0.009	100	0,012	0.009	100
Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai tukar petani (NTP) (Memuaskan)	Angka	102,17	102,6	102,60	100	103,4	102,60	99.03
Meningkatnya Kedaulatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Sangat Baik)	-	72,8	73,1	72	98	74,3	72	96.90
	Tingkat Konsumsi Ikan (Memuaskan)	Kg/kap/th	20,91	21,11	22.74	100	21,29	22.74	100
Meningkatnya pariwisata daerah	Pertumbuhan jumlah wisatawan (Baik)	%	15,41	17,00	12.30	72.35	20,00	12.30	58.57
	Lama tinggal wisatawan (Memuaskan)	hari	1	1	1	100	1	1	1
Meningkatnya investasi sektor riil	Kontribusi sektor perindustrian (Memuaskan)	%	26,83	26,83	26.83	100	26,83	26.83	100
	Kontribusi sektor perdagangan (Memuaskan)	%	20,35	20,35	20.35	100	20,35	20.35	100
	Persentase Koperasi Sehat (Sangat Baik)	%	7,45	9,05	8.71	96,24	11,2	8.71	72.52



Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019-2023 (%)
				T	R		T 2023	R 2019	
	Persentase UKM Aktif (Sangat Baik)	%	35	36	35.93	99.80	39	35.93	89.83
	Pertumbuhan Investasi daerah (kurang)	%	362	20	0	0	20	0	0
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Memuaskan)	%	74,39	75,53	75.53	100	75,62	75.53	99.84
Meningkatnya Pemerataan dan kualitas wilayah	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik (Memuaskan)	%	79,51	80,03	81.39	100	81,53	81.39	99.25
	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang (Memuaskan)	%	87,60	87,70	87.7	100	88,00	87.7	99.55
	Persentase kawasan kumuh perkotaan (Memuaskan)	%	19,50	19,25	11.21	100	18,50	11.21	100
	Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas (kurang)	%	2,37	1,22	0.30	24.59	1,59	0.30	18.88
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) (Memuaskan)	%	63,78	66,33	69.65	100	69,18	69.65	98.76
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Tingkat Konsistensi Program Pembangunan (sangat Baik)	%	100	100	97.60	97	100	97.60	97.60



Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019-2023 (%)
				T	R		T 2023	R 2019	
	Opini laporan keuangan pemerintah daerah (Memuaskan)		WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah (EKPPD) (Sangat Baik)	Angka	3,25	3,3	3.25	98	3,45	3.25	92.86
	Persentase kegiatan yang tepat waktu (Memuaskan)	%	100	100	100	100	100	100	100
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) (Memuaskan)		CC	B	B	100	BB	B	
	Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Sangat Baik)	Level	3,045	3,05	3.045	99.8	3,3	3.05	92.27
	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) (Sangat Baik)	Angka	3,34	3.40	3.34	98,23	3.80	3.34	87,89
	Indeks Profesionalisme ASN (Memuaskan)	Angka	46	49	51.7	100	61	51.7	100



Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019-2023 (%)
				T	R		T 2023	R 2019	
	Indeks Manajemen Kearsipan (Memuaskan)	Angka	n.a	61	62.80	100	69	62.80	100
	Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu (Memuaskan)	%	3,75	50	73.08	100	90	73.08	81.20
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Memuaskan)	Angka	2,04	2,50	2.82	100	3,50	2.82	80.57
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Memuaskan)	Angka	77,90	78,30	80.03	100	80	80.03	100
	Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Layanan Publik (Sangat Baik)	Angka	76	77	76	98,70	81	76	93.83
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Rata-Rata nilai indeks desa membangun (Memuaskan)	Angka	0,62	0,63	0,67	100	0,67	0,67	100
	Persentase desa yang berpredikat mandiri (kurang)	%	3,76	4,14	0	0	6,62	0	0
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Indeks rasa aman (Memuaskan)	Angka	n.a	0,63	4.23	100	0,67	4.23	100
Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Cakupan desa tangguh bencana (Memuaskan)	%	5,71	6,67	7.14	100	10,47	7.14	68.22



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan predikat sangat tinggi. Adapun analisis terhadap capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis pemerintah Kabupaten Temanggung sampai dengan Tahun 2019 akan disajikan pada sub bab berikutnya.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

a. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan

Tujuan 1

Tujuan 1 yaitu **“Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya”** dilaksanakan untuk mewujudkan misi 1 **“Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya”**. Tujuan 1 ini terdiri dari dua indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Angka Kemiskinan. Realisasi dan capaian kinerja tujuan 1 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Berkarakter dan Berdaya Tahun 2019

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019-2023
				T	R		T 2023	R 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	68,69	69,22	68,83	99,44	70,49	68,83	97,65
	Angka Kemiskinan	%	9,87	9,36	9,42	99,36	7,32	9,42	71,31
Rata-rata Capaian kinerja						99,40			84,48

Rata-rata Capaian tujuan Terwujudnya Masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya tahun 2019 sebesar 99,40%, bila dibandingkan dengan akhir tahun RPJMD 2018-2023 mencapai 84,48%. Tujuan ini didukung oleh dua indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan capaian 99,44% dan Angka Kemiskinan tercapai 99,36%.



a) Indikator Tujuan 1.1 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

➤ Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2019 terhadap target tahun 2019.

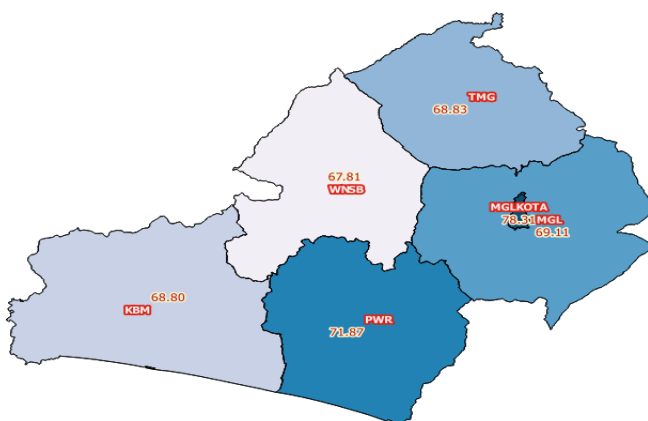
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi IPM Kabupaten Temanggung tahun 2019 sebesar 68,83 (merupakan kondisi terakhir data realisasi tahun 2018), sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 69,22 maka capaiannya adalah 99,44%.

Jika dibandingkan antar kabupaten/kota se Jawa Tengah, maka IPM Kabupaten Temanggung masih tetap berada pada peringkat ke-26 dari 35 Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, dan jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Tengah, IPM Kabupaten Temanggung masih di bawah IPM Provinsi sebesar 71,12%. Hal ini menjelaskan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah kemajuan pembangunan Jawa Tengah pada umumnya.

Sebaran tematik IPM menurut Kabupaten/kota se Eks Karesidenan Kedu dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.1

Peta tematik IPM menurut kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kedu Tahun 2018



Indek Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. IPM



menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2019 terhadap target RPJMD tahun 2023**

Realisasi kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2019 sebesar 68,83% (merupakan kondisi terakhir data realisasi tahun 2018) bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2023 sebesar 70,49% maka capaiannya adalah 97,65%. Hal ini menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Temanggung akan tercapai 100% di akhir periode RPJMD tahun 2023 dengan upaya keras.

➤ **Faktor Pendorong**

1. Angka harapan hidup yang semakin tinggi karena sarana dan prasarana kesehatan dan kesadaran masyarakat semakin meningkat;
2. Angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah yang semakin tinggi karena sarana dan prasarana kesehatan dan kesadaran masyarakat semakin meningkat; dan
3. Kemampuan daya beli masyarakat (pengeluaran riil perkapita) yang membaik karena sarana dan prasarana kesehatan dan kesadaran masyarakat semakin meningkat.

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Belum adanya keterpaduan dari semua unsur yang mempengaruhi AHH, AHLS, ARLS dan Pengeluaran Riil perkapita	Meningkatkan koordinasi semua perangkat daerah dan <i>stakeholder</i> dalam mengupayakan peningkatan AHH, AHLS, ARLS dan Pengeluaran Riil per kapita



b) Indikator 1.2 : Angka Kemiskinan

➤ Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2019 terhadap target tahun 2019.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator angka kemiskinan tahun 2019 sebesar 9,42%, sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 9,36% maka capaiannya adalah 99,36%. Bila dibandingkan tahun 2018 sebesar 9,87 %, angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung menurun 0,45% (menjadi lebih baik). Hal ini menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung belum maksimal dalam menurunkan dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

➤ Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2019 terhadap target RPJMD tahun 2023

Realisasi kinerja Angka Kemiskinan tahun 2019 sebesar 9,42 %, bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2023 sebesar 71,32 % maka capaiannya adalah 7,31%. Hal ini menunjukkan bahwa Angka Kemiskinan Kabupaten Temanggung akan tercapai 100% di akhir periode RPJMD tahun 2023 dengan upaya keras.

➤ Faktor Pendorong

1. Terlaksananya program penurunan kemiskinan selama 5 tahun kebelakang seperti program pelayanan kesehatan, program pengembangan sumberdaya kesehatan dan belanja bantuan sosial urusan kesehatan, belanja bantuan sosial urusan sosial, belanja bantuan sosial urusan lainnya, program pengembangan perumahan dan pemukiman.
2. Strategi mengurangi biaya konsumsi, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui program peningkatan ketahanan pangan, program peningkatan produktivitas tenaga kerja, program

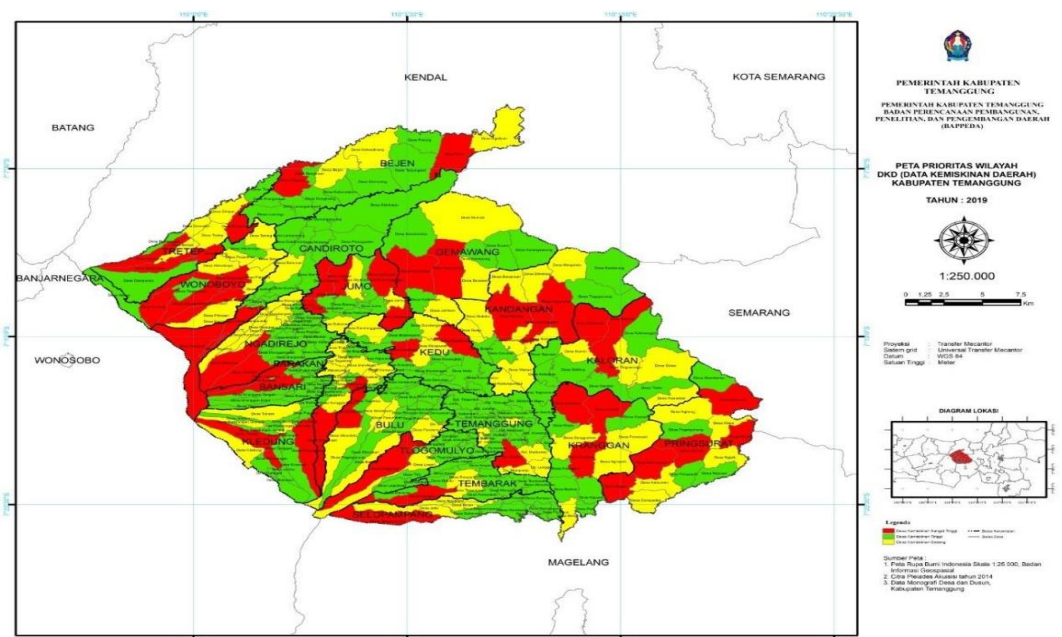


perluasan kesempatan kerja, program penanganan fakir miskin dan program pengembangan budidaya perikanan.

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	masih adanya gap antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan masyarakat yang berpenghasilan rendah.	mendorong peningkatan pendapatan dari sektor pertanian dan petani karena sebagian besar masyarakat Temanggung ada di sektor pertanian
2	Perubahan secara riil di lapangan status miskin belum tentu secara langsung diikuti oleh data kemiskinan secara nasional sehingga sasaran penerima manfaat masih ada yang belum tepat	Memperbaharui data kemiskinan secara berkala dengan melibatkan semua unsur sampai pada tingkat bawah dengan membentuk data kemiskinan daerah (DKD)

Gambar 3.2
Peta Prioritas Wilayah Intervensi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2019



Tujuan 2

Tujuan 2 yaitu **“Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan”** dilaksanakan untuk mewujudkan misi 2 **“Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan”**. Tujuan 2 ini terdiri dari empat indikator yaitu Indeks Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pendapatan Perkapita dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Realisasi dan capaian kinerja tujuan 1 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019 - 2023
				T	R		T 2023	R 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,07	5,20	5,07	96,50	6,00	5,07	83,6
	Inflasi	%	2,89	4,0	2,66	100	4,0	2,66	100
	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	26,39	27,5	26,39	95,96	31,9	26,39	82,73
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,24	3,20	3,24	98,75	2,97	3,24	90,90
Rata-rata Capaian kinerja						98,05			92,47

Capaian rata-rata kinerja Tujuan **“Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan”** tahun 2019 mencapai 98,05%. Bila dibandingkan dengan akhir periode RPJMD 2018-2023 mencapai 92,47%. Tujuan ini didukung oleh empat indikator tujuan yaitu Indeks Pertumbuhan Ekonomi (5,07), Inflasi (2,66), Pendapatan Perkapita (26,39 juta) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (3,24).



a) Indikator Tujuan 2.1 :Pertumbuhan Ekonomi

➤ Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2019 terhadap target tahun 2019.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Pertumbuhan Ekonomi tahun 2019 sebesar 5,07, sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 5,20 maka capaiannya adalah 96,50%. Bila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,87. Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Temanggung naik 0,2 (menjadi lebih baik).

Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,07 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,55 persen diikuti Jasa Perusahaan sebesar 10,25 persen dan Informasi dan Komunikasi sebesar 9,41 persen.

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 0,80 persen; diikuti Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,61 persen; Konstruksi sebesar 0,58 persen; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 0,49 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dari lapangan usaha lainnya sebesar 2,54 persen.

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 19,70 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 13,01 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,72; dan Konstruksi sebesar 10,75 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 56,18 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 mencapai 5,07 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen, yaitu PK-RT, PK-LNPRT,



Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P), dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Sementara komponen lainnya yaitu Ekspor Barang dan Jasa, dan Impor Barang dan Jasa mengalami kontraksi. Komponen PK-LNPRT merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 10,62 persen; diikuti Komponen PK-RT sebesar 5,04 persen; dan Komponen PMTB sebesar 4,45 persen.

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Komponen PK-RT sebesar 2,73 persen; diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 1,47 persen. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dari komponen lainnya sebesar 0,82 persen.

Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2019 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia yaitu sebesar 56,62 persen; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 32,33 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 18,41 persen; Komponen PK-P sebesar 8,75 persen; Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,43 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 1,30 persen. Sementara Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDB memiliki peran sebesar 18,90 persen.

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2019 terhadap target RPJMD tahun 2023**

Realisasi kinerja Pertumbuhan Ekonomi tahun 2019 sebesar 5,07%, bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2023 sebesar 6,00 % maka capaiannya adalah 83,6%. Hal ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi akan tercapai 100% di akhir periode RPJMD tahun 2018-2023 dengan upaya keras.



Perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp15.833,9 triliun dan PDB Perkapita mencapai Rp59,1 Juta atau US\$4 174,9. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02 %, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2018 sebesar 4,48 %. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,55 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 10,62 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2019 dibanding triwulan IV-2018 tumbuh 4,97 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,78 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,97 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2019 dibanding triwulan III-2019 mengalami kontraksi sebesar 1,74 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami penurunan 20,52 persen. Dari sisi pengeluaran, disebabkan oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mengalami kontraksi sebesar 2,55 persen.

Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 59,00 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32 persen, dan Pulau Kalimantan 8,05 persen.



➤ **Faktor Pendorong**

1. Perumusan kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang tepat dalam mendorong pertumbuhan 17 lapangan usaha PDRB yang juga berimbas ke daerah, didukung oleh kemudahan perijinan di daerah;
2. Iklim usaha yang kondusif dan berkembangnya sektor riil dunia usaha.

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Harga produk pertanian fluktuatif	Peningkatan pengolahan pasca panen produk pertanian

b) Indikator Tujuan 2.2 :Inflasi

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2019 terhadap target tahun 2019.**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Inflasi tahun 2019 sebesar 2,66%, sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 4,0% maka capaiannya adalah 100%.

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2019 terhadap target RPJMD tahun 2023**

Realisasi kinerja inflasi tahun 2019 sebesar 2,66%, bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2023 sebesar 4,0% maka capaiannya adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi Kabupaten Temanggung akan tercapai 100% di akhir periode RPJMD tahun 2023

➤ **Faktor Pendorong**

1. Stabilitas sosial politik dan keamanan.
2. Stabilitasnya nilai tukar rupiah.
3. Stabilitasnya harga BBM.
4. Tercukupinya pasokan kebutuhan barang/jasa atas permintaan pasar



c) Indikator 2.3 : Pendapatan Perkapita

➤ Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2019 terhadap target tahun 2019.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan perkapita Kabupaten Temanggung tahun 2019 sebesar 26,39 (merupakan kondisi terakhir data realisasi tahun 2018), sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 27,5 maka capaiannya adalah 9,96%.

Secara konsepsional PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Semakin besar PDRB Perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut.

➤ Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2019 terhadap target RPJMD tahun 2023

Capaian Kinerja Sasaran tahun 2019 tercapai 26,39 dibandingkan target Pendapatan Perkapita tahun 2019 sebesar 31,9, sehingga capaian Kinerja tujuan di banding target akhir RPJMD telah tercapai 82,75% dengan kategori baik, sehingga perlu upaya keras untuk mencapai target akhir RPJMD.

➤ Faktor Pendorong

1. Perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat dalam mendorong pertumbuhan 17 lapangan usaha PDRB.
2. Iklim usaha yang kondusif dan berkembangnya sektor riil dunia usaha.
3. Pertumbuhan penduduk rendah

➤ Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	UMK yang rendah	Upaya untuk meningkatkan UMK tanpa memberatkan pengusaha



d) Indikator 2.4 : Tingkat Pengangguran Terbuka

➤ Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2019 terhadap target tahun 2019.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2019 sebesar 3,24, sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 3,2 maka capaiannya adalah 98,75 % (merupakan kondisi terakhir data realisasi tahun 2018).

TPT adalah persentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah angkatan kerja, digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT menunjukkan persentase orang yang mencari kerja terhadap penduduk angkatan kerja. Tingginya TPT merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja.

Banyaknya penduduk yang bekerja di Kabupaten Temanggung menurut lapangan usaha dapat memberikan informasi awal tentang potensi ekonomi penduduk Temanggung. Semakin banyak orang yang bekerja di suatu sektor, maka semakin tinggi pula potensi ekonomi sektor tersebut. Hingga tahun 2017, sebagian besar penduduk yang bekerja di Kabupaten Temanggung bekerja pada sektor primer yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan sebesar 47,93%. Tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian tersebut terkait erat dengan tingginya potensi agraris yang sangat tinggi di Kabupaten Temanggung. Selain itu, sektor pertanian relatif lebih akomodatif, karena tidak membutuhkan SDM tingkat pendidikan yang lebih tinggi, keahlian khusus serta kemampuan modal untuk usaha yang rendah. Oleh karenanya tidak mudah bagi tenaga kerja di sektor pertanian untuk berpindah ke sektor lainnya



➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2019 terhadap target RPJMD tahun 2023**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2019 sebesar 3,24 sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 2,97 maka capaiannya adalah 97 % (merupakan kondisi terakhir data realisasi tahun 2018).

➤ **Faktor Pendorong**

1. Ketersediaan lapangan kerja dapat memenuhi jumlah pencari kerja.
2. Hubungan dan kerjasama yang harmonis antara pemerintah, perusahaan swasta dan serikat pekerja.

➤ **Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Pertumbuhan jumlah pencari kerja yang tinggi	Membekali pencari kerja dengan diklat kompetensi
2	Jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan lapangan kerja dari tingkat pendidikan	Mendorong tumbuhnya lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan mempermudah proses perijinan

Tujuan 3

Tujuan 3 yaitu **“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.”** dilaksanakan untuk mewujudkan misi 3 **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”**. Tujuan 3 ini terdiri dari dua indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Realisasi dan capaian kinerja tujuan 3 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.7 Capaian Kinerja Tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019 - 2023
				T	R		T 2023	R 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Reformasi Birokrasi	%	60	62	62,76	100	70	62,76	89,65
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	83	84	81,36	96	89	81,36	91,41
Rata-rata Capaian kinerja						98			88,66

Capaian rata-rata kinerja Tujuan **“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”** tahun 2019 mencapai 98%. Bila dibandingkan dengan akhir periode RPJMD 2018-2023 mencapai 88,66%. Tujuan ini didukung oleh dua indikator tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (100%) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (96%).

a) Indikator Tujuan 3.1 :Indeks Reformasi Birokrasi

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2019 terhadap target tahun 2019.**

Realisasi kinerja Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2019 sebesar 62,76 %, bila dibandingkan dengan target sebesar 62 maka capaiannya adalah 100%.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas



Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Model Penilaian yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah.

Rumus penghitungan dari indek reformasi birokrasi adalah penggabungan penilaian dari total proses 60 % (indikator 8 area perubahan) dan total hasil 40 % (kapasitas akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih bebas KKN, dan kualitas pelayanan publik).

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2019 terhadap target RPJMD tahun 2023**

Realisasi kinerja Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2019 sebesar 62,76 %, bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2023 sebesar 70 % maka capaiannya adalah 89,65 % dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung akan tercapai 100% di akhir periode RPJMD tahun 2023 karena target tahunan tercapai

➤ **Faktor Pendorong**

Faktor Pendorong dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

- i. Pengembangan sistem pemerintahan elektronik yang sudah terintegrasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
- j. Penataan Struktur Organisasi Pemerintah sesuai dengan hasil Pemetaan;



➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Pergerakan tim reformasi birokrasi internal, serta komunikasi tentang Reformasi belum optimal di tingkat Pemda dan OPD	Dilakukan koordinasi yang intensif dan melakukan monitoring dan evaluasi
2	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) belum dilakukan secara optimal untuk menilai perkembangan reformasi birokrasi di Kabupaten Temanggung.	Dilakukan sosialisasi yang massif ke semua perangkat daerah dan peningkatan jumlah OPD sebagai lokasi penilaian
3	Internalisasi budaya kerja dan perubahan mindset belum berjalan dengan baik.	meningkatkan budaya kerja dan perubahan mindset di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dan melakukan inovasi terus menerus secara berkesinambungan dalam pelayanan kepada masyarakat
4	Pengendalian SPIP di tiap perangkat daerah belum optimal	Meningkatkan kualitas implelementasi pengendalian gratifikasi,



No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
		penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya,
	Masih adanya Unit Pelayanan Publik yang belum melaksanakan survey IKM dan menindaklanjuti rekomendasi hasil survey	Menindaklanjuti hasil survey Indeks Kepuasan Pelayanan dan menyempurnakan kualitas pelaksanaan kegiatan pada area pelayanan publik dan pengawasan
	Pembangunan Zona Integritas belum secara keseluruhan pada semua perangkat daerah dan unit kerja	Melaksanakan pembangunan zona integritas secara intensif terhadap unit kerja di Perangkat daerah sehingga dapat ditetapkan menjadi unit kerja menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),

b) Indikator 3.2 :Indeks Kepuasan Masyarakat

➤ Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2019 terhadap target tahun 2019.

Realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019 sebesar 81.36 bila dibandingkan dengan target 2019 sebesar 84 maka capaiannya adalah 96,00%. Pada tahun



2019, kabupaten Temanggung telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri terhadap pelaksanaan Pelayanan Publik dengan nilai IKM 3.28 (81.36) dikategorikan bahwa pelayanan publik di kabupaten Temanggung dikategorikan baik. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa masyarakat telah puas dengan pelayanan yang ada di Kabupaten Temanggung.

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2019 terhadap target RPJMD tahun 2023**

Realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019 sebesar 81.36 bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2023 sebesar 89 maka capaiannya adalah 91,41%. Kabupaten Temanggung secara optimis dapat mencapai nilai tersebut di akhir tahun 2023 dengan upaya perbaikan pelayanan sesuai hasil rekomendasi.

➤ **Faktor Pendorong**

Faktor pendorong dalam pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Temanggung adalah :

1. Hampir 81 % unit pelayanan publik di lingkungan pemerintah kabupaten melaksanakan survey indeks kepuasan masyarakat;
2. Unit pelayanan telah melaksanakan perbaikan pelayanan sesuai dengan rekomendasi hasil Indeks Kepuasan Masyarakat tahun sebelumnya.

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Masih ada unit pelayanan yang tidak melaksanakan survey indeks Kepuasan masyarakat dan dari 66 UPP yang menyusun laporan hanya 54 UPP	Membuat surat teguran pada Unit Pelayanan Publik yang tidak melaksanakan survey IKM



b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran

b.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Misi 1

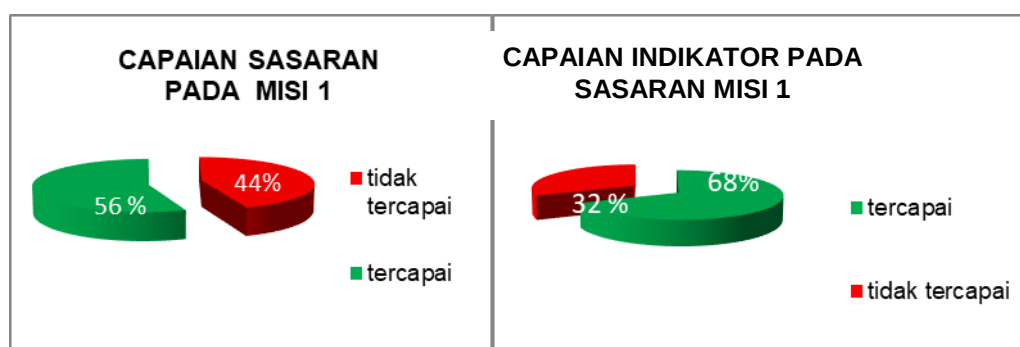
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya

Pada Misi 1 **Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya** didukung oleh 9 (sembilan) sasaran yaitu :

1. Terpenuhiya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan;
2. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga;
3. Terpenuhiya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan;
4. Meningkatnya budaya literasi masyarakat;
5. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
6. Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan;
7. Meningkatnya penanganan, pemberdayaan, perlindungan dan jaminan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
8. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk; dan
9. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Pencapaian sasaran dan indikator pada misi Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8 Pencapaian Misi



Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 9 sasaran yang terdapat pada misi I, 56% (5 sasaran) dapat terealisasi sesuai dengan



target yang ditetapkan. Sedangkan 44% (4 sasaran) belum sesuai dengan target yang ditetapkan.

Untuk indikator pada misi I ini terdapat 9 indikator kinerja dimana 68% (13 indikator) telah mencapai 100%, sedangkan 32% (6 indikator) telah dilaksanakan, tetapi belum dapat terealisasi sesuai dengan target. Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang ada pada misi I adalah sebagai berikut:

1) Sasaran strategis 1 : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Pendidikan

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada dua indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

SASARAN STRATEGIS : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Pendidikan								
Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja tahun 2019-2023
			T	R		Target akhir 2023	Realisasi 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	Tahun	6,94	7,20	6,94	96,39	7,80	6,94	88,97
2. Angka harapan Lama Sekolah (AHLS)	Tahun	12,08	12,21	12,08	98,94	12,49	12,08	96,72
Rata-rata capaian kinerja					97,66			92,85

Rata-rata capaian sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Pendidikan di Kabupaten Temanggung tahun 2019 sebesar 97,66%. Sasaran ini didukung oleh dua indikator yaitu Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) dengan capaian 96,39% dan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dengan capaian 98,94%.



a) Indikator Sasaran 1.1 : Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 terhadap target tahun 2019**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi ARLS tahun 2019 sebesar 6,94 tahun (merupakan kondisi terakhir data realisasi tahun 2018), bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 7,20 maka capaiannya adalah 96,39%.

ARLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal dengan sasaran yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun keatas.

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 terhadap target RPJMD tahun 2023**

Bila dibandingkan dengan akhir tahun RPJMD tahun 2023 dengan target akhir 7,80% dan realisasi tahun 2019 sebesar 6,94 tahun diperoleh capaian kinerja indikator ini sebesar 88,97%. Hal ini menunjukkan bahwa sampai dengan akhir tahun RPJMD tahun 2023 akan tercapai 100% dengan upaya keras.

➤ **Faktor Pendorong**

Faktor pendorong angka harapan lama sekolah adalah:

1. Adanya beasiswa dari pemerintah kabupaten bagi pelajar keluarga miskin.
2. Adanya pembelajaran nonformal seperti kejar paket sebagai alternatif pendidikan.
3. Adanya keyakinan masyarakat bahwa lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki status sosial ekonomi, kesehatan dan prospek meraih peluang kerja.



➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	masih adanya siswa putus sekolah	- Adanya program beasiswa/ bantuan sekolah bagi pelajar keluarga miskin - Adanya pembelajaran nonformal seperti kejar paket
2	masih terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah	
3	masih terdapat lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs	

b) Indikator Sasaran 1.2 : Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 terhadap target tahun 2019**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) tahun 2019 sebesar 12.08, sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 12.21 maka capaiannya adalah 98,94 % (merupakan kondisi terakhir data realisasi tahun 2018).

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan sasaran perhitungannya adalah penduduk usia 7 tahun ke atas.

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 terhadap target RPJMD tahun 2023**

Realisasi kinerja Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) tahun 2019 sebesar 12,8 bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2023 sebesar 12,49 maka capaiannya adalah 96,72%. Hal ini menunjukkan bahwa Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kabupaten Temanggung akan tercapai 100% di akhir periode RPJMD tahun 2023 dengan upaya keras.



➤ **Faktor Pendorong**

1. Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, pendidikan menengah dan universal.
2. Adanya beasiswa dari pemerintah kabupaten bagi pelajar keluarga miskin.
3. Adanya pembelajaran nonformal seperti kejar paket sebagai alternatif pendidikan.
4. Adanya keyakinan masyarakat bahwa lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki status sosial ekonomi, kesehatan dan prospek meraih peluang kerja

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	masih adanya siswa putus sekolah	- Adanya program beasiswa/ bantuan sekolah bagi pelajar keluarga miskin - Adanya pembelajaran nonformal seperti kejar paket
2	masih terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah	
3	masih terdapat lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs	

2) Sasaran strategis 2 : Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olah Raga

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada satu indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olah Raga								
Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja tahun 2019 – 2023 (%)
			T	R		Target akhir 2023	Realisasi 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	n.a	0,63	0,67	100	0,67	0,67	100
Rata-rata capaian kinerja					100			100



Capaian sasaran meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga di Kabupaten Temanggung tahun 2019 sebesar 100% yang didukung oleh indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 terhadap target tahun 2019**

Indeks Pembangunan Pemuda adalah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tahun 2019 sebesar 0,67, sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 0,63% maka capaiannya adalah 100 %.

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 terhadap target RPJMD tahun 2023**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Indeks Pembangunan Pemuda tahun 2019 sebesar 0,67, sehingga bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2023 yaitu 0,67,% maka capaiannya adalah 100%.

➤ **Faktor Pendorong**

1. Tingkat pendidikan yang semakin tinggi;
2. Tingkat Kesehatan dan kesejahteraan yang tinggi
3. Ketersediaan lapangan dan kesempatan kerja;
4. Partisipasi dan kepemimpinan;
5. Gender dan diskriminasi.

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Rendahnya angka rata-rata lama sekolah	meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan
2	Masih adanya perkawinan usia dini	Sosialisasi tentang bahaya menikah usia dini
3	Masih banyak pemuda yang merokok	Sosialisasi tentang bahaya merokok



3) Strategis 3 : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Kesehatan

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 6 (enam) indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

SASARAN STRATEGIS : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Kesehatan								
Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja tahun 2019-2023 (%)
			T	R		Target akhir 2023	Realisasi 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,47	75,45	75,47	100	75,53	75,47	99,92
2. Angka Kematian Ibu (AKI)	Maks Per 100.000 KH	87,62	83,50	85,27	97,88	67,50	85,27	73,68
3. Angka Kematian Bayi (AKB)	Maks Per 1.000 KH	12,85	12,80	12,51	100	12	12,51	95,78
4. Prevalensi balita gizi buruk	% maksimal	0,3	0,3	0,27	100	0,3	0,27	100
5. Persentase rumah tangga memiliki jamban	%	77,92	79,84	89,14	100	83,84	89,14	100
6. Indeks Kinerja RSUD	%	79,00	79,20	73,45	92,74	80,00	73,45	91,81
Rata-rata capaian kinerja					98,44			93,53

Rata-rata capaian kinerja sasaran Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan tahun 2019 telah tercapai sebesar 98,44 %, bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2023 adalah sebesar 93,53%. Sasaran ini terdiri dari 6 (enam) indikator yaitu : 1) Angka Harapan Hidup (AHH), 2) Angka Kematian Ibu (AKI), 3) Angka kematian Bayi (AKB), 4) Prevalensi balita gizi buruk, 5) Persentase rumah tangga memiliki jamban, dan 6) Indeks kinerja RSUD.



a) Indikator 3.1 : Angka Harapan Hidup (AHH)

➤ Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 terhadap target tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2019 sebesar 75,47, sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 75,45 maka capaiannya adalah 100%. Bila dibandingkan tahun 2018 sebesar 75,43, Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Temanggung naik 0,04%.

➤ Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 terhadap target RPJMD Tahun 2023

Realisasi kinerja Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2019 sebesar 75,47 tahun, bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2023 sebesar 75,53 tahun maka capaiannya adalah 99,92%. Hal ini menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Temanggung akan tercapai 100% di akhir periode RPJMD tahun 2023 dengan upaya keras.

➤ Faktor Pendorong

1. keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi di Kabupaten Temanggung.
2. Terjaminnya aspek kesehatan.
3. Lingkungan yang bersih.
4. Sosial kemasyarakatan yang aman dan terjamin.

➤ Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Pola hidup yang tidak sehat	Sosialisasi PHBS
2	Pencemaran lingkungan	Sosialisasi tentang pengelolaan sampah, pembentukan bank sampah dan gerakan peduli sungai



b) Indikator 3.2 : Angka Kematian Ibu (AKI)

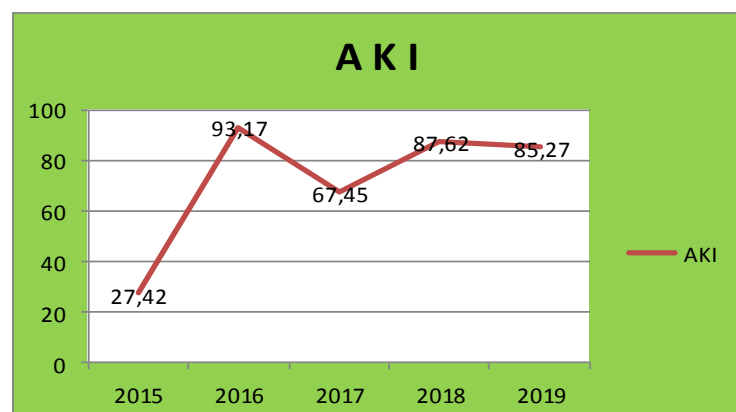
➤ Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 terhadap target tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2019 sebesar 85,27/100.000, sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 83,5 maka capaiannya adalah 97,88% (merupakan kondisi terakhir data realisasi tahun 2018).

Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Temanggung Tahun 2019 sebesar 85,27/100.000 Kelahiran Hidup (9 kematian) jauh lebih baik dari tahun 2018 yaitu 87,62/100.000 Kelahiran Hidup, Bila dibandingkan dengan target AKI Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 yaitu sebesar 87/100.000 kelahiran hidup, AKI Kabupaten Temanggung masih lebih baik, dan bila dibandingkan dengan target AKI Nasional yaitu sebesar 306/100.000 kelahiran hidup, AKI Kabupaten Temanggung jauh di atas target nasional atau dengan kata lain sangat baik. Tetapi bila dibandingkan dengan Kabupaten Magelang, AKI Kabupaten Temanggung masih di bawah capaian Kabupaten Magelang yaitu sebesar 46, 66/100.000 Kelahiran Hidup.

Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Temanggung dapat dilihat trend per tahun mengalami fluktuatif, dengan tetap memberikan perhatian yang lebih dan menjadi prioritas utama masalah kesehatan di Jawa Tengah.

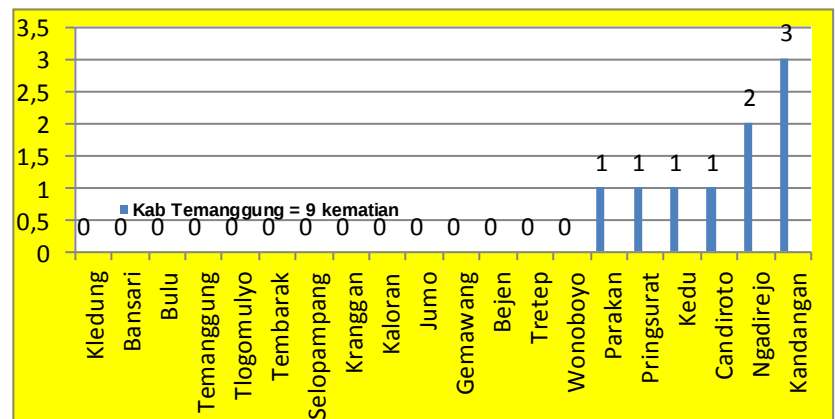
Grafik 3.1
Trend Angka Kematian Ibu (AKI)
di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2019



Grafik 3.2
Jumlah kematian Ibu per Kecamatan di Kabupaten
Temanggung Tahun 2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2019

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan target RPJMD Tahun 2023**

Realisasi kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2019 sebesar 85,27 bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2023 sebesar 67,5 maka capaiannya adalah 73,68%. Bila dibandingkan dengan terget akhir tahun RPJMD Tahun 2023 sbesar 67,5/100.000 KH, maka indikator AKI akan tercapai 100% dengan upaya keras.

➤ **Faktor Pendorong**

1. dengan diterapkannya strategi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu 5 Ng yaitu Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng semua ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil (100%) sangat membantu capaian target Pemerintah Kabupaten Temanggung.
2. semua ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan persalinan (100%).
3. adanya berbagai upaya dilakukan untuk mencegah kematian ibu bersama lintas sektor dan lintas program.



➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	masih banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama melahirkan	Mengimbau masyarakat agar mendukung ibu hamil untuk memeriksakan diri sejak dini dan secara rutin
2	abortus (termasuk abortus mola) dan dalam masa nifas	Peringatan pemahaman lewat cara keagamaan
3	Simpul penyebab 9 kematian ibu di Kabupaten Temanggung tahun 2019 adalah penyebab lain-lain (Meningitis, Syok sepsis, oedem pulmo, Syok Hipovolemia, suspect PPCM, Hipertensi).	Penanganan dini terhadap kasus ibu hamil yang mengalami Meningitis, Syok sepsis, oedem pulmo, Syok Hipovolemia, suspect PPCM, Hipertensi

c) Indikator 3.3 : Angka Kematian Bayi (AKB)

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 terhadap target tahun 2019**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2019 sebesar 12,51 sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 12,8 maka capaiannya adalah 100%. Bila dibandingkan tahun 2018 sebesar 12,85 , Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Temanggung menurun 2,35% (menjadi lebih baik).

Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Temanggung per 1.000 Kelahiran hidup tahun 2019 sebesar 12,51 (dengan 132 kematian). Mengalami penurunan (lebih baik) bila dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 12,85/1.000



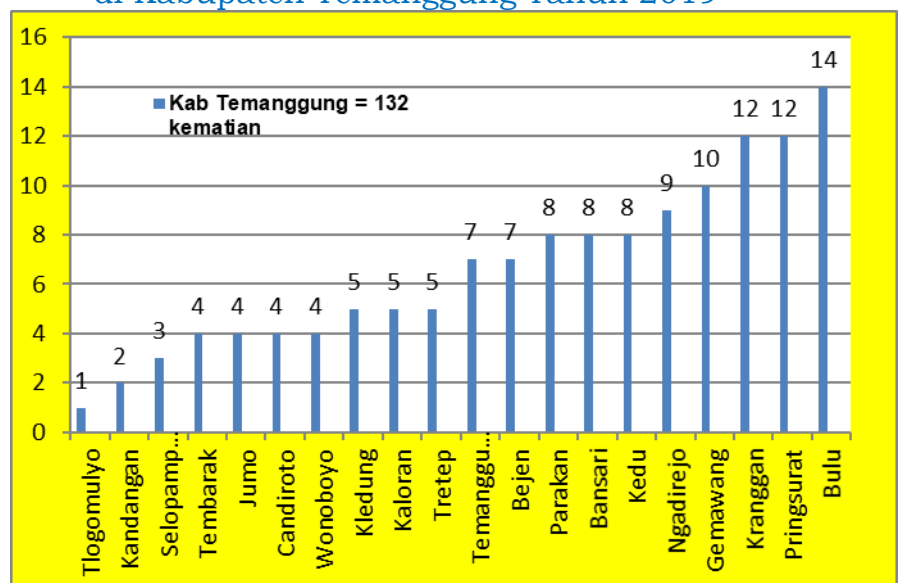
kelahiran hidup, dan lebih baik dari target Tahun 2019 sebesar 12,80/1.000 kelahiran hidup dengan capaian 100%, juga lebih baik dari target nasional sebesar 24/1.000 kelahiran hidup. Trend AKB di Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.3
Trend Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Temanggung Tahun 2015 - 2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2019

Grafik 3.4
Jumlah Kematian bayi per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2019



➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja sasaran Tahun 2019 dengan target RPJMD Tahun 2023**

Realisasi kinerja Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2019 sebesar 12,51 , bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2023 sebesar 12 maka capaiannya adalah 95,78%.

Realisasi kinerja AKB Tahun 2019 bila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD Tahun 2023 sebesar 12/1.000KH akan tercapai 100% dengan upaya keras.

➤ **Faktor Pendorong**

1. dukungan penguatan pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan baik dari Sumber Daya Manusia (SDM),
2. sarana prasarana maupun sistem rujukan untuk pertolongan persalinan dan kesehatan bayi,
3. meningkatnya pengetahuan ibu, keluarga dan masyarakat dalam kesehatan ibu dan bayi,
4. komitmen pemerintah daerah untuk pelayanan kesehatan ibu dan bayi dan semakin meningkatnya implementasi gerakan sayang ibu dan bayi.

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Kematian bayi disebabkan oleh BBLR, Asfiksia, kelainan bawaan dan penyebab lain (aspirasi, Ispa, diare dll).	pola perbaikan nutrisi pada ibu hamil, peningkatan kualitas pelayanan persalinan dan peningkatan kualitas pelayanan bayi baru lahir.

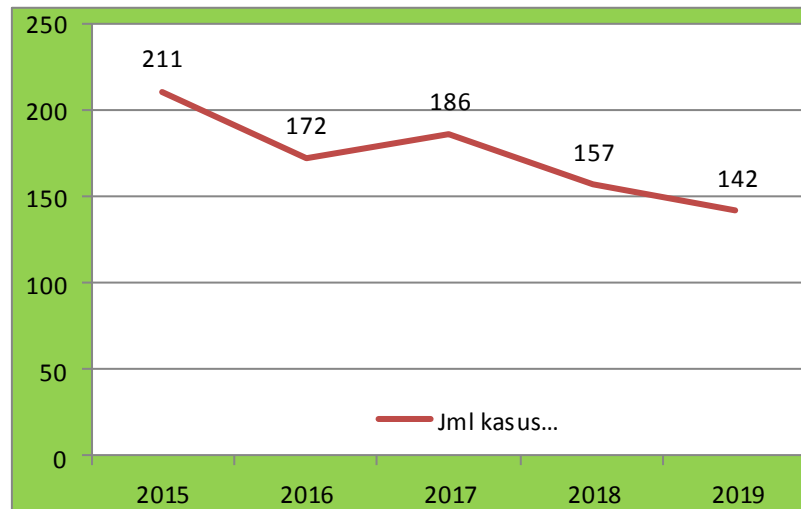
d) Indikator 3.4 : Prevalensi Balita Gizi Buruk

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 terhadap target tahun 2019**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Prevalensi Balita Gizi Buruk tahun 2019 sebesar 0,27 sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 0,3 maka capaiannya adalah 100 %



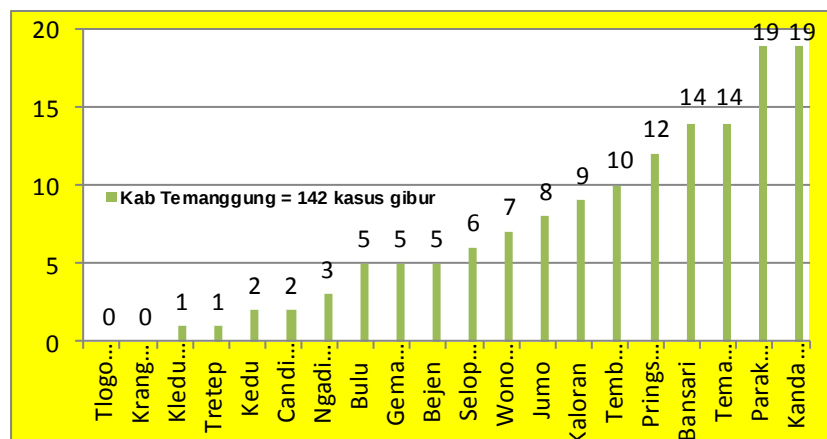
Grafik 3.5
Trend Kasus Balita Gizi Buruk di Kabupaten Temanggung
Tahun 2015 – 2019



Sumber

: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2019

Grafik 3.6
Kasus Baita Gizi Buruk (BB/TB) per Kecamatan
di Kabupaten Temanggung Tahun 2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2019

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja sasaran Tahun 2019 dengan target RPJMD Tahun 2023**

Realisasi kinerja Prevalensi Balita Gizi Buruk tahun 2019 sebesar 0,27, bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2023 sebesar 0,3 maka capaiannya adalah 100.%.

Walaupun demikian masalah gizi buruk di Kabupaten Temanggung masih perlu mendapat perhatian karena masih terdapat kasus gizi buruk murni (tanpa penyakit), dan pencegahan terjadinya gizi buruk harus dilakukan lebih baik



lagi dan sinergisitas yang lebih kuat dengan lintas sektor dan lintas program. Gizi buruk dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan tulang anak pendek, termasuk tulang tengkorak yang membentuk rongga otak sehingga menyebabkan keterbelakangan pada anak, sehingga perlu upaya yang benar-benar serius menangani gizi buruk sejak dalam kandungan.

➤ **Faktor Pendorong**

1. Dinas Kesehatan melalui UPTD Puskesmas melakukan perawatan terhadap balita gizi buruk secara total coverage. Sehingga seluruh kasus balita gizi buruk dirawat sesuai dengan standar perawatan gizi buruk oleh petugas gizi di puskesmas yang sebelumnya telah dilatih penatalaksana gizi buruk pada balita.
2. peran lintas sektor terkait dan lembaga masyarakat terhadap penanganan gizi buruk

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Kurangnya kesadaran orang tua tentang gizi seimbang	Terus menerus melakukan penyuluhan tentang pentingnya gizi seimbang
2	Adanya penyakit bawaan dari balita	Perawatan pada gizi buruk

➤ **Prestasi**

Adanya inovasi dengan menyediakan Pondok Suzi (Pondok Konsultasi Gizi) bagi masyarakat sekitar wilayah Kecamatan Tlogomulyo, sehingga masyarakat mempunyai tambahan pengetahuan tentang gizi balita bagi anaknya. Puskesmas Tlogomulyo untuk kasus balita gizi buruknya tidak ada (nol).





Launching Pondok Suzi (Konsultasi Gizi) di Puskesmas Tlogomulyo.



Pondok Suzi di Desa Losari Kecamatan Tlogomulyo.

a. Indikator 3.5 : Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Jamban

➤ Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 terhadap target tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Jamban tahun 2019 sebesar 89,14, sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 79,84 % maka capaiannya adalah 100 %. Masyarakat Kabupaten Temanggung sudah meningkat dalam kepemilikan jamban keluarga, baik yang diperoleh melalui stimulan dari pemerintah maupun yang sudah menyadari arti pentingnya memiliki jamban dalam rumah tangganya.

➤ Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja sasaran Tahun 2019 dengan target RPJMD Tahun 2023

Realisasi kinerja Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Jamban tahun 2019 sebesar 89,14 %, bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2023 sebesar 83,84 % maka capaiannya adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Jamban Kabupaten Temanggung akan tercapai 100% di akhir periode RPJMD tahun 2023.

➤ Faktor Pendorong

Adanya komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung untuk menjadikan Kabupaten Temanggung bebas Buang air besar sembarangan (ODF) dengan salah satunya adalah kepemilikan jamban di rumah tangga, dengan memberikan stimulan jamban bagi masyarakat.



➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Masih adanya penduduk yang belum mempunyai jamban	Adanya stimulasi jamban keluarga
2	data berbeda dan tidak sesuai dengan data kemiskinan daerah	Verifikasi data lebih awal disesuaikan dengan KTP

➤ **Prestasi**

Prestasi yang telah di capai tahun 2019 antara lain :

1. Penghargaan dari Kementerian Kesehatan sebagai Kabupaten yang menjalankan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) berkelanjutan;
2. Penghargaan Duta Lingkungan Sehat STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) kategori anak sekolah sebagai juara I tingkat Provinsi Jawa Tengah



3. Terlaksananya penilaian akreditasi puskesmas pada 14 puskesmas dengan hasil penilaian :
 - a. 2 puskesmas terakreditasi paripurna yaitu Puskesmas Selopampang, dan Puskesmas Pare.
 - b. 7 Puskesmas mendapat terakreditasi Utama:
 1. Puskesmas Dharmarini,
 2. Puskesmas Tlogomulyo,



3. Puskesmas Bulu,
 4. Puskesmas Traji,
 5. Puskesmas Bejen,
 6. Puskesmas Candiroto, dan
 7. Puskesmas Gemawang.
- c. 5 puskesmas terakreditasi madya yaitu :
1. Pukesmas Kranggan,
 2. Puskesmas Kaloran,
 3. Puskesmas Tepusen,
 4. Puskesmas Wonoboyo, dan
 5. Puskemas Jumo.



e) Indikator 3.6 : Indeks Kinerja RSUD

➤ Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 terhadap target tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Kinerja RSUD tahun 2019 sebesar 73,45 sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 79,2 maka capaiannya adalah 92,74 %.

Indeks kinerja RSUD merupakan tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD RSUD yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran. Indeks kinerja RSUD ini berupa penilaian kinerja BLUD meliputi aspek keuangan dan non keuangan, dengan proporsi : aspek keuangan 20%, aspek non keuangan (pelayanan 40% dan mutu pelayanan 40%). Dalam hal ini indikator indeks kinerja RSUD mencapai 92,74% dengan kategori Sangat Baik.



➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan target RPJMD Tahun 2023**

Realisasi kinerja Kinerja RSUD tahun 2019 sebesar 73,45, bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2023 sebesar 80 maka capaiannya adalah 91,81%. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja RSUD Kabupaten Temanggung akan tercapai 100% di akhir periode RPJMD tahun 2023.

➤ **Faktor Pendorong**

Mekanisme penerimaan fungsional BLUD dapat langsung digunakan untuk membiayai kegiatan pelayanan

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Bertambahnya jenis pelayanan, tempat tidur pasien dan penambahan gedung pelayanan mengakibatkan bertambahnya anggaran untuk kegiatan operasional rumah sakit.	Memprioritaskan anggaran yang ada untuk kebutuhan operasional rumah sakit
2	Terbatasnya ketersediaan SDM dan alkes sesuai standar Permenkes	Menambah SDM, Meningkatkan Kompetensi Petugas yang sudah ada dan Pengadaan Barang Sesuai Standar Permenkes

➤ **Prestasi**

Tahun 2019 RSUD Kabupaten Temanggung dilaksanakan penilaian akreditasi rumah sakit oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit dan mendapatkan hasil lulus terakreditasi Paripurna.





4) Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat

Untuk mengukur Sasaran keempat dilakukan pengukuran terhadap satu indikator kinerja dan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100%. Untuk mengukur sasaran Strategis 4 **“Budaya Literasi Masyarakat”** dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat								
Indikator Sasaran	Satu an	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian kinerja 2019	Renstra 2019- 2023		Capaian kinerja tahun 2019 - 2023 (%)
			T	R		Target akhir 2023	Realisasi 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase peminjam di perpustakaan	Angka	74,39	75	77,87	100	82	77,87	94,96
Rata-rata capaian kinerja					100			94,96

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat** mencapai 100% yang didukung oleh indikator Persentase peminjam di perpustakaan.



➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target Tahun 2019**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Persentase Peminjam di Perpustakaan tahun 2019 sebesar 77,87%, sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 75% maka capaiannya adalah 100 %.

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target RPJMD Tahun 2023**

Realisasi kinerja Persentase Peminjam di Perpustakaan tahun 2019 sebesar 77,87 %, bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2023 sebesar 82 % maka capaiannya adalah 94,96%. Hal ini menunjukkan bahwa Persentase Peminjam di Perpustakaan Kabupaten Temanggung akan tercapai 100% di akhir periode RPJMD tahun 2023 dengan upaya keras.

➤ **Faktor Pendorong**

Adanya aplikasi ipusda yang diluncurkan oleh Dinas Perpustakaan disamping layanan manual, dan adanya perpustakaan keliling.

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Keterbatasan penyediaan jenis buku	Menambah dan memperbaharui koleksi buku
2	Fasilitas yang kurang mendukung kenyamanan pengunjung	Menambah fasilitas dan inovasi pelayanan agar dapat menarik pengunjung



5) Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal

Untuk mengetahui capaian kinerja pada sasaran strategis ini dapat dilakukan dengan pengukuran pada indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal								
Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja tahun 2019 - 2023 (%)
			T	R		Target akhir 2023	Realisasi 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase pelestarian cagar budaya	%	5,16	6,10	6,10	100	10,79	6,10	56,53
Persentase kelompok seni budaya yang aktif	%	40,32	44,33	45,16	100	47,67	45,16	94,73
Rata-rata capaian kinerja					100			75,63

Dengan rata-rata capaian kinerja sasaran **Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal** sebesar 100% di tahun 2019. Sasaran 5 ini didukung oleh 2 (dua) indikator yaitu indikator Persentase pelestarian cagar budaya dan Persentase kelompok seni budaya yang aktif.

a) Indikator 5.1 : Persentase Pelestarian Cagar Budaya

➤ Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Persentase Pelestarian Cagar Budaya tahun 2019 sebesar 6,1, sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 6,1 maka capaiannya adalah 100%.

➤ Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target RPJMD Tahun 2023



Realisasi kinerja Persentase Pelestarian Cagar Budaya tahun 2019 sebesar 6,1 %, bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2023 sebesar 10,79% maka capaiannya adalah 56,53%.

➤ **Faktor Pendorong**

Adanya kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan cagar budaya selain pemerintah.

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	belum adanya payung hukum / Regulasi yang berkaitan dengan Cagar Budaya	Adanya rencana penyusunan Perda dan Perbup tentang cagar budaya
2	belum adanya kriteria yang baku definisi dari pelestarian cagar budaya di Kabupaten Temanggung, sehingga penentuan target masih terlalu rendah.	Membuat kriteria sendiri tentang pelestarian cagar budayan di Kabupaten Temanggung
3	belum adanya tempat penyimpanan cagar budaya	Mengusulkan tempat penyimpanan (museum)

b) Indikator 5.2 : Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target Tahun 2019**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif tahun 2019 sebesar 45,16%, sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 44,33,% maka capaiannya adalah 100 %.



➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target RPJMD Tahun 2023**

Realisasi kinerja Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif tahun 2019 sebesar 45,16 %, bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2023 sebesar 47,67% maka capaiannya adalah 94,73%. Hal ini menunjukkan bahwa Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif Kabupaten Temanggung akan tercapai 100% di akhir periode RPJMD tahun 2023 dengan upaya keras.

➤ **Faktor Pendorong**

1. semakin meningkatnya apresiasi/animo masyarakat untuk lebih tertib administrasi di bidang seni dan budaya.
2. adanya bantuan kepada kelompok kesenian yang mempersyaratkan kelengkapan administrasi sehingga kelompok seni dan budaya makin memperbaiki administrasinya terutama kepemilikan register kesenian.

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Minimnya fasilitasi tempat bagi kelompok seni untuk menampilkan olah seninya	Mulai mengagendakan tempat-tempat umum untuk menampilkan olah seninya

6) Sasaran strategis 6 : Meningkatnya Nilai Kehidupan Bermasyarakat dan Wawasan kebangsaan

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada dua indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3.14 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Nilai kehidupan Bermasyarakat dan Wawasan Kebangsaan								
Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian kinerja 2019	Renstra 2018-2023		Capaian kinerja tahun 2019-2023 (%)
			T	R		Target akhir 2023	Realisasi 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Indeks Gotong Royong	%	na	0,63	0,83	100	0,67	0,83	100
2. Indeks Toleransi	%	na	0,63	0,83	100	0,67	0,83	100
Rata-rata capaian kinerja					100			100

Dengan capaian kinerja rata-rata sasaran Meningkatnya Nilai kehidupan Bermasyarakat dan Wawasan Kebangsaan 100% di tahun 2019, sasaran 6 ini didukung oleh dua indikator yaitu indikator Indeks Gotong royong dan Indeks Toleransi.

a) Indikator 6.1 : Indeks Gotong Royong

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target Tahun 2019**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Indeks Gotong Royong tahun 2019 sebesar 0,83, sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 0,63 maka capaiannya adalah 100 %.

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target RPJMD Tahun 2023**

Realisasi kinerja Indeks Gotong Royong tahun 2019 sebesar 0,83, bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2023 sebesar 0,67 maka capaiannya adalah 100%.

➤ **Faktor Pendorong**

1. pengaruh kondisi sosial masyarakat Kabupaten Temanggung yang kondusif;
2. tingginya rasa empati yang ada di lingkungan masyarakat.



3. gotong royong sudah merupakan budaya dan ciri khas masyarakat Temanggung.

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Pengaruh budaya eksternal yang cenderung mengedepankan kepentingan individual	- Melestarikan dan menjaga konsistensi tradisi budaya gotong royong di tengah masyarakat - Membuat acara yang membutuhkan kebersamaan masyarakat banyak

b) Indikator 6.2 : Indeks Toleransi

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target Tahun 2019**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Indeks Toleransi tahun 2019 sebesar 0,83, sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 0,63 maka capaiannya adalah 100%.

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target RPJMD Tahun 2023**

Realisasi kinerja Indeks Toleransi tahun 2019 sebesar 0,83 bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2023 sebesar 0,67 maka capaiannya adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Toleransi Kabupaten Temanggung akan tercapai 100% di akhir periode RPJMD tahun 2023.

➤ **Faktor Pendorong**

1. adanya pengaruh kondisi sosial masyarakat Kabupaten Temanggung yang kondusif
2. tingginya rasa empati yang ada di lingkungan masyarakat yang memiliki perbedaan terutama dari sisi agama.



➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Masih adanya paham radikalisme agama yang berkembang di Indonesia	Menumbuhkan kesadaran beragama lewat tokoh agama

7) Sasaran strategis 7: Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Untuk mengukur sasaran Strategis 7 “Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)” dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)								
Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian kinerja 2019	Renstra 2018-2023		Capaian kinerja tahun 2019 – 2023 (%)
			T	R		Target akhir 2023	Realisasi 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	12,04	10,57	11,93	87,13	5,00	11,93	41,91
2. Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial luar panti sosial	%	1,18	1,22	1,31	100	1,22	1,31	100
Rata-rata capaian kinerja					93,57			70,95

Rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar 93,57%. Sasaran 7 didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase Rumah



Tidak Layak Huni (RTLH) dan Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial.

a) Indikator 7.1 : Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target Tahun 2019**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2019 sebesar 11,93% sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 10,57% maka capaiannya adalah 87,13 %.

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target RPJMD Tahun 2023**

Realisasi kinerja Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2019 sebesar 11,93%, bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2023 sebesar 5% maka capaiannya adalah 41,91%. Hal ini menunjukkan bahwa Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Temanggung akan tercapai 100% di akhir periode RPJMD tahun 2023 dengan upaya keras.

➤ **Faktor Pendorong**

1. Usulan RTLH banyak yang merupakan hasil musrenbang RKPD tahun sebelumnya dimana usulan musrenbang RKPD dijamin sampai APBD.
2. RTLH juga didukung oleh lembaga lain seperti BAZDA, CSR, Kementerian, Pemerintah Provinsi dan APBDes.



➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Swadaya masyarakat yang belum maksimal	Mengintensifkan peran tim pelaksana tingkat Desa
2	Banyak RTLH yang berdiri di atas PJKK/ Pemerintah Daerah dan tanah desa	Bekerjsama dengan lembaga non pemerintah untuk merelokasi / berupa pengadaan tanah, pembangunan bisa diusulkan di Kementerian Pusat

b) Indikator 7.2 : Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di luar Panti Sosial

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target Tahun 2019**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di luar Panti Sosial tahun 2019 sebesar 1,31% sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 1,22% maka capaiannya adalah 100 %.

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target RPJMD Tahun 2023**

Realisasi kinerja Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di luar Panti Sosial tahun 2019 sebesar 1,31 %, bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2023 sebesar 1,22 % maka capaiannya adalah 100%.



➤ **Faktor Pendorong**

Kabupaten Temanggung telah memiliki rumah perlindungan sosial.

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	SDM yang menangani terbatas	Pengusulan formasi pada jabatan di RPS

8) Sasaran strategis 8 : Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada satu indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8

SASARAN STRATEGIS : Terkendalnya Laju Pertumbuhan penduduk								
Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja tahun 2019 – 2023 (%)
			T	R		Target akhir 2023	Realisasi 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laju pertumbuhan penduduk	%	0,6	0,84	0,88	95,24	0,80	0,88	90,9
Rata-rata capaian kinerja					95,24			90,9

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target Tahun 2019**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2019 sebesar 0,88%, sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 0,84% maka capaiannya adalah 95,24 %.

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target RPJMD Tahun 2023**



Realisasi kinerja Laju Pertumbuhan Pendudukan tahun 2019 sebesar 0,88 %, bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2023 sebesar 0,80% maka capaiannya adalah 90,9%. Hal ini menunjukkan bahwa Laju Pertumbuhan Pendudukan Kabupaten Temanggung sudah tercapai 100% di akhir periode RPJMD tahun 2023.

➤ **Faktor Pendorong**

1. Meningkat dan tingginya KIE, advokasi kepada masyarakat dan stake holder;
2. meningkatnya koordinasi kepada KKB dalam pelayanan KB didukung pemahaman masyarakat tentang alat kontrasepsi MKJP lebih efektif dan praktis;
3. terintegrasinya kegiatan BKR (Bina Keluarga Remaja) dan PIK (Pusat Informasi Konseling) remaja;
4. pengembangan *life skill* bagi remaja terutama dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga;
5. peningkatan kursus calon pengantin oleh lintas sektoral;
6. tingkat pendidikan wajar 12 tahun;
7. mobilitas media sosial dalam penyampaian jenis alat kontrasepsi dan side efek;

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Masih tingginya angka kelahiran (CBR);	Mengintensifkan secara konferhensif penyuluhan tentang KB
2	kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya ikut KB;	
3	rendahnya pemahaman batasan PUS bisa hamil (merasa tua tidak perlu KB);	
4	prosentase KTD (Kehamilan yang tidak dikehendaki) tinggi;	



No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
5	tidak semua masyarakat dengan keyakinan tertentu menerima jenis alat kontrasepsi modern;	
6	PUS muda .yang menikah diusia dini belum terbekali dengan pengetahuan jenis alat kontrasepsi;	

9) Sasaran strategis 9 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada dua indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.17 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender serta Perlindungan Terhadap perempuan dan Anak								
Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian kinerja 2019	Renstra 2018-2023		Capaian kinerja tahun 2019 – 2023 (%)
			T	R		Target akhir 2023	Realisasi 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	94,65	94,55	95,62	100	94,15	95,62	100
2. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan	%	0,016	0,015	0,009	100	0,011	0,009	100
Rata-rata capaian kinerja					100			100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak telah mencapai 100%. Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) indikator sasaran yaitu



Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Persentase perempuan dan anak korban kekerasan.

a) Indikator 9.1 : Indeks Pembangunan Gender (IPG)

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target Tahun 2019**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Indeks Pembangunan Gender tahun 2019 sebesar 95,62 sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 9,55% maka capaiannya adalah 100 %.

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target RPJMD Tahun 2023**

Realisasi kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2019 sebesar 95,62 %, bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2023 sebesar 94,25 % maka capaiannya adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Temanggung sudah tercapai 100% di akhir periode RPJMD tahun 2023.

➤ **Faktor Pendorong**

tingginya angka harapan hidup perempuan sebagai salah satu indikator IPG.

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Masih rendahnya penghasilan perempuan	Peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan
2	harapan lama sekolah bagi perempuan masih terjadi disparitas	Memberi beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi bagi perempuan
3	masih kurangnya pemahaman petugas dalam penyusunan ARG	Bintek penyusunan Perencanaan dan penganggaran



➤ **Prestasi**

Tahun 2019 Kabupaten Temanggung menyelenggarakan Duta Genre



b) Indikator 9.2 : Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target Tahun 2019**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan tahun 2019 sebesar 0,009 sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 0,015 maka capaiannya adalah 100 %.

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target RPJMD Tahun 2023**

Realisasi kinerja Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan tahun 2019 sebesar 0,009%, bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2023 sebesar 0,12 % maka capaiannya adalah 100% Hal ini menunjukkan bahwa Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Temanggung telah tercapai 100% di akhir periode RPJMD tahun 2023.



➤ **Faktor Pendrong dan Faktor Penghambat**

1. Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas.

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Kondisi Ekonomi keluarga di bawah rata-rata	Penyuluhan terhadap keluarga
2	Tingkat stress yang tinggi	

➤ **Prestasi**

Tahun 2019 Kabupaten Temanggung mendapat penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai Kabupaten Layak Anak dengan kategori **MADYA**.

Mendapat penghargaan dari Presiden RI yaitu Anugerah Parahita Ekapraya



b.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Misi 2

Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

Pada Misi 2 Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan didukung oleh 6 (enam) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kesejahteraan petani;
2. Meningkatnya kedaulatan pangan;
3. Meningkatnya pariwisata daerah;
4. Meningkatnya investasi sektor riil;
5. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah;
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

10) Sasaran Indikator 10. Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani Kabupaten Temanggung Tahun 2019

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019 – 2023 (%)
					T	R		T 2023	R 2019	
10	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai tukar petani (NTP)	Angka	102,17	102,6	103,09	100	103,6	103,09	100

➤ Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja sasaran Tahun 2019 dengan target

Capaian sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani berupa indikator sasaran Nilai tukar Petani Tahun 2019 masih menggunakan data Tahun 2018, karena Data 2019 belum di publikasikan. selama periode Januari sampai dengan Desember 2018, secara rata-rata besaran NTP semua subsektor berada pada posisi di atas 100. Hal ini menunjukkan bahwa dalam periode ini petani mengalami surplus, artinya nilai dari produk



pertanian yang dihasilkan petani lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga petani dan untuk biaya produksi hasil pertaniannya. Capaian Kinerja Sasaran tercapai 103,09, tercapai 100% dibandingkan target NTP tahun 2019 sebesar 102,60.

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja sasaran Tahun 2019 dengan target RPJMD Tahun 2023**

Capaian Kinerja Sasaran tahun 2019 tercapai 103,09 dibandingkan target NTP tahun 2023 sebesar 103,60, sehingga capaian Kinerja sasaran di banding target akhir RPJMD telah tercapai 100%.

Capaian ini didukung oleh peningkatan Nilai tukar petani pada sub sektor perkebunan yang mencapai angka tertinggi 109,12, sedangkan NTP sub sektor hortikultura mencapai angka terendah yaitu 100,73.

➤ **Faktor Pendorong**

1. Meningkatnya nilai jual hasil komoditas pertanian
2. peremajaan kopi yang sudah tua dengan cara penyambungan dengan benih entres yang berkualitas dan bersertifikat.
3. Adanya Kebijakan Pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten yang mendukung pencapaian swasembada pangan (UPSUS PAJALE, Visi Misi Gubernur dan Bupati Temanggung sebagai dasar pelaksanaan Program/Kegiatan budidaya pertanian
4. Adanya intervensi pemerintah melalui program dan kegiatan pengembangan kawasan bawang putih
5. Peningkatan kapasitas posluhdes dengan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
6. Pembinaan dan pendampingan yang intensif oleh penyuluh pertanian dalam peningkatan kapasitas petani dan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani, dengan penyelenggaraan



pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis bagi kelompok tani/Gapoktan.

7. Edukasi yang terus dan berkelanjutan tentang pengenalan dan pencegahan penyakit hewan sehingga berkontribusi pada pengendalian penyakit, ketersediaan vaksin dan obat-obatan mudah diakses oleh masyarakat, update pengetahuan teknis bagi petugas
8. Meningkatnya konsumsi domba dan Kambing oleh masyarakat
9. Ketersediaan bibit ternak yang baik

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Meningkatnya biaya produksi budi daya pertanian	Pemberian subsidi pupuk, bibit dan alsintan
2	Adanya serangan hama penyakit tanaman pangan, Perkebunan maupun Hortikultura	Mengoptimalkan litbang pertanian dalam pemberantasan hama penyakit
3	Anomali cuaca yang cukup ekstrim berpengaruh terhadap produktivitas tanaman seperti tembakau sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, baik saat budidaya maupun saat pemanenan dan pasca panen, demikian komoditas lain seperti Kopi, Padi, dan tanaman hortikultura.	Diversifikasi tanaman
4	Belum semua petani menggunakan bibit unggul bersertifikat dalam budidaya pertanian.	Pemberian pinjaman lunak kepada petani dalam pengadaan bibit unggul bersertifikat



➤ Prestasi / Penghargaan

Peningkatan Nilai tukar petani di sektor perkebunan berkorelasi dengan apresiasi yang di terima oleh Kabupaten Temanggung dari Kementerian Pertanian berupa penghargaan atas “Pengembangan hilirisasi dan kewirausahaan bidang perkebunan Tahun 2019” yang diterima oleh Bupati Temanggung.



Capaian tersebut tidak terlepas dari berkembang pesatnya tren masyarakat Temanggung terhadap kopi.

Kopi Temanggung dikenal memiliki kualitas dan citarasa yang khas, dengan Luas 1.844,58 Ha untuk kopi arabika dan 13.694 hektar untuk kopi robusta, menjadikan Temanggung menjadi produsen kopi utama di Jawa Tengah. Selain itu ditunjang dengan munculnya kopi Temanggung sebagai juara dalam kontes uji cita rasa di berbagai event nasional bahkan mancanegara. Di Kabupaten Temanggung sudah terdapat 256 brand kopi, yang masing - masing memiliki citarasa berkualitas khas kopi Temanggung. Dalam menjaga kualitas bahan baku diwujudkan dalam SOP melalui Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), baik MPIG Kopi Robusta Temangggung, maupun MPIG Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing,



CONGRATULATION !!!!

PENGHARGAAN PENDATAAN ERDCK DAN IMPLEMENTASI KARTU TANI 2019

KRITERIA

Kecepatan.Komunikasi&Koordinasi.Kerjasama.Realisasi Penggunaan
Kartu Tani

3 PROVINSI TERBAIK

PROVINSI JAWA BARAT
PROVINSI JAWA TIMUR
PROVINSI JAWA TENGAH

3 KABUPATEN TERBAIK

CIAMIS (JABAR)
SUMENEP (JATIM)
TEMANGGUNG (JATENG)

3 KECAMATAN TERBAIK

KEC.BULELENG (KAB.BULELENG,BALI)
KEC PANUMBANGAN (KAB.CIAMIS, JABAR)
KEC KEDU (KAB.TEMANGGUNG,JATENG)

KRITERIA

Kabupaten Proaktif dalam Pendataan Erdck dan Implementasi Kartu Tani

KAB.DAIRI, SUMATERA UTARA

KAB.DOMPU, NTB

KAB.LIMA PULUH KOTA, SUMATERA BARAT

KAB.KOTAWARINGIN BARAT, KALIMANTAN TENGAH

KAB.MOROWALI, SULAWESI TENGAH

KAB.MAROS, SULAWESI SELATAN

KAB.OKU SELATAN, SUMATERA SELATAN

Selain itu melalui Peningkatan kapasitas SDM Petani dilaksanakan melalui pelatihan – pelatihan, magang, dan kunjungan lapang guna meningkatkan kompetensi anggota kelompok tani. Salah satu bentuk peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian diataranya adalah dengan diterimanya penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah kepada Kabupaten Temanggung sebagai Kabupaten terbaik dalam Penghargaan Pendataan RDKK Implementasi Kartu Tani dalam kriteria kecepatan, komunikasi dan koordinasi, kerjasama dan realisasi kartu tani, dan Kabupaten/Kota bertransaksi Kartu Tani terbanyak, dimana penyuluh pertanian merupakan petugas admin dalam distribusi pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

Semarang, 9 Desember 2019

NOMOR : 521.34/0028615
SIFAT : SEGERA
LAMPIRAN :
HAL : -

Kepada :
Yth. Bupati/Walikota
di-
Tempat

Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Menggunakan Kartu Tani

1. Dasar:

- Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penggunaan Kartu Tani Dalam Penebusan Pupuk Bersubsidi di Provinsi Jawa Tengah;
- Surat Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian RI nomor B-825/PW.420/B/11/2019 tanggal 29 Maret 2019 hal Permintaan Dukungan Anggaran APBD kegiatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3);
- Surat Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian RI nomor B-825/PW.420/B/11/2019 tanggal 25 Nopember 2019 hal Dukungan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam Pengawasan Pupuk Bersubsidi;
- Hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Jawa Tengah tanggal 26 Nopember 2019;

2. Inspektorat Jenderal bersama Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan tindakan preventif terhadap potensi penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi pada Bulan Desember 2019

3. Berkaitan dengan hal tersebut, diminta bantuan Saudara untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

- Melaksanakan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penebusan Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani;
- Mengoptimalkan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan, pengamanan dan pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi untuk meminimalisir penyimpangan dan melaporkan ke KP3 Provinsi secara berkala;
- Mengoptimalkan penggunaan anggaran verifikasi, validasi dan updating program penyaluran pupuk bersubsidi dari APBN dan mengalokasikan anggaran pendampingan KP3 melalui APBD Kabupaten/Kota

4. Diucapkan terima kasih kepada Bupati Temanggung, Purbalingga, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, Walikotabaru, Surakarta dan Salatiga atas pencapaian target penggunaan Kartu Tani 40 – 60 %.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Pj. Sekretaris Daerah
SETDA
HERU SETIAWAN, SH. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19601014 198903 1 002

TEMBUSAN :

- Gubernur Jawa Tengah;
- Anggota Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi Jawa Tengah;
- Direktur PT. Pupuk Indonesia;
- Direktur PT. BRI (Persero) Tbk. Jakarta;
- Pimpinan Wilayah PT. BRI (Persero) Tbk. Semarang;
- Pimpinan Wilayah PT. BRI (Persero) Tbk. Yogyakarta;
- Pimpinan PT. Pupuk Sriwijaya PPD Jawa Tengah;
- Pimpinan PT. Petro Kimia PPD Jawa Tengah.

11) Sasaran 11. Meningkatkan Kedaulatan Pangan

Tabel 3.19 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kedaulatan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2019

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019 - 2023 (%)
					T	R		T 2023	R 2019	
11	Meningkatnya Kedaulatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-	72,8	73,1	77,90	100	74,3	77,90	100
		Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/kap/th	20,91	21,11	22,74	100	21,34	22,74	100



➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja sasaran Tahun 2019 dengan target**

Capaian sasaran Meningkatnya Kedaulatan Pangan berupa indikator sasaran Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Tingkat Konsumsi Ikan.

Capaian Indikator sasaran Skor Pola Pangan harapan Tahun 2019 mencapai 77,9 dibandingkan target Tahun 2019 sebesar 73,1, sehingga tercapai 100%.

Skor Pola Pangan Harapan menunjukkan ketersediaan pangan untuk konsumsi di Kabupaten Temanggung cukup memadai untuk pemenuhan konsumsi dan penyediaan pangan di wilayah Kabupaten Temanggung

Capaian indikator sasaran Tingkat Konsumsi Ikan Tahun 2019 mencapai 22,74 kg/Kap/Thn dibandingkan target Tahun 2019 sebesar 21,11 kg/kap/thn, sehingga tercapai 100%.

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja sasaran Tahun 2019 dengan target RPJMD Tahun 2023**

Capaian Kinerja Sasaran tahun 2019 dibandingkan Target RPJMD tahun 2023, pada indikator sasaran Skor Pola Pangan Harapan mencapai 77,9 sedangkan target tahun 2023 sebesar 74,30 sehingga tercapai sebesar 100%.

Sedangkan pada indikator sasaran Tingkat Konsumsi Ikan mencapai 22,74 kg/kap/thn dibandingkan target akhir RPJMD sebesar 21,34 kg/kap/thn telah tercapai 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan kedua indikator sasaran tersebut, target kinerja sasaran sampai dengan akhir RPJMD Tahun 2023 telah tercapai 100%.

➤ **Faktor Pendorong**

1. Meningkatnya partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral untuk konsumsi keluarga;
2. keberhasilan penerapan teknologi budidaya ikan



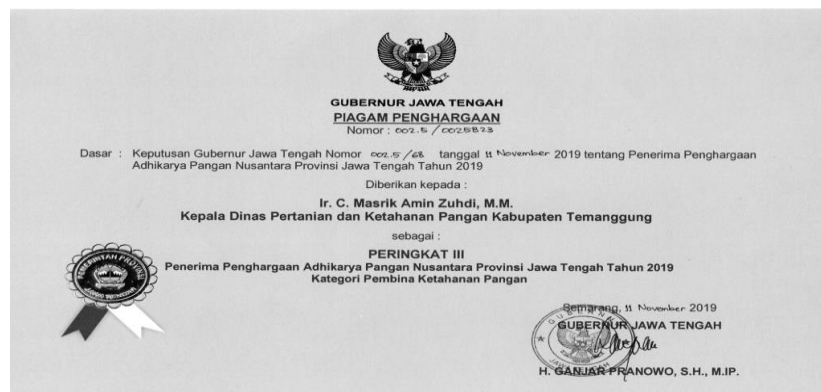
➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Tradisi dan Kebiasaan Konsumsi Masyarakat	Penyuluhan tentang konsumsi pangan yang baik/ideal
2	Tingkat pengetahuan terutama pengetahuan mengenai konsumsi pangan yang baik/ideal	
3	Tingkat ekonomi yang mempengaruhi kemampuan untuk menjangkau pangan yang cukup dan berkualitas	Meningkatkan ekonomi kerakyatan

➤ **Prestasi / Penghargaan**

Meningkatnya kedaulatan pangan Kabupaten Temanggung melalui 2 (dua) Indikator sasaran berkorelasi dengan Apresiasi penghargaan di bidang ketahanan pangan, Kabupaten Temanggung Tahun 2019 melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang mendapatkan apresiasi dari Gubernur Jawa Tengah melalui Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara tahun 2019 kategori Pembina Ketahanan Pangan.

Adhikarya Pangan Nusantara adalah apresiasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan aparatur pemerintah, baik perseorangan maupun kelompok, yang berprestasi dan berkontribusi dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.



12) Sasaran 12. Meningkatnya Pariwisata Daerah

Tabel 3.20 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pariwisata Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019-2023 (%)
					T	R		T 2023	R 2019	
12	Meningkatnya pariwisata daerah	Pertumbuhan jumlah wisatawan	%	15,41	17,00	12,30	72,35	21,00	12,30	58,57
		Lama tinggal wisatawan	hari	1	1	1	100	1	1	100

➤ Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target

Sasaran meningkatnya pariwisata daerah didukung oleh 2 (dua) indikator sasaran. Capaian indikator sasaran pertumbuhan jumlah wisatawan tahun 2019 mencapai 12,30 dibanding target 17,00, sehingga tercapai 72,35. Capaian indikator sasaran lama tinggal wisatawan tahun 2019 mencapai 1 hari dengan target 1 hari sehingga tercapai 100%. Sehingga capaian kinerja rata-rata sasaran meningkatnya pariwisata daerah didapatkan 86,17% di tahun

➤ Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target RPJMD

Capaian kinerja rata-rata tersebut jika di bandingkan target di tahun akhir RPJMD dari rata-rata kedua indikator tercapai 79,28%. Capaian kinerja rata-rata tersebut diukur dari capaian 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

- Capaian kinerja indikator *Pertumbuhan jumlah wisatawan* mencapai 72,35 % dari target 17,00 % dengan realisasi 12,30% di tahun 2019. Jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 21% dengan realisasi 12,30%, maka baru tercapai 58,57 %.



- Capaian kinerja lama tinggal wisatawan mencapai 100% di tahun 2019 dari target 1 hari dengan realisasi 1 hari. Jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 1 hari dengan realisasi 1 hari, sehingga kinerja tercapai 100 %.

➤ **Faktor Pendorong**

1. Potensi daya tarik yang beragam dan potensial dan Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya pariwisata, lembaga pariwisata dan koordinasi pemangku kepentingan pariwisata
2. Lama tinggal wisatawan merupakan indikator yang hampir diwajibkan di sektor pariwisata

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Kurangnya inovasi dari pengelola obyek wisata serta keterbatasan kemampuan SDM Pengelola OW	Pendampingan dan pembinaan manajemen oleh Pemkab
2	Keterbatasan Sarpras Penunjang / akses menuju OW sehingga wisatawan dg tipikal rombongan blm terlayani secara optimal.	Pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan obyek wisata
3	Masih kurangnya event pariwisata yang mendorong kunjungan wisatawan	Menyelenggarakan event-event nasional dan internasional



13) Sasaran 13. Meningkatnya Investasi Sektor Riil

Tabel 3.21 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Investasi Sektor Riil Kabupaten Temanggung Tahun 2019

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019-2023 (%)
					T	R		T 2023	R 2019	
13	Meningkatnya investasi sektor riil	Kontribusi sektor perindustrian	%	26,83	26,83	27.08	100	26,83	27.08	100
		Kontribusi sektor perdagangan	%	20,35	20,35	20.50	100	20,35	20.50	100
		Persentase Koperasi Sehat	%	7,45	9,05	8.71	96,24	12,01	8.71	72.52
		Persentase UKM Aktif	%	35	36	35.93	99,80	40	35.93	89.83
		Pertumbuhan Investasi daerah	%	362	20	362	100	20	362	100
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	74,39	75,53	75.53	100	75,65	75.53	99.84
		Rata-Rata					78,595			77,03

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Meningkatnya Investasi Sektor Riil Kabupaten Temanggung tahun 2019 sebesar 78,59. Sasaran ini didukung oleh 6 indikator : Kontribusi sektor perindustrian, Kontribusi sektor perdagangan, Persentase Koperasi Sehat, Persentase UKM Aktif, Pertumbuhan Investasi daerah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

a) Indikator sasaran 13.1 Kontribusi sektor perindustrian

➤ Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Kontribusi Sektor Perindustrian Kabupaten Temanggung tahun 2019 sebesar 26,83%, sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 27,08 maka capaiannya adalah 100.%.



➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target RPJMD**

Capaian kinerja indikator Kontribusi Sektor Perindustrian mencapai 100 % di tahun 2019 dari target 26,83 % realisasi 27,08 %. Jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 26,83 % dan sudah terealisasi 27,08 % maka sudah tercapai 100 %.

➤ **Faktor Pendorong**

1. Penerapan pelayanan perijinan satu pintu/One Stop Service (OSS);
2. Kemudahan Pelayanan Perizinan
3. Terjaminnya ketersediaan bahan baku.

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Kurang pemahaman terhadap prosedur permohonan perijinan dan pajak	Sosialisasi terhadap kepengurusan perijinan dan pajak
2	Bahan baku untuk produk ekspor belum memadai	Bekerjasama dengan pihak lain
3	Belum terukurnya kualitas kopi (specialty) sebagai produk unggulan daerah	Tersedianya laboratorium kopi dan tim penilai yang bersertifikasi

b) Indikator sasaran 13.2 Kontribusi sektor perdagangan

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Kontributor sektor perdagangan Kabupaten Temanggung tahun 2019 sebesar 20,50% sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 20,35% maka capaiannya adalah 100%.



➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target RPJMD**

Realisasi kinerja Kontribusi sector perdagangan tahun 2019 mencapai 20,50%, bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2023 sebesar 20,35% maka capaiannya adalah 100%.

➤ **Faktor Pendorong**

1. Sudah adanya Perda tentang PKL sehingga bisa di sosialisasikan kepada PKL
2. Adanya peralatan metrologi yang sesuai dengan standar dan kendaraan dinas operasional kemetrolgian
3. Stabilitas pasar Luar Negeri baik dan tidak ada gejolak antar negara tujuan ekspor dan penyederhanaan regulasi tentang ekspor.
4. Adanya pemeliharaan dan penertiban pasar secara berkala
5. Tersedianya infrastuktur perdagangan dalam kondisi baik
6. Diterapkannya zonasi penempatan awal pedagang di pasar
7. Stabilitas harga

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Belum tersedianya lokasi yang optimal untuk menampung / penempatan semua PKL	Menata kembali semua pkl dan memanfaatkan gedung atau tempat lain untuk dibuat sentra PKL
2	Pertumbuhan PKL yang sangat cepat namun lahan untuk menampung PKL belum tersedia	



3	Kurangnya kesadaran pedagang terhadap zonasi peruntukan pedagang	Penyuluhan dan pendekatan secara preventif
4	Belum adanya pembangunan dan penataan ulang zonasi pada pasar lama	Menata kembali semua PKL sesuai zonasi dan menindak tegas bagi yang melanggar

c) Indikator sasaran 13.3 Persentase Koperasi Sehat

➤ Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Temanggung tahun 2019 sebesar 8,71%, sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 9,05 maka capaiannya adalah 96,24%.

➤ Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target RPJMD

Capaian kinerja indikator Persentase Koperasi Sehat mencapai 96,24 % di tahun 2019 dari target sebesar 9,05 terealisasi 8,71 %. Jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 12,01 %, dan terealisasi 8,71 % maka sudah tercapai 72,52 %.

➤ Faktor Pendorong

1. Meningkatnya pengetahuan SDM dari gerakan koperasi tentang pengelolaan perkoperasian dan manajemen yang baik
2. Kesadaran dari anggota koperasi untuk meningkatkan simpanan pokok, wajib sehingga bisa menambah kelancaran operasional koperasi



➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	kurangnya pemahaman pengurus dan pengawas koperasi akan pentingnya koperasi yang sehat	Penyuluhan, bimtek dan pendampingan bagi koperasi
2	belum bisa mengakses permodalan ke perbankan terkendala dengan agunan	Meningkatkan fungsi koperasi agar lebih mandiri

d) Indikator sasaran 13.4 Persentase UKM Aktif

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Persentase UKM Aktif Kabupaten Temanggung tahun 2019 sebesar 35,93%, sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 36 maka capaiannya adalah 99,80%.

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target RPJMD**

Capaian kinerja indikator posentase UKM aktif mencapai 99,80 % dari target sebesar 36 % terealisasi 35,93 % di tahun 2019. Jika di bandingkan dengan target RPJMD akhir tahun 2023 yaitu 40 %, dan terealisasi 35,93 % maka sudah tercapai 89,82 %.

➤ **Faktor Pendorong**

Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha tentang kewirausahaan dan ketrampilan dalam meningkatkan usahanya



➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Keterbatasan bahan baku	Mendirikan koperasi untuk menyediakan bahan baku
2	Pemasaran belum optimal	Melakukan promosi melalui media online, leaflet dan showroom UMKM di perhotelan dan pertokoan

e) Indikator sasaran 13.5 Pertumbuhan Investasi Daerah

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Pertumbuhan Investasi Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2019 sebesar 362 (merupakan data tahun 2018), sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 20 maka capaiannya adalah 100%.

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target RPJMD**

Realisasi kinerja Pertumbuhan Investasi Daerah tahun 2019 mencapai 362 (merupakan data tahun 2018), bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2023 sebesar 20% maka capaiannya adalah 100%.

➤ **Faktor Pendorong**

1. Penerapan pelayanan perijinan satu pintu/One Stop Service (OSS);
2. Kemudahan Pelayanan Perizinan



➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Belum minatnya para investor berinvestasi di kabupaten	1. Membuat prototype yang menarik 2. Memfasilitasi pertemuan usaha
	Fluktuasi harga tanah akibat maraknya praktek percaloan tanah (makelar tanah) sehingga mengurangi minat berinvestasi di Temanggung.	Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya investasi

f) Indikator sasaran 13.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Tingkat Angkatan Kerja Kabupaten Temanggung tahun 2019 sebesar 75,53%, sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 75,53 maka capaiannya adalah 100%.

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target RPJMD**

Capaian kinerja indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mencapai 75,53 % dari target sebesar 75,53 % terealisasi 100 % di tahun 2019. Jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 75,65 %, dan terealisasi 75,53 % maka sudah tercapai 99,84 %.



➤ **Faktor Pendorong**

Tingginya angka lama sekolah, karena semakin tinggi pendidikan semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Lowongan yang ada tidak sebanding dengan para pencari kerja	Perusahaan/pabrik membuat pengumuman lowongan pekerjaan dan bisa dilihat melalui Bursa kerja online (BKO)

g) Prestasi / Penghargaan

Dalam mendukung pencapaian Sasaran Meningkatnya investasi sektor riil dilakukan dengan berbagai dukungan program dan Kegiatan. Salah satu bentuk apresiasi /penghargaan yang diterima Kabupaten Temanggung dalam upaya mendorong peningkatan investasi sektor riil adalah :

1. Apresiasi penghargaan berupa Juara III Pesona Produk Kriya Dekranasda Tingkat Provinsi Jawa Tengah.



2. Juara III Lomba profil investasi Central Java Potential Investment Challenge dalam ajang bergengsi “Keris Jateng” yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia



3. Role model penyelenggaraan pelayanan publik dengan kategori “Baik” yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB



14) Sasaran 14. Meningkatnya Pemerataan dan kualitas Wilayah

Tabel 3.22 CAPAIAN KINERJA SASARAN MENINGKATNYA PEMERATAAN DAN KUALITAS WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019-2023 (%)
					T	R		T 2023	R 2019	
14	Meningkatnya Pemerataan dan kualitas wilayah	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	79,51	80,03	81.39	100	82,01	81.39	99.25
		Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang	%	87,60	87,70	87.7	100	88,01	87.7	99.55
		Persentase kawasan kumuh perkotaan	%	19,50	19,25	11.21	100	18,25	11.21	100
		Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	%	2,37	1,22	0.30	24,59	1,61	0.30	18.88

Rata-rata Capaian Sasaran Meningkatnya Pemerataan dan kualitas wilayah tahun 2019 sebesar 81,39%. Tujuan ini didukung oleh dua indikator yaitu 4 indikator yaitu : Persentase Infrastruktur Kondisi Baik, Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang, Persentase kawasan kumuh perkotaan dan Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas.

a) Indikator sasaran 14.1 Persentase Infrastruktur Kondisi Baik

➤ Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Infrastruktur Kondisi Baik Kabupaten Temanggung tahun 2019 sebesar 81,39%, sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 80,03% maka capaiannya adalah 100%.



➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target RPJMD**

Realisasi kinerja Persentase Infrastruktur Kondisi Baik tahun 2019 sebesar 81,39.% bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2023 sebesar 82,01% maka capaiannya adalah 99,25%. Hal ini menunjukkan bahwa Persentase Infrastruktur Kondisi Baik Kabupaten Temanggung akan tercapai 100% di akhir periode RPJMD tahun 2023 dengan upaya keras.

➤ **Faktor Pendorong**

1. Berada pada kawasan pendukung Kawasan Strategis Pertumbuhan Borobudur dan Dieng sehingga banyak kegiatan pusat dan provinsi yang dialokasikan di Kabupaten Temanggung
2. Kebutuhan masyarakat akan terbangunnya infrastruktur yang baik seperti jalan dan jembatan yang baik, irigasi yang baik, dan
3. Terlayannya air bersih untuk rumah tangga

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Kondisi topografi perbukitan	Pembangunan infrastruktur disesuaikan dengan bentang alam

b) Indikator sasaran 14.2 Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang Kabupaten Temanggung tahun 2019 sebesar 87,7%, sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 87,7% maka capaiannya adalah 100%.



➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target RPJMD**

Realisasi kinerja Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang tahun 2019 sebesar 87,7% bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2023 sebesar 88,01% maka capaiannya adalah 99,55%.

➤ **Faktor Pendorong**

Tersedianya regulasi berupa Perda nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 – 2031, Perda Bangunan Gedung, Perbup Perizinan.

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Kurangnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan
2	Kurangnya kesepahaman antar perangkat daerah mengenai regulasi tata ruang	Bimbingan Teknis anggota TKPRD
3	Belum lengkapnya instrumen dasar dalam pengawasan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Sinkronisasi penyusunan perda pengawasan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

c) Indikator sasaran 14.3 Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Persentase kawasan kumuh perkotaan Kabupaten Temanggung tahun 2019



sebesar 11,21%, sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 19,25% maka capaiannya adalah 100%.

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target RPJMD**

Realisasi kinerja Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan tahun 2019 sebesar 11,21% bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2023 sebesar 18,25% maka capaiannya adalah 100% Hal ini menunjukkan bahwa Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan Kabupaten Temanggung akan tercapai 100% di akhir periode RPJMD tahun 2023 dengan upaya keras.

➤ **Faktor Pendorong**

1. Adanya regulasi Surat Keputusan Bupati Temanggung tentang Kawasan Kumuh di Kabupaten Temanggung
2. Banyaknya alokasi kegiatan pusat dan provinsi untuk mengurangi kawasan kumuh
3. Terlaksananya program terpadu cipta karya dan sanitasi

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Sulitnya pembebasan lahan	Pendekatan intensif kepada pemilik lahan
2	Kurangnya peran serta masyarakat	Memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat

d) Indikator sasaran 14.4 Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target**



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Realisasi Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas Kabupaten Temanggung tahun 2019 sebesar 0,30% sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 1,22 maka capaiannya adalah 24,59%

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target RPJMD**

Realisasi kinerja Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas Persentase tahun 2019 sebesar 0,31% bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2023 sebesar 1,61% maka capaiannya adalah 18,88%

➤ **Faktor Pendorong**

1. Kondisi jalan yang baik dan nyaman yang didukung sarana dan prasarana perhubungan yang layak;
2. Tersedianya regulasi tentang keselamatan lalu lintas yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Kurangnya kepatuhan masyarakat (pengguna jalan dan awak angkutan umum) terhadap peraturan keselamatan lalu lintas	Sosialisasi tentang regulasi tentang keselamatan lalu lintas dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas
2	Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan angkutan barang untuk Uji Kelayakan Kendaraan (KIR)	Sosialisasi kepada pemilik kendaraan angkutan barang tentang pentingnya uji kelayakan kendaraan



15) Sasaran 15. Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup.

Tabel 3.23 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2019

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019-2023 (%)
					T	R		T 2023	R 2019	
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	%	63,78	66,33	69,65	100	70,53	69,65	98,76

Capaian Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup tahun 2019 sebesar 69,65%, bila dibandingkan dengan akhir tahun Renstra 2019-2023 mencapai 70,50 maka capaiannya adalah 98,76%.

➤ Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja sasaran Tahun 2019 dengan target

Pada indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), terdapat 4 program yaitu Program Perlindungan Dan Konservasi Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Pentaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

Pada indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan target sebesar 66.33 % dan realisasi sebesar 69.65 % artinya dapat tercapai 100 %.

➤ Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja sasaran Tahun 2019 dengan target RPJMD Tahun 2023

Realisasi kinerja Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) tahun 2019 sebesar 69,65% bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2023 sebesar 70,53% maka capaiannya adalah 98,76.



➤ **Faktor Pendorong**

1. Tersedianya regulasi berupa peraturan Bupati tentang upaya pengendalian UKL UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) sehingga setiap pemrakarsa /pelaku usaha harus menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan klasifikasi kegiatan/usaha, perusakan hutan dan lahan.
2. Adanya tim penanganan pengaduan lingkungan tingkat kabupaten, penghargaan/ reward dalam pengelolaan lingkungan hidup, komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan.
3. Terciptanya pengetahuan dan kesadaran (warga sekolah) dalam pelestarian lingkungan melalui kegiatan-kegiatan belajar mengajar dengan harapan keterlibatan warga sekolah meningkat (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (Sekolah menjadi tempat yang nyaman untuk belajar dan berkegiatan).
4. Adanya komitmen dari kepala daerah dalam mewujudkan program desa bebas sampah plastik, rencana pengadaan tanah TPA Temanggung Utara, semakin bertambahnya jumlah TPS 3R dan Bank Sampah di Kabupaten Temanggung, Adanya sinergi antara pemerintah, swasta dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Kurangnya tutupan vegetasi, ruang terbuka hijau dan hutan kota di kawan perkotaan	Peningkatan tutupan vegetasi pada kawasan hutan dan lahan, menambah ruang terbuka hijau dan hutan kota di kawan perkotaan



No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
2	Bertambahnya lahan kritis serta penggunaan kawasan lindung untuk budidaya tanaman semusim	Melakukan penghijauan di lahan kritis yang ada di Kabupaten Temanggung

➤ **Prestasi / Penghargaan**

Dalam mendukung program penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, salah satu bentuk apresiasi / penghargaan yang diterima Kabupaten Temanggung yaitu penghargaan ADIWIYATA NASIONAL dan ADIWIYATA MANDIRI Tahun 2019 sebagai capaian kinerja terbinanya sekolah tingkat SMA/SMK, SMP/MTS, SD/MIN yang peduli, berbudaya dan berwawasan lingkungan dan terbentuknya forum komunikasi sekolah Adiwiyata.



b.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Misi 3

Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi

Pada Misi 3 didukung oleh 5 (lima) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa
4. Meningkatnya ketentaraman dan ketertiba umum
5. Meningkatnya kapasitas kelambagaan penanggulangan bencana

16) Sasaran strategis 16 : Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.24 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16
“Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan”

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian kinerja 2019	Renstra 2018-2023		Capaian kinerja tahun 2019 - 2023 (%)
			T	R		Target akhir 2023	Realisasi 2019	
Tingkat Konsistensi Program Pembangunan	%	100	100	97,60	97,60	100	97,60	97,60
Opini laporan keuangan pemerintah daerah	-	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EKPPD)	Angka	3,25	3,3	3,25	98,48	3,45	3,25	92,86
Persentase kegiatan yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	CC	B	B	100	BB	B	83,33



Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian kinerja 2019	Renstra 2018-2023		Capaian kinerja tahun 2019 - 2023 (%)
			T	R		Target akhir 2023	Realisasi 2019	
Pemerintah (AKIP)								
Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level	3,045	3,045	3,045	100	3,3	3,045	92,42
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Angka	3,34	3,40	3,34	98,24	3,80	3,34	87,89
Indeks Profesionalisme ASN	Angka	46	49	51,7	100	61	51,7	4,75
Indeks Manajemen Kearsipan	Angka	n.a	61	62,80	100	69	62,80	91,01
Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	%	3,75	50	73,08	100	90	73,08	81,20
					99,43			83,11

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan” pada tahun 2019 sebesar 99,43%. Hal yang mendorong tingginya persentase capaian kinerja sasaran strategis ini antara lain pada capaian untuk indikator : Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Persentase kegiatan yang tepat waktu, Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP), Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Indeks Profesionalisme ASN, Indeks Manajemen Kearsipan, dan Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu sebesar 100%, sedangkan untuk indikator : Tingkat Konsistensi Program Pembangunan baru mencapai 97,60%, Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dengan capaian 98,48%, dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) baru sebesar 98,24%.

a) Indikator Sasaran 16.1 : Tingkat Konsistensi Program Pembangunan

➤ Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja sasaran Tahun 2019 dengan target Tahun 2019



Capaian kinerja indikator tingkat konsistensi program pembangunan tahun 2019 adalah 97,6% dari target 100%. Dari 125 program dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 yang terakomodir dalam RKPD Tahun 2019 sebanyak 122 program. Terdapat 4 program dalam RPJMD yang tidak diakomodir dalam RPKD yaitu :

- Program Pengembangan Kawasan Strategis;
- Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah;
- Program pemberdayaan transmigran;
- Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa;

Terdapat 2 program dalam RKPD diluar RPJMD yaitu:

- Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa; dan
- Program pengelolaan aset desa.

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan target RPJMD Tahun 2023**

Realisasi Kinerja indikator Tingkat Konsistensi Program Pembangunan Sasaran tahun 2019 sebesar 97,60% dibandingkan Target RPJMD tahun 2023 sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 97,60%. Hal ini menunjukkan bahwa sampai dengan akhir RPJMD Tahun 2023 akan tercapai 100%.

➤ **Faktor Pendorong**

1. Faktor pendorong tercapainya target adalah dengan penggunaan aplikasi *e-planning*.



➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Penetapan RKPD tahun 2019 pada Bulan Mei 2018 yang ketika penyusunannya belum menggunakan <i>e-planning</i> sedangkan penetapan RPJMD tahun 2018-2023 pada bulan Maret tahun 2019 yang diikuti oleh penyusunan Renstra menggunakan <i>e-planning</i> . Oleh karena itu pada tahun transisi ini dimungkinkan terjadi ketidaksesuaian program dalam dokumen perencanaan,	Penyesuaian di perubahan RKPD

➤ **Prestasi / Penghargaan**

Pada Tahun 2019 Kabupaten Temanggung memperoleh penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) dengan predikat Juara 1 Provinsi Jawa Tengah dan Juara 2 Nasional, sedangkan pada tahun 2020 ini kembali memperoleh Juara 1 tingkat Provinsi Jawa Tengah



b) Indikator 16.2 Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan



Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 disebutkan bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan

pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK-RI, yakni opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*).

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Lampiran 1 Kerangka Konseptual Pemeriksaan menyebutkan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan yang wajib



dipedomani oleh BPK dan/atau Pemeriksa. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) membandingkan kesesuaian LKPD dengan prinsip akuntansi yang diterapkan, sehingga dalam hal tidak terdapat kesalahan yang material maka opini yang diberikan adalah WTP.



Gambar 3. ... Penyerahan Opini WTP

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan target Tahun 2019**

Pada Indikator kinerja “Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), untuk tahun 2019 realisasinya masih sama dengan kondisi Tahun 2018, bahkan sejak tahun 2012 Kabupaten Temanggung selalu berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Memperoleh opini WTP yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk Tahun 2014 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Temanggung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas. Hal tersebut berarti LKPD Kabupaten Temanggung telah disajikan wajar, namun terdapat beberapa hal yang masih harus dijelaskan yaitu tentang penerapan akuntansi berbasis akrual pada Tahun 2014 yang memberikan dampak penyajian kembali akun-akun keuangan pada laporan keuangan yang berakhir pada 31



Desember 2013 dan aset yang tercantum di neraca tanggal 31 Desember 2014

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan target RPJMD Tahun 2023**

Dengan realisasi kinerja yang telah tercapai 100% di tahun 2019, maka target akhir RPJMD yang telah ditetapkan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sangat mungkin akan tercapai. Sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Temanggung memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan, dan secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan Standar Audit Pemerintah (SAP), maka pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan dan akuntabel. Meskipun masih ada beberapa temuan, melalui Inspektorat beberapa Perangkat Daerah segera menindaklanjutinya sehingga kekurangan yang ada bisa diminimalisir. Berikut kami sampaikan data temuan hasil pemeriksaan oleh BPK RI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dari tahun 2013 sampai dengan 2018.

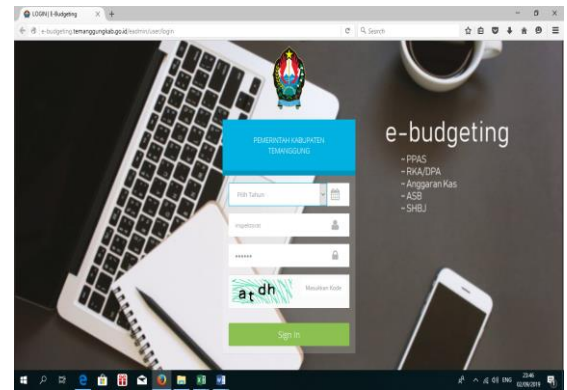
Tabel 3.25 Rekapitulasi Temuan, Rekomendasi Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah		Tindak Lanjut					
		Temuan	Rek	Selesai		Dalam Proses		Belum	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2014	22	82	75	91	7	9	-	-
2	2015	14	28	26	93	2	7	-	-
3	2016	20	82	70	85	12	15	-	-
* 4	2017	9	27	20	74	7	26	-	-
) 5	2018	18	61	58	95	3	5	-	-

Untuk tahun 2019 sampai dengan disusunnya LKjIP, LKPD masih dalam proses pemeriksaan BPK,



Untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah membangun sistem informasi perencanaan dan penganggaran (*e-planning* dan *e-budgeting*)



Gambar 3.33 Aplikasi e-budgeting

yang terintegrasi sehingga perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah lebih efektif dan efisien.

➤ **Faktor Pendorong**

1. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektifitas sistem pengendalian intern;

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Keterlambatan laporan keuangan dari perangkat daerah	Sosialisasi dan pendampingan kepada perangkat daerah dalam penyusunan laporan

c) **Indikator Kinerja 16.3 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan target Tahun 2019**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2019 sebesar 3,25% (merupakan kondisi terakhir data realisasi tahun 2018), sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 3,3% maka capaiannya adalah 98,48%.



➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan target RPJMD Tahun 2023**

Realisasi kinerja Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2019 sebesar 3,25% (merupakan kondisi terakhir data realisasi tahun 2018) bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2023 sebesar 3,45% maka capaiannya adalah 92,86%.

➤ **Faktor Pendorong**

1. Faktor-faktor yang mendorong tercapainya indikator ini diantaranya adalah ketercapaian kinerja pembangunan daerah di semua urusan; dan
2. Penyajian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik yang disertai dengan data dukung yang lengkap dan akurat. Sedangkan faktor penghambatnya diantaranya penyusunan LPPD Perangkat Daerah yang belum tepat waktu dan belum disertai data dukung yang lengkap. Tindak lanjut melakukan koordinasi dengan Bappeda dan BKPSDM EKPPD terhadap LPPD, dilakukan dengan menggunakan cara *Desk Evaluation* dan *Common Sense Survey* (verifikasi lapangan). Berikut kami sampaikan data penilaian EKPPD Kabupaten Temanggung dari tahun 2013 sampai dengan 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.26 Nilai EKPPD Kabupaten Temanggung

No	Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Peringkat	26	89	22	58	24
2	Nilai	3.10	3.07	3.34	3.16	3.05
3	Kategori	ST	ST	ST	ST	ST
4	Kepmenda gri	No. 120-4761 Tahun 2014	No. 800-35 Tahun 2016	No. 120-10421 Tahun 2016	No. 100-53 Tahun 2018	Belum ditetapkan dalam SK
5	Tingkat	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	PROVINSI

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung, 2019



Berdasarkan tabel di atas, Nilai EKPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2013 sampai Tahun 2017 berada pada posisi nilai di atas 3 dengan kategori Sangat Tinggi (ST), hal ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Temanggung berkinerja sangat tinggi berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk data di tahun 2019 masih sama dengan data di tahun 2017.

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP) masih rendah	Menyusun SOP sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
2	Rasio PNS SKPD terhadap PNS se Kabupaten masih rendah	Agar diisi oleh PNS yang telah mamenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan kepemimpinan
3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan masih sedikit	Agar diisi oleh PNS yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
4	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan masih sedikit;	Agar anggaran setiap SKPD disesuaikan proporsinya dengan belanja APBD;
5	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD masih rendah	Agar meningkatkan proporsi belanja modal terhadap belanja SKPD
6	Belanja modal terhadap total belanja SKPD masih rendah;	Agar meningkatkan proporsi belanja belanja pemeliharaan terhadap total belanja barang dan jasa SKPD



No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
7	Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD masih rendah;	Agar meningkatkan proporsi belanja pemeliharaan terhadap total belanja SKPD
8	Jumlah fasilitas / prasarana informasi masih kurang;	Peningkatan fasilitas prasarana informasi;
9	Keberadaan survey kepuasan masyarakat belum maksimal	Agar dilaksanakan survey kepuasan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku

d) Indikator 16.4 Persentase Kegiatan Yang Tepat waktu

➤ Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja sasaran Tahun 2019 dengan target Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Kegiatan Yang Tepat Waktu Kabupaten Temanggung tahun 2019 sebesar 100, sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 100% maka capaiannya adalah 100%.

➤ Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja sasaran Tahun 2019 dengan target RPJMD Tahun 2023

Realisasi kinerja Persentase Kegiatan Yang Tepat waktu tahun 2019 sebesar 100% bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2023 sebesar 100% maka capaiannya adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Persentase Kegiatan Yang Tepat Waktu Kabupaten Temanggung telah tercapai 100% di akhir periode RPJMD tahun 2023.



➤ **Faktor Pendorong**

1. Koordinasi rutin antara pihak terkait yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan serah terima kegiatan;
2. Perencanaan kegiatan dilakukan secara matang dan lebih awal;
3. Penyampaian DRUP dari Perangkat Daerah tepat waktu;
4. Proses pemilihan penyedia sesuai jadwal yang ditetapkan;
5. Pelaksanaan pekerjaan didukung oleh manajemen personil yang cukup;
6. Pengendalian pelaksanaan pekerjaan melalui mitigasi, monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan khususnya terhadap pekerjaan yang dimungkinkan mengalami keterlambatan;

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Perencanaan yang belum maksimal dan dilakukan pada tahun berjalan sehingga mengakibatkan keterlambatan proses persiapan pengadaan oleh PPK	Pendampingan intensif kepada Perangkat Daerah terkait perencanaan pengadaan, desk review pemilihan
2	Proses pemilihan penyedia yang tidak lancar yang mengakibatkan tender ulang	
3	Pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia yang tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan	



e) Indikator 16.5 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

➤ Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja sasaran Tahun 2019 dengan target Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Kabupaten Temanggung tahun 2019 sebesar B, sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu B maka capaiannya adalah 100%.

Pada tahun 2019 Kabupaten Temanggung telah memperoleh nilai 60,16 atau kategori B. Jika dilihat dari capaian kinerjanya maka capaian nilai SAKIP tahun 2018 yang diberikan di tahun 2019 telah mendapatkan predikat B dibagi target di tahun 2019 yaitu B, sehingga diperoleh capaian kinerja 100%.

➤ Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan target RPJMD Tahun 2023

Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu BB, maka baru tercapai 83,33%. Faktor-faktor pendorong yang mendukung ketercapaian indikator ini diantaranya adalah telah diterapkannya sistem *e-planing* dan *e-budgeting* di seluruh Perangkat Daerah. Sedangkan faktor penghambat yang menjadi permasalahan adalah perangkat daerah belum maksimal dalam mengaplikasikan sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan secara keseluruhan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Maka tindak lanjut yang diperlukan adalah perangkat daerah harus lebih mengoptimalkan penerapan *e-planning* dan *e-budgeting*, serta mensinergikan dan mengintegrasikan eSakip dengan *e-planing* dan *e-budgeting*;

Beberapa unsur penilaian dalam AKIP telah mengalami kenaikan baik dari segi perencanaan, pengukuran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Jika dilihat target akhir RPJMD, maka untuk SAKIP ini diperkirakan dapat tercapai pada



penilaian SAKIP untuk Tahun depan predikat nilai BB (nilai 70) dengan upaya keras. Berikut kami sampaikan tabel penilaian SAKIP Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

Tabel 3.27 Hasil penilaian SAKIP

No	Indikator	Bobot	2014	2015	2016	2017	2018
1	Perencanaan Kinerja	30	14,80	16,39	18,11	19,22	19,66
2	Pengukuran Kinerja	25	9,53	10,95	14,20	13,32	13,42
3	Pelaporan Kinerja	15	8,67	10,01	9,49	9,72	9,89
4	Evaluasi	10	4,23	4,40	4,83	5,78	5,91
5	Capaian Kinerja	20	9,24	10,02	11,69	10,99	11,28
Nilai hasil evaluasi		100	46,47	51,77	58,32	59,05	60,16
Predikat			C	CC	CC	CC	B

Sumber : Bagian Ortala Setda Tahun 2020

Berdasarkan Penilaian dari Kementerian PAN dan RB menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja di Kabupaten Temanggung cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan dalam memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban dan perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar. Namun demikian masih ada beberapa catatan yang harus diperbaiki, antara lain :

1. Perencanaan Kinerja

- Sistem perencanaan kinerja berbasis teknologi informasi yaitu: e-planning, e-bugeting, dan e – sakip belum sepenuhnya terintegrasi;
- Beberapa perangkat daerah masih perlu penyempurnaan indikator kinerja tujuan dan sasaran terkait dengan relevansi, formulasi pengukuran dan kecukupan indikator seperti: Inspektorat, Bappeda, BPPKAD, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;



2. Pengukuran Kinerja

- Penjabaran kinerja belum dimanfaatkan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja di tingkat penanggungjawab program dan kegiatan juga belum dilakukan sampai tingkat individu pegawai sehingga keselarasan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan baru sebatas memonitor capaian program dan kegiatan secara fisik dan serapan anggaran belum digunakan untuk mengukur capaian hasil (outcome) program serta keselarasan program dan kegiatan dalam mendukung capaian sasaran strategis organisasi.

3. Pelaporan Kinerja

- Kualitas pelaporan informasi kinerja pada Pemda dan beberapa perangkat daerah masih perlu ditingkatkan khususnya mengenai informasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang dikaitkan dengan pencapaian target kinerja serta pemanfaatan laporan kinerja oleh pimpinan perangkat daerah sebagai *feedback* dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja

4. Evaluasi Internal

- Beberapa rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum ditindaklanjuti oleh sebagian pimpinan OPD secara optimal untuk peningkatan budaya berkinerja tinggi di tingkat OPD, dan evaluasi program yang dilakukan belum mencakup keseluruhan program dan kegiatan, sehingga masih memiliki potensi terjadinya inefisiensi dan inefektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat OPD.

5. Capaian Kinerja

- Beberapa target indikator kinerja yang target capaiannya di bawah 100%, yaitu sebesar 9 indikator kinerja (31,03%) capaian kinerjanya berkisar 51,37% - 99,33%



Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai AKIP di Kabupaten Temanggung diantaranya adalah :

1. Bappeda dan pimpinan perangkat daerah agar melakukan reviu secara berkala atas Renstra Perangkat Daerah terkait kualitas perumusan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja serta memanfaatkan hasil reviu untuk perbaikan kinerja organisasi dan penyusunan struktur organisasi;
2. Bappeda dan pimpinan perangkat daerah agar mengembangkan aplikasi manajemen kinerja secara terintegrasi, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja dan penganggaran sehingga dapat mengoptimalkan penerapan *performance based budgeting* secara konsisten di tingkat perangkat daerah
3. Pimpinan perangkat daerah agar memanfaatkan cascading kinerja dalam menyusun Perjanjian Kinerja di tingkat penanggungjawab program dan kegiatan serta melakukan *cascading* kinerja organisasi setiap perangkat daerah hingga ke level individu serta sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* sehingga mendorong terwujudnya *system merit*;
4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja baik di tingkat Pemda maupun perangkat daerah antara lain dengan menyajikan analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja serta memastikan agar pimpinan perangkat daerah memanfaatkan laporan kinerja sebagai *feedback* dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja;
5. Inspektorat agar meningkatkan kuantitas (cakupan) dan kualitas evaluasi internal terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah serta Pimpinan Perangkat Daerah agar menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan implementasi SAKIP di OPD;



6. Bappeda dan Pimpinan OPD agar meningkatkan kualitas dan cakupan evaluasi program dengan mereviu program, kegiatan dan komponen anggaran pada seluruh OPD untuk memastikan alokasi anggaran dapat focus pada pencapaian sasaran strategis pembangunan.

➤ **Faktor Pendorong**

Telah diterapkannya sistem E-Sakip, E-Planning dan E-Budgeting di perangkat daerah

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Perangkat Daerah belum maksimal dalam mengaplikasikan e-Sakip secara keseluruhan yang dimulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan	Perangkat Daerah harus lebih mengoptimalkan penerapan e-Planning, e-Budgeting, serta mensinergikan dan mengintegrasikan e-Sakip dengan e-planing dan e-budgeting
	Belum dilaksanakannya verifikasi hasil laporan LKJIP yang tepat kepada perangkat daerah	Melaksanakan Desk dan Pendampingan kepada pengampu penyusun LKJIP
	Beberapa Renstra dan IKU Perangkat Daerah belum sesuai dengan RPJMD	Melaksanakan Perbup renstra dan Iku didampingi Bappeda

f) Indikator 16.6 Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan target Tahun 2019**



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Temanggung tahun 2019 sebesar 3,045%, sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 3,045 maka capaiannya adalah 100%

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan target akhir periode RPJMD**

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD, realisasi pada tahun 2019 telah mencapai 92,42% sehingga target yang telah ditetapkan diperkirakan dapat tercapai.

Kabupaten Temanggung telah mencapai SPIP level 3 yaitu terdefinisi atau telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan pengendalian intern dan perlu untuk terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

Secara garis besarnya, pencapaian SPIP level 3 dipengaruhi oleh:

1. Kenaikan Nilai Unsur Lingkungan Pengendalian

Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan suatu kebijakan/prosedur yang mengatur standar kompetensi untuk seluruh jabatan managerial.

2. Kenaikan Nilai Unsur Kegiatan Pengendalian

Pemerintah Kabupaten Temanggung telah mengimplementasikan kebijakan/prosedur terkait pengelolaan fisik atas asset/barang milik daerah (BMD) yang didukung oleh aplikasi dan telah dilakukan penyesuaian secara berkala, Laporan Keuangan Pemkab Temanggung mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3. Kenaikan Nilai Unsur Pemantauan

Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah melaksanakan evaluasi terpisah, baik secara internal oleh Inspektorat terkait pengawasan program/kegiatan pemerintah daerah, revidi



laporan keuangan dan laporan kinerja dan secara eksternal oleh BPK maupun Kementerian PAN dan RB terkait audit laporan keuangan dan evaluasi laporan kinerja.

Pencapaian Indikator Sasaran Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didukung oleh melaksanakan program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah.

➤ **Faktor Pendorong**

1. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan SPIP:
 - Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
 - Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
2. Pendampingan atas pelaksanaan SPIP oleh APIP dan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP;	Sosialisasi secara kontinyu tentang SPIP di perangkat daerah
2	Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) belum disusun	<i>refresh</i> atas informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah

➤ **Prestasi/Penghargaan**

Prestasi dan penghargaan yang diraih Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019 pada indikator sasaran ini adalah:



1. Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Temanggung dinyatakan pada level 3 (tiga)/Integrated berdasarkan Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: LQAPIP-1056/PW11/6/2019, tanggal 18 Desember 2019, perihal Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 Inspektorat Kabupaten Temanggung.

2. Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung

Nilai maturitas SPIP Kabupaten Temanggung dinyatakan pada Level 3 (terdefinisi) berdasarkan Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: LQA-499/PW11/3.2/2018, tanggal 5 September 2018, perihal Laporan Pelaksanaan *Quality Assurance* (QA) atas penilaian maturitas SPIP pada Kabupaten Temanggung.



Foto: Penyerahan Sertifikat Maturitas SPIP



Foto: Sertifikat Maturitas SPIP

g) Indikator Sasaran 16.7 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

- **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan target Tahun 2019**



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kabupaten Temanggung tahun 2019 sebesar 3,34% sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 3,4% maka capaiannya adalah 98,24%.

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja sasaran Tahun 2019 dengan target akhir periode RPJMD**

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD, realisasi pada tahun 2019 telah mencapai 87,89% sehingga target yang telah ditetapkan diperkirakan dapat tercapai.

Data tersebut merupakan kondisi Tahun 2018 dikarenakan sampai dengan akhir tahun 2019 belum ada angka yang dilaporkan. Kegiatan penilaian ini dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik, dan hasilnya disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Nilai IPAK yang terdapat pada penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2018 mendapatkan Nilai 3,34 secara umum mengalami kenaikan dari indeks tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin berperilaku anti korupsi. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan gambaran integritas pemberi layanan, apakah anti korupsi atau tidak yang dilakukan melalui survei dan *assessment*.

Pencapaian Indikator Sasaran Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) didukung oleh program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawas.

➤ **Faktor Pendorong**

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien;
2. Adanya peraturan perundang-perundangan tentang pencegahan korupsi;
3. Penerapan teknologi informasi yang baik (e-planning, e-budgeting, laporan pengaduan, laporan spam, sms gateway);



4. Nilai kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang memadai sesuai survey yang telah di lakukan.

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Pengendalian risiko organisasi belum memadai	Bimtek dan pendampingan penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara rutin kepada Perangkat daerah, mengingat belum semua perangkat daerah memahami penyusunan Risk Register dan RTP
2	Belum sepenuhnya menerapkan reward dan punishment dalam organisasi	Evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian
3	Organisasi belum sepenuhnya melaksanakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM).	Monev PMPRB

h) Indikator Sasaran 16.8 Indeks Profesionalisme ASN

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan target Tahun 2019**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Indeks Profesionalisme ASN Kabupaten Temanggung tahun 2019 sebesar 51,7%, sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 49 maka capaiannya adalah 100%

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan target akhir periode RPJMD**



Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD, realisasi pada tahun 2019 telah mencapai 84,75% sehingga target yang telah ditetapkan diperkirakan dapat tercapai.

Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dilaksanakan secara mandiri dengan penghitungan manual. Metode pengambilan data kepegawaian yang dibutuhkan untuk pengukuran dilakukan dengan cara menyebarkan formulir pengisian Indeks Profesionalisme ASN kepada pengelola kepegawaian di seluruh OPD.

Secara terperinci, hasil pengukuran Indeks Profesionalisme ASN dapat dilihat di dalam tabel berikut:

Tabel 3.28 Rekapitulasi Indeks Profesionalisme ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No.	OPD	JUMLAH RES PONDEN	DIMENSI IP				TOTAL
			Kualifikasi 25%	Kompetensi 40%	Kinerja 30%	Disiplin 5%	
1	SEKRETARIAT DAERAH	136	10,096	15,11	25	5	52,206
2	SEKRETARIAT DPRD	24	10,541	25,833	25	5	66,375
3	BAPPEDA	42	15,166	16,369	22,619	4,952	59,107
4	BKPSDM	39	13,513	9,679	25	5	53,192
5	DINPERMADES	33	12,788	5,909	25	5	47,412
6	INSPEKTORAT	28	14,5	31,25	25	4,928	75,678
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	114	4,412	2,5	25,044	5	36,956
8	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH						
9	DPPKBPPPA	30	11,933	14,667	25	4,867	56,467
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	26	12,23	4,038	25	5	46,269
11	BPBD	12	11,833	5	25	5	46,833
12	DINDUKCAPIL	29	10,31	10	25	5	50,31
13	DINAS KESEHATAN	68	12,412	16,067	25	5	58,478
14	BPPKAD	48	13,0625	11,875	25	4,9375	54,875
15	DINDIKPORA	79	11,316	9,652	25,063	4,949	50,981
16	DINAS PERHUBUNGAN	47	6,702	14,042	25	4,936	50,681
17	DINPERINDAGKOP UKM	119	6,034	4,85	25	5	40,886
18	DINTANPANGAN	140	12,035	19,089	25	5	61,125
19	DINAS SOSIAL	30	13,9	23,75	25	4,866	67,516
20	DINAS TENAGA KERJA	40	10,875	19,562	25	5	60,437
21	DPUPKP	13	15,769	10,769	30	5	61,538
22	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	56	10,732	12,321	22,321	5	50,375
23	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						
24	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	29	11,621	6,724	23,276	5	46,621
25	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12	9,75	15,833	26,667	5	57,25
26	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	48	9,729	5	25	4,875	44,601
27	DPMPPTSP	27	14,482	13,518	25	5	58
28	KECAMATAN BANSARI	19	7,211	19,605	25	5	56,816
29	KECAMATAN BEJEN	18	9,333	6,388	25	4,777	45,5
30	KECAMATAN BULU	14	8,928	14,107	30	4,571	57,607
31	KECAMATAN CANDIROTO	18	7,278	7,083	25	5	44,361
32	KECAMATAN GEMAWANG	18	10,833	1,667	25	5	42,5
33	KECAMATAN JUMO	17	9,353	12,353	24,412	5	51,118
34	KECAMATAN KALORAN	14	9,428	4,285	23,285	4,857	41,857
35	KECAMATAN KANDANGAN	17	8,647	5,294	25	5	43,941
36	KECAMATAN KEDU	17	11,176	16,47	25	4,675	57,412
37	KECAMATAN KLEDUNG	19	9,789	1,578	25	5	41,368
38	KECAMATAN KRANGGAN						
39	KECAMATAN NGADIREJO	30	8,433	2	25	5	40,433
40	KECAMATAN PARAKAN	18	7,833	28,055	25,278	5	66,167
41	KECAMATAN PRINGSURAT	18	7,222	4,72	25	4,833	41,778
42	KECAMATAN SELOPANG	18	8,389	10	25	5	48,389
43	KECAMATAN TEMANGGUNG	148	7,473	8,497	24,932	4,959	45,861
44	KECAMATAN TEMBARAK	15	10,067	9,333	25	5	49,4
45	KECAMATAN TLOGOMULYO	19	9,789	3,947	25	5	43,736
46	KECAMATAN TRETEP	16	10	20,156	25	5	60,156
47	KECAMATAN WONOBOYO	16	7,875	5,9375	25	5	43,812
		1738	454,7985	504,8825	1102,897	217,9825	2276,381
	REKAP NILAI IP		10,3363295	11,4746023	25,0658409	4,95414773	51,73593

Sumber: BKPSDM Kabupaten Temanggung



Pencapaian Indikator Sasaran Indeks Profesionalisme ASN didukung oleh program:

1. Program pengelolaan administrasi kepegawaian;
2. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; dan
3. Program pembinaan, kesejahteraan aparatur, dan informasi kepegawaian.

➤ **Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat**

1. Update data kepegawaian yang dilakukan oleh pengelola kepegawaian di OPD; dan
2. Meningkatnya jumlah responden/PNS yang mengisi data IP (dari 1479 orang di tahun 2018 menjadi 1.738 orang di tahun 2019).

➤ **Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Belum semua PNS mengisi data IP (baru 26% dari total jumlah PNS	Sosialisasi dan mewajibkan ASN untuk mengisi data IP

i) **Indikator Sasaran 16.9 Indeks Manajemen Kearsipan**

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja sasaran Tahun 2019 dengan target Tahun 2019**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Indeks Manajemen Kearsipan Kabupaten Temanggung tahun 2019 sebesar 62,80%, sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 61 maka capaiannya adalah 100%.

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja sasaran Tahun 2019 dengan target akhir periode RPJMD**

Realisasi kinerja Indeks Manajemen Kearsipan tahun 2019 sebesar 62,80% bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2023 sebesar 69% maka capaiannya adalah 91,01%. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Manajemen ASN Kabupaten Temanggung akan tercapai 100% di akhir periode RPJMD tahun 2023.



Indeks Manajemen Kearsipan adalah nilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang diukur melalui audit kearsipan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Audit kearsipan internal dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung selaku Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Temanggung kepada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung, sedangkan Audit kearsipan eksternal dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung.

Indeks Manajemen Kearsipan terdiri dari laporan audit kearsipan eksternal dan laporan audit kearsipan internal sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.29 Indeks Manajemen Kearsipan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2019
Hasil Audit Internal	49,60
Hasil Audit Eksternal	76
Indeks Manajemen Kearsipan	62,80

Hasil audit kearsipan eksternal yang dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung tahun 2019 dengan nilai 76 dengan kategori BB (sangat baik) sehingga ada peningkatan dari tahun sebelumnya.

Hasil audit internal oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung terhadap 47 Perangkat Daerah dengan nilai rata-rata 49,60. Pencapaian Indikator Sasaran Indeks Manajemen Kearsipan didukung oleh program pengelolaan dan pelestarian arsip daerah.



➤ **Faktor Pendorong**

bimtek, pembinaan dan monitoring kearsipan.

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Kurangnya sarpras pendukung	Menambah fasilitas dan sarana prasarana perpustakaan
		Menambah diversifikasi layanan perpustakaan (layanan: internet, kartu anggota, penelusuran informasi, referensi, sirkulasi, perpustakaan keliling, cinema perpustakaan, pendidikan pemakai, pembelajaran anak, e-book, naskah kuno, karya dan terbitan lokal Temanggung, story telling) guna promosi perpustakaan
		Mengoptimalkan pengadaan bahan perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (mengadakan survei kebutuhan bahan perpustakaan pembaca, membuat kajian kebutuhan bahan perpustakaan pembaca).



No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
		Mengoptimalkan pengadaan bahan perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (mengadakan survei kebutuhan bahan perpustakaan pembaca, membuat kajian kebutuhan bahan perpustakaan pembaca).
		Menambah cakupan pembinaan dan bintek tentang pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
		Menambah sarana dan prasarana pengelolaan arsip

j) Indikator Sasaran 16.10 Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja sasaran Tahun 2019 dengan target Tahun 2019**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu Kabupaten Temanggung tahun 2019 sebesar 73,08, sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 50 maka capaiannya adalah 100%.



➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan target Tahun 2019**

Realisasi kinerja indikator Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu tahun 2019 sebesar 73,08, sehingga bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 90% maka capaiannya adalah 81,20

➤ **Faktor pendorong :**

Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan perangkat daerah pengusul Raperda dan komitmen dari DPRD untuk menyelesaikan pembahasan Raperda yang telah disetujui didalam Propemperda.

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Pengiriman Raperda dari perangkat daerah tidak sesuai dengan jumlah Propemperda yang telah disepakati antara DPRD dan pemerintah daerah.	Koordinasi dengan pengusul dalam bantu rapat-rapat dengan Badan di DPRD yang membidangi pembentukan peraturan daerah dan Badan lain bila dianggap perlu.

17) Sasaran strategis 17 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:



Tabel 3.30 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17
“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”

NO	Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019-2023 (%)
				T	R		T 2023	R 2019	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	angka	2,04	2,50	2,82	100	3,5	2,82	80,57
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	angka	77,90	78,30	80,03	100	80,00	80,03	100
3	Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggara Layanan Publik	angka	76	77	76	98,70	81	76	93,83
Rata-rata capaian kinerja						99,56			91,46

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019

Rata-Rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” pada Tahun 2019 sebesar 99,56%, secara umum dapat dikatakan sangat baik. Hal ini yang mendorong tingginya prosentase capaian kinerja sasaran strategis ini antara lain pada capaian untuk indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Nilai Keterbukaan Informasi Publik, sebesar 100%. Sedangkan untuk indikator Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggara Layanan Publik baru mencapai 98,70%.

a) Indikator 17.1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

➤ **Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target 2019**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Temanggung tahun 2019 sebesar 2,82, sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 2,50 maka capaiannya adalah 100%.



➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target RPJMD Tahun 2023**

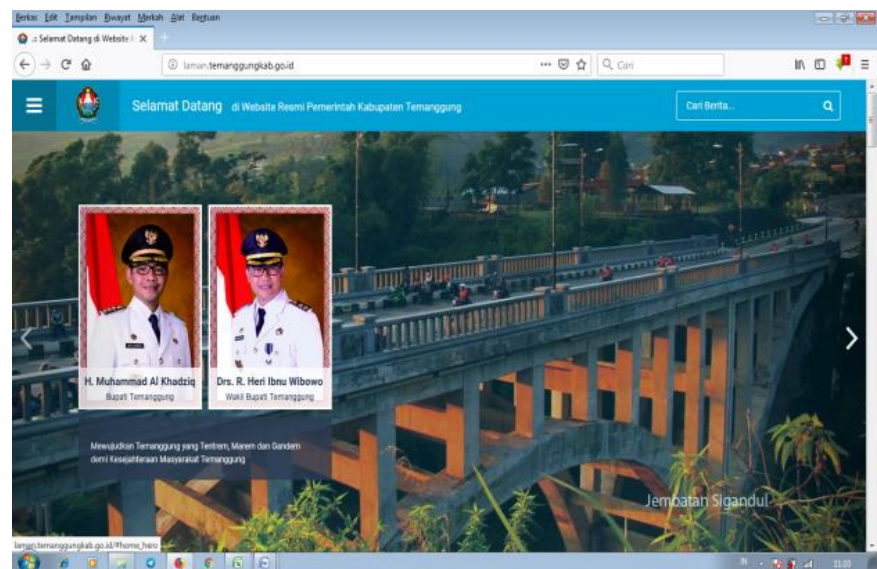
Realisasi kinerja indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2019 sebesar 2,85 bila dibandingkan target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 3,50 maka capaiannya 80,57%. Hal ini menunjukkan bahwa sampai dengan akhir RPJMD tahun 2023 akan tercapai 100% dengan upaya keras.

➤ **Faktor Pendorong**

Faktor pendorong tercapainya target Kenaikan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2019 dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya:

1. Pemerintah Kabupaten Temanggung melakukan upaya mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi memberikan aspirasi dalam pembangunan melalui kanal resmi yang dimiliki oleh Pemkab Temanggung, yaitu:

- Website Resmi Pemkab Temanggung

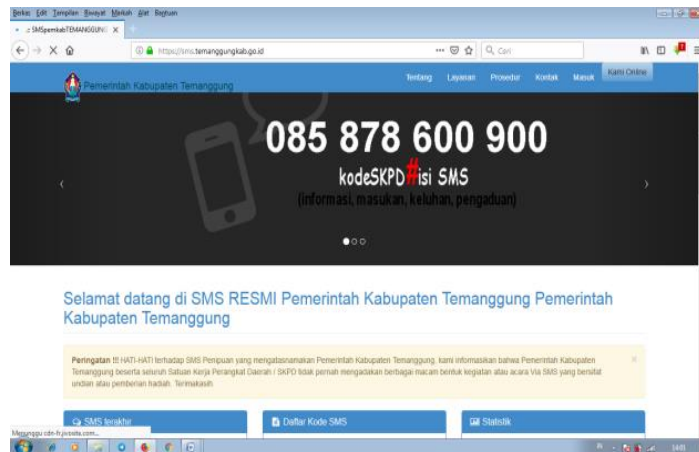


www.Temangungkab.go.id

- Surat Elektronik info@Temangungkab.go.id



- SMS Gateway dengan nomor 0857878600900



- LAPOR SP4N



- Media Sosial Resmi Pemkab Temanggung



- Menulis pada kotak saran pengaduan yang telah disediakan di semua Perangkat Daerah





Kepedulian masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, masukan, keluhan, dan saran ke kanal resmi Pemkab Temanggung sangat dinamis. Hal ini ditunjukkan dengan tabel di bawah ini:

Tabel 3.31 Penanganan Pengaduan Masyarakat

No	Tahun	Jumlah		%
		Pengaduan	Tindaklanjuti	
1	2016	1.253	1.029	82,12
2	2017	1.321	1.115	84,40
3	2018	625	591	95
4	2019	300	300	100

Sumber: Bagian Humas Setda tahun 2019

Jika dilihat dari tabel di atas pengaduan masyarakat yang masuk dari tahun ke tahun terjawab dan ditindaklanjuti dengan baik. Di tahun 2019 aduan yang masuk telah ditindaklanjuti seluruhnya 100%. Hal ini menunjukkan komitmen dari Pemkab Temanggung untuk senantiasa memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat.

- Adanya Aplikasi pendukung yang semakin lengkap dan efektif, layanan sudah semakin baik dan didukung dengan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ada.



➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Regulasi yang belum disahkan	Menunggu pengesahan regulasi
2	Infrastruktur keamanan jaringan dan data belum ada	Membangun infrastuktur keamanan jaringan dan data
3	backup kelistrikan data center belum sesuai standar	Menstandarkan data center
4	belum memiliki Disaster Recovery Center (DRC) untuk data Pemkab	
5	Standar Operasional Prosedur (SOP) belum lengkap	Melengkapi SOP yang belum ada

Pada tahun 2019 ini juga telah dikembangkan beberapa sistem informasi, sebagian aplikasi telah terintegrasi antara lain :

- Sistem Informasi Perencanaan (<http://e-planning.Temangungkab.go.id/>) integrasi dengan Sistem Informasi Penganggaran (e-budgetting)
- Sistem Informasi Penganggaran (<http://e-budgeting.Temangungkab.go.id/>) integrasi dengan e-planning
- Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (<http://e-monev.Temangungkab.go.id/>)
- Aplikasi Retribusi Pasar online (<http://eretribusipasar.Temangungkab.go.id/>), sistem pembayaran nontunai dalam membayar retribusi pedagang pasar dengan melakukan tap kartu e-retribusi pada *mesin Mpos*.
- Aplikasi Risalah DPRD (<http://e-risalah.Temangungkab.go.id/>), merupakan aplikasi pencatat risalah rapat/sidang DPRD dengan metode voice to text.



Daftar Aplikasi Sistem Informasi e-Government yang tersedia meliputi Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa sebagai berikut:

Tabel 3.32 **Tabel Aplikasi e-Government Kabupaten Temanggung**

No	Aplikasi	Fungsi	OPD	Tipe	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Website Portal Kabupaten Temanggung (Temangungkab.go.id)	Portal Informasi dan komunikasi dengan masyarakat	Bagian Humas, Setda	G2C	Link dengan Aplikasi di Data Center Pemda
2	sms Gateway Kabupaten Temanggung(sms.Temangungkab.go.id)	Pelayanan pengaduan masyarakat melalui sms	Bagian Humas, Setda	G2C	Server Colocation di Data Center Pemda
3	jdih.Temangungkab.go.id	Informasi Peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum, Setda	G2C	Server Colocation di Data Center Pemda
4	ppid.Temangungkab.go.id	Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	G2C	Server di Data Center Pemda
5	Sistem Informasi Pusat Data dan Informasi Terpadu (gandem.Temangungkab.go.id) dan sisfo pusdat (mobile app)	Pusat informasi data terpadu (integrasi data)	Dinas Komunikasi dan Informatika	G2C	Integrasi data dengan Bank Data, Data Penduduk dsb
6	data.Temangungkab.go.id	Open Data	Dinas Komunikasi dan Informatika		Integrasi data dengan data.jatengprov.go.id
7	bankdata.Temangungkab.go.id	Informasi data pembangunan	Dinkominfo	G2C	Terintegrasi dengan Gandem di Data Center
8	SIM PKB	Pelayanan PKB	Dinas Perhubungan	G2C	-
9	SIM Angkutan	Pelayanan Pengelolaan data dan Pelayanan Angkutan	Dinas Perhubungan	G2C	-
10	Aplikasi KTP-el	Pelayanan KTP elektronik	Dindukcapil	G2C	Integrasi Data dengan Aplikasi Perizinan,



No	Aplikasi	Fungsi	OPD	Tipe	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					Aplikasi Pendapatan dan Aplikasi Puskesmas, DPU dan pelayanan Lainnya
11	Sistem aplikasi pelayanan Kependudukan	Pelayanan Kependudukan (KK,KTP,NA, Surat menyurat, monografi)	Dindukcapil dan Kecamatan	G2C	Server di Dukcapil
12	Aplikasi Pemutakhiran penduduk	Pemutakhiran data penduduk	Dindukcapil dan 289 Desa/ Kelurahan	G2C	Server di Dindukcapil
13	sms center capil	Pelayanan dan pengaduan masyarakat melalui sms	Dindukcapil	G2C	Server di Dindukcapil
14	perijinan.Temangungkab.go.id	Informasi dan Pelayanan Perizinan online	DPMPTSP	G2C	Terintegrasi dengan data kependudukan di Data Center
15	SIMTAP	Pengelolaan Data Pelayanan Perizinan	DPMPTSP	G2C	Server Local DPMPTSP
16	sipd.Temanggungkab.go.id	Informasi profil daerah	Bappeda	G2C	Terintegrasi dengan Gandem di Data Center
17	Website Perangkat daerah	Informasi dan komunikasi dengan masyarakat	Seluruh OPD (48 OPD)	G2C	Terintegrasi di Data Center
18	Website Kecamatan	Informasi dan komunikasi dengan masyarakat	20 Kecamatan	G2C	Terintegrasi di Data Center
19	Pelayanan Perizinan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Informasi dan Pelayanan Perizinan Kecamatan	20 Kecamatan	G2C	Terintegrasi di Data Center
20	Sistem Informasi Desa /Website Desa / Kelurahan	Informasi dan komunikasi dengan masyarakat	266 Desa, 23 Kelurahan	G2C	Terintegrasi di Data Center



No	Aplikasi	Fungsi	OPD	Tipe	Keterangan
1	2	3	4	5	6
21	Anjungan Informasi Kepegawaian	Informasi kepegawaian untuk masyarakat	BKPSDM	G2C	Colocation Server di Data Center
22	lpse.Temanggungkab.go.id	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah online	Bagian Pembangunan, Setda	G2B	Server di Data Center, terintegrasi dengan SIRUP LKPP
23	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan	Merencanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa	Bagian Pembangunan, Setda	G2B	Terintegrasi dengan LPSE, Server di LKPP
24	Sistem Informasi Pengendalian dan Pengawasan Pos dan Telekomunikasi (cellplan.Temanggungkab.go.id)	Pelayanan permohonan rekomendasi Cell Plan untuk pendirian menara telekomunikasi	DPMPTSP	G2B	Server di Data Center
25	e-planning (e-planning.Temanggungkab.go.id)	Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	G2G	Terintegrasi dengan e-budgetting dan e-monev
26	Sistem Informasi Monitoring dan evaluasi (e-monev.Temanggungkab.go.id)	Aplikasi Monitoring dan evaluasi pembangunan	Bappeda	G2B	Terintegrasi dengan e-planning dan e-monev
27	Aplikasi Analisis Kemiskinan (simdkt.Temanggungkab.go.id)	Pengolahan data RTM	Bappeda	G2B	Server di Data Center
28	Aplikasi Mapatda (mapatda.Temanggungkab.go.id)	Pengelolaan data Pendapatan Daerah dari sektor pajak	BPPKAD	G2B	Terintegrasi dengan Data Penduduk dan GIS Server di Data Center
29	Sistem akuntansi keuangan Daerah (SIKD)	sistem akuntansi berdasar akrual	BPPKAD, Seluruh OPD, UPT/Unit Kerja	G2G	Dekstop base, Standalone
30	Aplikasi Barang Daerah (simbada.Temanggungkab.go.id)	Pencatatan Barang Daerah online untuk seluruh Perangkat Daerah	BPPKAD	G2G	Server di Data Center
31	Aplikasi Penatausahaan Keuangan	sistem Pembukuan keuangan	BPPKAD, Seluruh OPD,	G2G	Dekstop base, Standalone



No	Aplikasi	Fungsi	OPD	Tipe	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			UPT/Unit Kerja		
32	sismiop.Temangkab.go.id	Pengelolaan data PBB P2 online	BPPKAD	G2G	Terintegrasi dg Data Penduduk, GIS, Server di data Center
33	Aplikasi PBB	Pengelolaan Pembayaran PBB Kelurahan / Desa	BPPKAD, Kecamatan, Kelurahan/ Desa	G2G	Terintegrasi dengan Data Penduduk, GIS, Server di Data Center
34	SimGaji	Pengelolaan gaji pegawai	BPPKAD	G2G	Dekstop base, Standalone
35	Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan daerah (sibangda.Temangkab.go.id)	Melaporkan kegiatan maupun program semua SKPD setiap bulan	Bagian Pembangunan Setda	G2G	Terintegrasi dengan aplikasi Monev Bappeda
36	GIS RTRW	Peta RTRW	Bappeda	G2G	Dekstop base, Standalone
37	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	Pengelolaan data kepegawaian	BKPSDM	G2G	Terintegrasi dg Aplikasi Presensi & TPP, Kinerja, Server di Data Center
38	Aplikasi absensi online (absensi.Temangkab.go.id)	Pengelolaan absen dan tunjangan pegawai online	BPSDM	G2G	Integrasi dengan Mesin Presensi, SIMPEG dan TPP
39	Aplikasi jabatan fungsional /e-fungsional	Pengelolaan data jabatan fungsional	BPSDM	G2G	Intranet Server di BKPSDM
40	PCAP system	Mengetahui data PCAP	BPSDM	G2G	Intranet Server di BKPSDM
41	Aplikasi Pelayanan Satu Pintu	Pelayanan kepegawaian satu pintu online	BPSDM	G2G	Colocation Server di Data Center
42	Aplikasi Pelayanan Keterangan dan Ijin Belajar (Sikejar)	Pelayanan Keterangan dan Ijin Belajar	BPSDM	G2G	Intranet Server di BKPSDM
43	Aplikasi Penyusunan Formasi Pegawai (e-formasi)	Penyusunan Formasi Pegawai	BPSDM	G2G	Intranet Server di BKPSDM
44	Aplikasi pengelolaan data Diklat Pegawai (e-diklat)	Pengelolaan data Penghargaan Diklat Pegawai	BPSDM	G2G	Intranet Server di BKPSDM



No	Aplikasi	Fungsi	OPD	Tipe	Keterangan
1	2	3	4	5	6
45	Sisfo Setyalencana	Pengelolaan data Penghargaan Pegawai	BPSDM	G2G	Intranet Server di BKPSDM
46	Aplikasi Pengelolaan kasus pegawai (e-Kasus)	Pengelolaan data kasus pegawai	BPSDM	G2G	Intranet Server di BKPSDM
47	Aplikasi Baperjakat	Pengolahan data bahan Bapperjakat	BPSDM	G2G	Intranet Server di BKPSDM
48	e-Filling	Pengelolaan Dokumen File Pegawai	BPSDM	G2G	Intranet Server di BKPSDM
49	Simpedes	Pengolahan data Perangkat Desa	Bagian Pemdes Setda	G2G	Intranet Server di Bagian Pemdes
50	Sistem Informasi Pelaporan Terpadu	pelaporan online dari Puskesmas setiap bulan	Dinas Kesehatan	G2G	Colocation Server di Data Center
51	Sistem tanaman pangan	data base tanaman pangan	Dintanpangan	G2G	-
52	Sistem informasi pangan strategis	data base tanaman pangan	Dintanpangan	G2G	-
53	Sistem Informasi statistik hortikultura	Pengolahan data statistik hortikultura	Dintanpangan	G2G	-
54	e-office.Temanggung kab.go.id	Surat Online	Dinkominfo	G2G	Terintegrasi di Data Center
55	tpp.Temanggunkab.go.id	Pengelolaan TPP berdasar Kelas Jabatan	Bagian Ortala Setda	G2G	Intergrasi dengan Simpeg dan Aplikasi Kinerja
56	kinerja.Temanggunkab.go.id	Pengelolaan kinerja harian pegawai	Bagian Ortala Setda	G2G	Intergrasi dengan Simpeg dan Aplikasi TPP
57	kinerja.Temanggunkab.go.id/anjab	Pengelolaan Analisa jabatan dan Analisa Beban Kerja	Bagian Ortala Setda	G2G	Intergrasi dengan Simpeg
58	Aplikasi Perhitungan Neraca Bahan Makanan	Perhitungan Neraca Bahan Makanan	Dintanpangan	G2G	Belum terintegrasi di Data Center
59	Aplikasi Pemetaan SKPG	Pemetaan SKPG	Dintanpangan	G2G	Belum terintegrasi di Data Center
60	Aplikasi Pemetaan Rawan Pangan	Pemetaan Rawan	Dintanpangan	G2G	Belum terintegrasi di



No	Aplikasi	Fungsi	OPD	Tipe	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Pangan			Data Center
61	Aplikasi Pola Pangan Harapan (PPH)	Data Pola Pangan Harapan (PPH)	Dintanpangan	G2G	Belum terintegrasi di Data Center
62	SIM TP	Pengolahan data statistik Ketahanan Pangan	Dintanpangan	G2G	Belum terintegrasi di Data Center
63	Sistem Keudes	Pengelolaan dan pelaporan keuangan Desa	Desa	G2G	Dekstop base Standalone
64	Aplikasi Profil Desa	penyusunan dan pendayagunaan data profil desa/kelurahan	Dinpermades, Desa/Kelurahan	G2G	Belum terintegrasi di Data Center
65	SIM Perlengkapan Jalan	Pelayanan Pengelolaan data Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan	G2G	Intranet Server di Dishub
66	Dapodik	Data Pokok Pendidik	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	G2G	
67	SIK Konsolidasi	Konsolidasi data penduduk	Dindikcapil, Desa	G2G	Server di Dindikcapil
68	SIMWAS	Manajemen Informasi pengawasan	Inspektorat	G2G	Colocation Server di Data Center
69	Arsip digital	Digitalisasi arsip	Dinarpus	G2G	Intranet server di Dinarpus
70	Otomasi Perpustakaan Slim 7 Cendana	Pelayanan perpustakaan daerah	Dinarpus	G2G	Intranet server di Dinarpus
71	Aplikasi SENAYAN	Manajemen perpustakaan	Dinarpus	G2G	Intranet server di Dinarpus
72	SPIPISE	Pengolahan data penanaman modal	DPMPSTP	G2G	Intranet server di DPMPSTP
73	Aplikasi pendataan industri kecil dan menengah	pendataan industri kecil dan menengah	Disperindagkop dan UMKM	G2G	Intranet server di Disperindagkop dan UMKM
74	SIKtoAFis	sinkronisasi data SIK dan e-KTP	Dindikcapil	G2G	Server di Dindikcapil



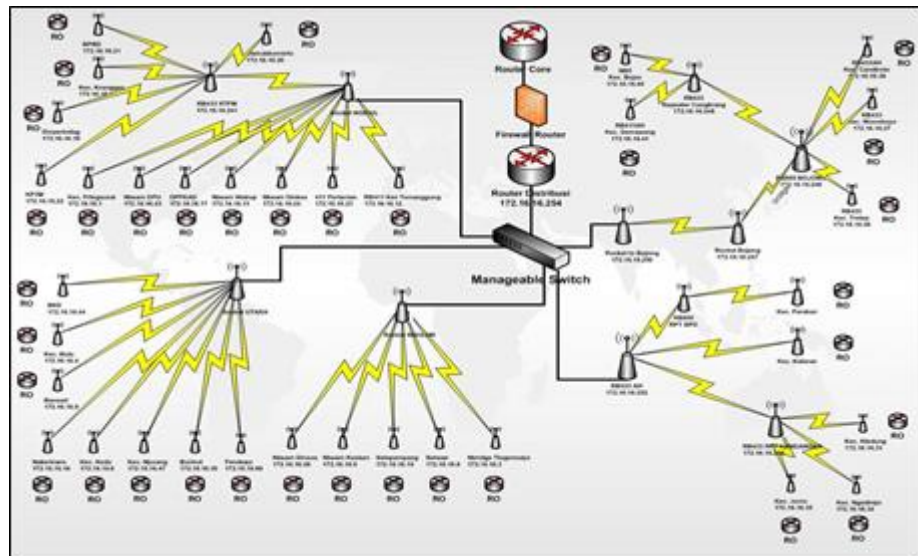
No	Aplikasi	Fungsi	OPD	Tipe	Keterangan
1	2	3	4	5	6
75	SIMRS/Billing System	Pelayanan pasien	RSUD	G2C	Intranet server di RSUD
76	SIMPUS (dashboardsimpus.Temanggungkab.go.id)	Sistem Informasi Pelayanan Pasien Puskesmas	Seluruh Puskesmas	G2C	Colocation di Data Center
77	Sistem Informasi PMKS dan PSKS	Pengolahan data PMKS dan PSKS	Dinas Sosial	G2G	Server di Dinas Sosial
78	GIS Pertanian	Informasi data spasial Pertanian	Dintanbunhut	G2G	Desktop base, Standalone
79	SimDPU (Smart Office)	Portal Sistem Informasi DPUPKP	DPUPKP	G2G	Intranet server di DPUPKP
80	tataruang-dpupkp.Temanggungkab.go.id	Sistem Informasi Tata Ruang	DPUPKP	G2G G2C	Hosting di Datacenter
81	SIM Perparkiran	Pengelolaan data parkir	Dinas Perhubungan	G2G	Intranet Server di Dishub
82	Prowasdes	Aplikasi pengawasan Laporan Keuangan Desa	Kecamatan Kranggan	G2G	Colocation Server di Data Center
83	Aplikasi Ketenagakerjaan	Mengetahui Tingkat pengangguran penduduk	Disnaker	G2E	Belum terintegrasi dengan Data Center
84	Aplikasi kartu AK-1 dan database pencari kerja	Pelayanan Kartu Pencari Kerja	Disnaker	G2E	Belum terintegrasi dengan Data Center
85	Aplikasi pendaftaran dan peserta pelatihan	DB pendaftar dan peserta pelatihan	Disnaker	G2E	Belum terintegrasi dengan Data Center
86	Bursa kerja online	Informasi lowongan kerja	Disnaker	G2E	Belum terintegrasi dengan Data Center

Ket : G2C=Government to Citizen, G2B=Government to Business, G2G=Government to Government, G2E=Government to employees

Jaringan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung e-Government Pemerintah Kabupaten Temanggung, untuk meningkatkan performansi telah dibangun jaringan fiber optic (FO) yang menghubungkan seluruh OPD dan satuan kerja dalam Kota Kabupaten Temanggung. Selain jaringan FO, untuk interkoneksi internet/intranet telah dibangun jaringan wireless



terpadu sampai di Kecamatan, UPT, SMP dan Kantor Desa/Kelurahan dengan topologi jaringan sebagai berikut:



Pengembangan Topologi Jaringan Intranet (WLAN) Pemda Temanggung.

b) Indikator 17.2 Nilai Keterbukaan Informasi Publik

➤ Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung tahun 2019 sebesar 80,03%, sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 78,30 maka capaiannya adalah 100.%.

➤ Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target RPJMD Tahun 2023

Realisasi kinerja indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik tahun 2019 sebesar 80,03 atau 100% dari target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 80,00. Hal ini menunjukkan bahwa sampai dengan akhir RPJMD tahun 2023 akan tercapai 100%.

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan



penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang.

Badan Publik berkewajiban menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Adalah hak setiap orang mendapatkan informasi karena makin terbuka penyelenggara negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan keterbukaan dan pelayanan publik pada masyarakat salah satunya dapat diukur dari Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan pemeringkatan keterbukaan badan publik kabupaten/kota terhadap implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemeringkatan keterbukaan badan publik adalah bagian dari evaluasi dan penilaian tahunan tata kelola informasi publik pada badan publik, terutama di lingkungan badan publik pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan ini dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai amanat Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tahap pemeringkatan Keterbukaan Badan Publik melalui pengisian kuisisioner Penilaian Mandiri, Visitasi Verifikasi, Uji Publik, dan Penilaian Akhir.

Tabel 3.33 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2019

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	52,9	63,23	70,09	70,8	77,9	80,03



2	Kategori	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Menuju Informatif
---	----------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2019

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu enam tahun pelaksanaan pemeringkatan keterbukaan badan publik, nilai PPID Kabupaten Temanggung dapat dikatakan mengalami kenaikan. Pemeringkatan tersebut dilakukan oleh Komisi Informasi kepada 20 Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai terbaik, diantaranya adalah:

No	Pemerintah Daerah Kab/Kota	Nilai	Kategori
1	Kabupaten Batang	93.14	Informatif
2	Kota Pekalongan	92.08	Informatif
3	Kabupaten Karanganyar	90.82	Informatif
4	Kota Semarang	89.11	Menuju Informatif
5	Kabupaten Banyumas	88.62	Menuju Informatif
6	Kabupaten Wonogiri	88.36	Menuju Informatif
7	Kota Surakarta	88.18	Menuju Informatif
8	Kabupaten Wonosobo	83.02	Menuju Informatif
9	Kabupaten Sukoharjo	82.75	Menuju Informatif
10	Kabupaten Demak	82.58	Menuju Informatif
11	Kabupaten Purbalingga	82.56	Menuju Informatif
12	Kota Magelang	82.54	Menuju Informatif
13	Kabupaten Temanggung	80.03	Menuju Informatif

➤ **Faktor Pendorong**

1. upaya dan kerja keras dari seluruh pemangku keterbukaan informasi publik di pemerintah Kabupaten Temanggung, baik PPID Utama, PPID Pembantu dan semua *stakeholder*.
2. penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana PPID, pengesahan regulasi dan SOP, pendampingan, monitoring dan evaluasi rutin PPID Pembantu, pengembangan *website* dan *dashboard* PPID serta peningkatan layanan kepada masyarakat.



➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Ketidakseimbangan jumlah kegiatan dengan banyaknya badan publik yang menjadi tanggungjawab PPID Utama.	Meningkatkan frekuensi pendampingan dengan PPID Badan Publik dan mempersiapkan pengumpulan dokumen-2 yang disampaikan ke publik di awal tahun

➤ **Prestasi/Penghargaan**

Pada Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Temanggung memperoleh 2 (dua) buah penghargaan, yaitu:

1. Juara 1 seleksi Pertunjukan Rakyat Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra regional) tingkat Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 September 2019 di Kabupaten Boyolali.
2. Penghargaan pemeringkatan keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, mendapat peringkat 10 dengan kategori “Menuju Informatif”.



Foto Penyerahan Penghargaan FK Metra Regional



Foto Penyerahan Penghargaan Pemeringkatan Terbuka



c) Indikator 17.3 Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggara Layanan Publik

➤ Evaluasi dan Analisi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target 2019

Capaian Kinerja pada Indikator Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggara Layanan Publik tahun 2019 sebesar 98,70% dari target yang telah ditetapkan sebesar 77. Target Kepatuhan Penyelenggara Layanan Publik Tahun 2019 sebesar 77 dan realisasi sebesar 76 atau tercapai sebesar 98,70%. Capaian dengan angka 98,70%.

➤ Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target RPJMD Tahun 2023

Realisasi kinerja indikator Tingkat kepatuhan penyelenggaraan layanan publik tahun 2019 sebesar 76 bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 81 maka capaiannya 93,83%. Hal ini menunjukkan bahwa sampai dengan akhir RPJMD tahun 2023 akan tercapai 100% dengan upaya keras.

Adanya penilaian terhadap Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Layanan Publik bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan penyelenggara dan pelaksana dalam memenuhi komponen standar pelayanan Publik sebagaimana diatur UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta untuk mendorong kepatuhan penyelenggara dan pelaksana terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tingkat Kepatuhan Penyelenggara Layanan Publik diperoleh dengan penilaian sesuai variabel dan indikator seperti pada tabel di bawah ini :



Tabel 3.34 Variabel dan Indikator Evaluasi dan Analisis
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target
RPJMD Tahun 2023

No	Variabel Penilaian	Komponen Indikator	Bobot
1	Standar Pelayanan	Persyaratan	6
		Sistem mekanisme dan prosedur	6
		Produk Pelayanan	6
		Jangka Waktu Penyelesaian	12
		Biaya/ Tarif	12
2	Maklumat Layanan	Ketersediaan Maklumat Pelayanan	12
3	Sistem Informasi Pelayanan Publik	Ketersediaan Informasi Pelayanan Publik Elektronik atau Nonelektronik (booklet, pamflet, website, monitor televisi, dll)	12
4	Sarana dan Prasarana Fasilitas	Ketersediaan ruang tunggu	3
		Ketersediaan toilet untuk pengguna layanan	2
		Ketersediaan loket/meja pelayanan	3
5	Pelayanan Khusus	Ketersediaan Sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (ram, rambatan, kursi roda, jalur pemandu, toilet khusus, ruang menyusui, dll)	2
		Ketersediaan Pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus	2
6	Pengelolaan Pengaduan	Ketersediaan Sarana Pengaduan (SMS/Telpon/Fax/Email, dll)	5
		Ketersediaan informasi prosedur dan tatacara penyampaian pengaduan	3
		Ketersediaan Pejabat /Petugas Pengelola Pengaduan	5
7	Penilaian Kinerja	Ketersediaan Sarana Pengukuran Kepuasan Pelanggan	3



No	Variabel Penilaian	Komponen Indikator	Bobot
8	Visi, Misi dan Motto Pelayanan	Ketersediaan Visi dan Misi Pelayanan	2
		Ketersediaan Motto Pelayanan	2.5
9	Atribut	Ketersediaan Petugas Penyelenggaraan menggunakan ID Card	2.5
10	Pelayanan Terpadu (Jawaban Pilihan harus satu yang dipilih)	a) Pelayanan Terpadu Tingkat Kementerian Lembaga	10
		b) Pelayanan Terpadu Tingkat Direktorat Jenderal/Deputi	7
		c) Pelayanan terpadu Tingkat Direktorat/Direktur/Eselon III	5
		d) Bukan Pelayanan Terpadu	0

Sumber : Bagian Ortala Setda, 2019

Dari hasil survey yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui Bagian Ortala Setda Kabupaten Temanggung pada tahun 2018, untuk tingkat kepatuhan Penyelenggaraan Publik di Kabupaten Temanggung diperoleh hasil dengan nilai sebagai berikut:

Tabel 3.35 Nilai Survei Kepatuhan Tahun 2014-2019

No	Tahun	Hasil	Zona
1	2014	n.a	n.a
2	2015	34,46	Merah
3	2016	59,76	Kuning
4	2017	55	Kuning
5	2018	76	Kuning
6	2019	76	Kuning

Sumber : Bagian Ortala Setda, 2019

Keterangan Kategorisasi Penilaian Pemerintah Daerah :

Nilai	Tingkat Kepatuhan	Zona
0 - 50	Rendah	Merah
51 - 80	Sedang	Kuning
81 - 100	Tinggi	Hijau

Sumber : Bagian Ortala Setda, 2019



Dari data tabel 1.5 di atas dapat diketahui bahwa survey tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik di Kabupaten Temanggung semakin baik namun masih perlu ditingkatkan.

➤ **Faktor pendorong**

1. Memberikan apresiasi (*award*) kepada pimpinan Perangkat Daerah yang produk layanannya telah mendapatkan Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi.
2. Menyelenggarakan program sistematis implementasi standar pelayanan publik secara mandiri sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Masih ada nya zona kuning di beberapa perangkat daerah	Memberikan teguran dan mendorong para pimpinan Perangkat Daerah yang produk layanannya mendapatkan Zona Kuning dengan Predikat Kepatuhan Sedang dan Zona Merah dengan Predikat Kepatuhan Rendah untuk mengimplementasikan standar pelayanan publik di instansi pelayanan publik masing-masing



d) Sasaran strategis 18 : Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dan Manajemen Pemerintahan Desa

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.36 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dan Manajemen Pemerintahan Desa

NO	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019-2023 (%)
				T	R		T 2023	R 2019	
1	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	%	0,63	0,63	0,67	100	0,67	0,67	100
2	Persentase Desa yang berpredikat Mandiri	%	0	4,14	0	0	6,62	0	0
Rata-rata capaian kinerja						50			50

Sumber: Dinpermades Tahun 2019

a) Indikator 18.1 Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa pada indikator Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun Tahun 2019 adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan 0,63. Target Rata-rata IDM tahun 2019 adalah 0,63 % realisasi sebesar 0,67% atau dengan kata lain realisasi melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 0,03. Rata-rata Nilai IDM Tahun 2019 meningkat 0,03% jika dibandingkan tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 disebutkan bahwa Indeks Desa Membangun adalah Indeks



Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) dimaksudkan antara lain untuk :

- a. Menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai perkembangan desa;
- b. Menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa;
- c. Menjadi instrumen koordinasi baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun dengan desa dan lembaga yang ada.

Indeks Desa Membangun (IDM) status atau perkembangan desa ada 5 klasifikasi Status Desa yaitu :

- a. Desa Mandiri
- b. Desa Maju
- c. Desa Berkembang
- d. Desa Tertinggal
- e. Desa Sangat Tertinggal

Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan.

Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) antara lain :

- a. **Ketahanan Sosial** : Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Permukiman
- b. **Ketahanan Ekologi** : Kualitas lingkungan, Potensi rawan bencana, Tanggap bencana
- c. **Ketahanan Ekonomi** : Keberagaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, Akses distribusi/logistik, Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga Ekonomi, Keterbukaan wilayah.



➤ **Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 Dengan Target Tahun 2019**

Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun hasil penilaian Kemendes tahun 2018 sebesar 0,62% yang menunjukkan bahwa sebagian besar desa di Kabupaten Temanggung tergolong Desa Berkembang dengan kata lain sebagai desa madya yaitu desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan, sedangkan hasil Rata-rata Nilai IDM untuk tahun 2019 cenderung meningkat yaitu 0,67% yang artinya meningkat 0,03%. Kenaikan rata-rata nilai tersebut ditunjukkan dengan adanya kenaikan Status Desa dari Desa Berkembang menjadi Desa Maju dengan rentang nilai antara 0,7072 s.d 0,08100 yang tersebar di 48 desa dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung.

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja sasaran Tahun 2019 dengan target RPJMD Tahun 2023**

Realisasi Kinerja indikator Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun tahun 2019 sebesar 0,67% dibandingkan Target RPJMD tahun 2023 sebesar 0,67% sehingga capaiannya sebesar 100% pada tahun 2019 hal ini menunjukkan bahwa Target IDM sudah tercapai pada tahun ini 100%.

➤ **Faktor Pendorong dan faktor Penghambat**

1. Besaran Dana Desa yang meningkat sehingga desa punya anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya baik di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan,
2. Desa semakin sadar dengan regulasi-regulasi khususnya yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa,
3. Banyak Desa yang malu kalau disebut Desanya Tertinggal atau Sangat Tertinggal.



➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Dalam Pelaksanaan kegiatan masih kurang kualitas Sumber Daya Manusia baik dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan.	Melaksanakan Pembinaan dan pendampingan
2	Status desa belum menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan desa.	

b) Indikator 18.2 Persentase Desa yang berpredikat Mandiri

Definisi Desa Mandiri atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Adapun Kriteria Desa Mandiri :

- Sarana dan prasarana yang memadai : (Pendidikan ; Perkantoran ; Kesehatan ; Tempat ibadah ; Akses jalan dan komunikasi)
- Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
- Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan
- Kemampuan untuk menunjang pembangunan sendiri



- e. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri
- f. Tidak tergantung pada bantuan dari luar
- g. Punya sumber pendapatan sendiri
- h. Masyarakat mampu dan bergotong royong untuk membangun desa
- i. Sudah punya hak yang jelas dan bisa memanfaatkan hasil-hasil
- j. Peningkatan ketrampilan
- k. Kemandirian dan pemberdayaan
- l. Terbuka dengan pemerintah
- m. Adanya aturan-aturan desa
- n. Harus bisa membiayai aparat desa

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan target Tahun 2018**

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa pada Indikator Persentase Desa yang berpredikat Mandiri tahun 2019 adalah sebesar 0% dari target yang telah ditetapkan sebesar 4,14%. Target Desa Mandiri tahun 2019 adalah 4,14% atau sekitar 10 desa tiap tahunnya namun realisasi masih 0% atau dengan kata lain target yang telah ditetapkan belum tercapai.

Target capaian Desa yang berpredikat Mandiri pada Tahun 2018-2019 ini masih belum tercapai namun ada peluang untuk meningkatkan Status Desa dari 48 Desa yang berpredikat Maju yang mempunyai Nilai rata-rata 0,08100 yang artinya bahwa desa tersebut perlu dipacu kedepan melalui Dana Desa agar dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar tepat sasaran, sehingga bisa mendongkrak Status Desa.



➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan target RPJMD Tahun 2023**

Realisasi Kinerja indikator Persentase Desa yang berpredikat Mandiri tahun 2019 sebesar 0% dibandingkan Target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 6,62% maka capaiannya 4,14% atau sekitar 10 desa target Desa Mandiri pada tahun 2019 belum tercapai.

➤ **Faktor Pendorong dan faktor Penghambat**

1. Potensi Sumber Daya Manusia,
2. Potensi Sumber Daya Alam
3. Pasar,
4. Kelembagaan dan Budaya lokal.

Selain faktor pendorong di atas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung melalui Bidang Pembangunan Desa berupaya semaksimal mungkin untuk membantu, memfasilitasi serta mendampingi desa dalam perencanaan pembangunan agar dapat tepat sasaran, tepat mutu dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh desa agar dapat mendorong peningkatan status desanya.

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Desa belum memaksimalkan potensi yang ada di 54 Indikator penilaian, pembangunan yang dilaksanakan di desa belum bisa mendorong pemanfaatan dan meningkatkan status desanya	Pembinaan dan Pendampingan

➤ **Prestasi dan Penghargaan**



Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh Dinpermades pada Tahun 2019 ini ada yang Tingkat Regional dan Tingkat Nasional, penghargaan tidak diperoleh secara langsung kepada Dinas namun penghargaan yang diberikan kepada Desa ataupun kelompok binaan Dinpermades. Prestasi dan Penghargaan tersebut adalah :

1. Juara I Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 (Pemberi Penghargaan Gubernur Jawa Tengah);



2. Juara Harapan I Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional II Tahun 2019 (Pemberi Penghargaan Menteri Dalam Negeri);



3. Pemenang Stand Terbaik dan Favorit Bursa Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 (Pemberi Penghargaan Gubernur Jawa Tengah)





Sasaran 19 Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4 dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.37 CAPAIAN KINERJA SASARAN MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

NO	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja s/d 2019-2023 (%)
				T	R		T 2023	R 2019	
1	Indeks Rasa Aman	Angka	Na	0,63	0.88	100	0,67	0,88	100
Rata-rata capaian kinerja						100			100

Sumber: Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar Tahun 2019

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran “Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum” hanya ada satu indikator sasaran yaitu Indeks Rasa Aman. Pada tahun 2018 Indeks Rasa



Aman belum dapat diukur dikarenakan belum melaksanakan survey. Survey Indeks rasa aman baru dilaksanakan pada Tahun 2019 dengan capaian kinerja mencapai 100%.

➤ **Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target Tahun 2019**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Indeks Rasa Aman Kabupaten Temanggung tahun 2019 sebesar 0,88, sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 0,63 maka capaiannya adalah 100%.

Berdasarkan pernyataan dari UNDP (United Nation Development Program) bahwa rasa aman merupakan salah satu jaminan yang dirasakan oleh masyarakat dalam beberapa hal antara lain :

1. Keamanan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, represi
2. Perlindungan dari segala gangguan yang menyakitkan dalam kehidupan sehari-hari baik secara individu maupun komunitas (Laporan IKMI, 2015)

Tujuan dari perhitungan rasa aman yaitu untuk mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Berdasarkan hasil perhitungan indeks keamanan pada statistik moda sosial menunjukkan bahwa nilai indeks rasa aman saat ini sebesar 0,61 (61%) dari skala indeks 1. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Indonesia rata-rata saat ini merasakan lingkungan tempat tinggal mereka terasa lebih aman. Berbeda dengan hasil penilaian indikator rasa aman di Kabupaten Temanggung yang menunjukkan bahwa nilai indikator rasa aman sebesar 4,41 (88,20%) dan termasuk dalam kategori memuaskan



➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan tatget RPJMD Tahun 2023**

Realisasi kinerja Indeks Rasa Aman Tahun 2019 sebesar 0,88% bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2023 sebesar 0,67 % maka capaiannya adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Temanggung telah tercapai 100% di akhir periode RPJMD tahun 2023.

Indeks Rasa Aman merupakan salah satu variabel dalam Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), sebagai variabel yang menyatakan perasaan masyarakat terhadap rasa aman di daerahnya. Indeks Rasa Aman terdiri dari 4 komponen penilaian:

1. Keamanan bencana
2. Pemenuhan Kesejahteraan Sosial
3. Perlindungan dan pemanfaatan kebhinekaan
4. Keamanan dari kekerasan

Realisasi kinerja indikator Indeks Rasa Aman di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019 dengan realisasi 0.88 mencapai 100%, maka target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 0.67 akan tercapai.

Realisasi indeks rasa aman di Kabupaten Temanggung diperoleh berdasarkan survey dari Tim P5 Universitas Diponegoro Semarang tahun 2019, tetapi pada Tahun 2020 akan diberikan teknis survey di tiap Perangkat Daerah.

➤ **Faktor Pendorong**

1. Sudah terdapat rumus dan mekanisme perhitungan yang jelas
2. Kondisi toleransi yang tinggi di Kabupaten Temanggung juga telah berdampak pada keamanan dan minimnya bentrokan yang terjadi di Lingkungan masyarakat,
3. Terdapat kelompok masyarakat yang ikut mensosialisasikan perda.



4. Memaksimalkan keberadaan personil dan prasarana yang ada.

➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Banyaknya minuman keras oleh pemuda yang ada di Kabupaten Temanggung dapat berpotensi memicu peningkatan tindak kejahatan sehingga dapat menurunkan nilai indeks keamanan yang ada di Kabupaten Temanggung	Melaksanakan sosialisasi dan yustisi dengan pihak terkait seperti TNI dan POLRI
2	kurangnya kesiapsiagaan masyarakat untuk melapor bila mana terjadi Kebakaran ke Pos Pemadam Kebakaran, medan yang sulit berbukit-buki dan kondisi jalan yang rusak, kondisi mobil Pemadam Kebakaran ada yang kurang handal untuk menempuh medan yang terjal.	Melaksanakan penyuluhan tentang pencegahan bahaya kebakaran
3	Sulitnya mencari kader sebagai anggota Satlinmas yang baru, serta belum optimalnya koordinasi dengan pihak	Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan pihak Desa/Kelurahan



No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
	Desa/Kelurahan.	
4	belum efektifnya koordinasi dengan instansi terkait, peran serta masyarakat dalam memberikan laporan adanya pelanggaran, kurangnya sumber daya manusia Polisi Pamong Praja, terutama berkaitan dengan belum adanya Polisi Pamong Praja yang bertindak sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat dioptimalkan dalam upaya penegakan secara pro yustisia	Koordinasi dengan instansi terkait secara kontinyu

Sasaran strategis 20 Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 5 dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.38 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana

NO	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019-2023 (%)
				T	R		T 2023	R 2019	
10	Cakupan Desa tangguh bencana	%	4,76	6,67	7,14	100	10,47	7,14	68,19
Rata-rata capaian kinerja						100			68,19

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019



Pada tahun 2019 Capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana” mempunyai satu indikator sasaran yaitu Cakupan Desa Tangguh Bencana dengan nilai 7.14%. Desa Tangguh Bencana (Destana) adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.

➤ **Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Target Tahun 2019**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Cakupan Desa tangguh bencana Kabupaten Temanggung tahun 2019 sebesar 7,14%, sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 6,67 maka capaiannya adalah 100%.

Dengan capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana mencapai 100% dari target 6.67 mencapai 7.14 di tahun 2019.

➤ **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan tatget RPJMD Tahun 2023**

Realisasi kinerja Cakupan Desa tangguh bencana tahun 2019 sebesar 7,14% bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2023 sebesar 10,47% maka capaiannya adalah 68,19%.

➤ **Faktor Pendorong**

1. Adanya lembaga sukarela / relawan yang melaksanakan kegiatan penanganan bencana di semua kecamatan;
2. Sudah ada fasilitator untuk destana (Desa Tangguh Bencana);
3. Sudah ada alat pendeteksi bencana/EWS di desa rawan bencana.



➤ **Faktor penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Penentuan target capaian belum maksimal dan Kurangnya sumber daya manusia	Berkoordinasi dengan perangkat daerah lain dan Memaksimalkan relawan
2	Pencapaian Cangkupan Desa Tangguh yang hanya berasal dari APBD BPBD Kabupaten Temanggung adalah 15 Desa dari 210 Desa sehingga hanya 7.14%	
3	Sedangkan total Desa/Kampung Siaga Bencana berjumlah 35 Desa Bentukan dari seluruh Stackholder Kab.Temanggung dan tambahan 2 Desa Tangguh Bencana bentukan dari Provinsi sehingga jumlah Desa Tangguh Bencana adalah 17 Desa	



C. REALISASI ANGGARAN

Berikut adalah realisasi anggaran pelaksanaan Tujuan 1 Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya :

Tabel 3.39 Realisasi Anggaran Misi 1 Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya Tahun 2019

Indikator Kinerja	Sasaran / Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Sasaran Terpenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Pendidikan		124.374.492.704	116.795.250.640	93,91
Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	peningkatan mutu pendidikan nonformal	2.225.888.950	1.819.973.149	81,76
Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	Peningkatan kualitas, pendidik dan tenaga kependidikan	30.800.112.100	29.126.232.575	94,57
	Peningkatan akses pendidikan sekolah dasar	58.717.532.926	52.625.738.955	89,63
	Peningkatan mutu pendidikan SD	1.686.630.350	1.563.010.540	92,67
	Peningkatan akses pendidikan SMP	29.098.474.478	26.348.806.517	90,55
	Peningkatan mutu pendidikan SMP	1.117.803.400	1.064.977.782	95,27
	peningkatan akses pendidikan PAUD	497.285.000	486.297.500	97,79
	peningkatan mutu PAUD	230.765.500	220.733.470	95,65
Meningkatnya Prestasi Pemuda		1.421.959.950	1.278.816.337	89,93



Indikator Kinerja	Sasaran / Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
dan Olah Raga				
Indeks prestasi Pemuda dan Olah Raga	Pembinaan kepemudaan	131.279.000	118.370.100	90,17
	Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	1.290.680.950	11.604.46.237	89,91
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Kesehatan		296.172.958.237	286.760.452.435	96,82
Angka Harapan Hidup (AHH)	Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	25.708.015.000	22.550.583.020	87,72
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	8.936.501.617	7.873.402.044	88,10
Angka Kematian Ibu (AKI)	Program Pelayanan Kesehatan	75.656.685.012	65.605.556.273	86,72
Angka Kematian Bayi (AKB)				
Prevalensi balita gizi buruk	Kesehatan Masyarakat	17.210.732.975	16.821.116.128	97,74
Persentase rumah tangga yang memiliki jamban				
Indeks kinerja RSUD	Pelayanan kesehatan penduduk miskin	1.000.000.000	999.393.000	99,94
	Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit	12.430.81.900	12.242.273.195	98,48
	Peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit	155.230.203.733	146.125.932.461	94,13
Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat		1.887.890.700	1.696.692.430	89,87
Persentase peminjam perpustakaan	pengelolaan dan pengembangan perpustakaan	1.887.890.700	1.696.692.430	89,87



Indikator Kinerja	Sasaran / Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal		2.494.756.800	2.313.860.296	92,75
Persentase pelestarian cagar budaya	pengelolaan kebudayaan	2.494.756.800	2.313.860.296	92,75
Persentase kelompok seni budaya yang aktif				
Meningkatnya Nilai Kehidupan Bermasyarakat dan wawasan kebangsaan		1.058.330.800	992.988.047	93,83
Indeks Gotong Royong	pendidikan politik masyarakat	132.670.800	130.477.224	98,35
	ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi	116.403.800	112.805.900	96,91
	Pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba	15.662.200	15.358.100	98,06
Indeks Toleransi	peningkatan kewaspadaan nasional	678.758.300	630.986.723	92,96
	pengembangan wawasan kebangsaan	114.835.700	103.360.100	90,01
Meningkanya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)		4.133.264.500	3.766.118.425	91,12
Persentase Rumah Tidak Layak Huni	penanganan fakir miskin	333.776.500	319.114.010	95,61
Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan	perlindungan dan jaminan sosial	675.449.400	637.757.450	94,42
	pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan	2.130.735.700	1.882.866.280	88,37



Indikator Kinerja	Sasaran / Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
sosial di luar panti sosial	sosial			
	pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial	893.302.900	831.771.623	93,11
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100.000.000	94.609.062	94,61
Terkendalanya Laju Pertumbuhan Penduduk		7.902.254.000	6.130.381.629	77,58
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	pengendalian penduduk dan informasi keluarga	617.893.600	582.052.350	94,20
	kepesertaan dan peningkatan pelayanan KB	7.284.360.400	5.548.329.279	76,17
Meningkatnya Pengarsutamaan gender serta perlindungan terhadap Perempuan dan Anak		307.186.050	298.104.512	97,04
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	peningkatan kualitas dan pembinaan ketahanan keluarga	100.206.900	99.503.376	99,30
Persentase perempuan dan anak korban kekerasan	peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	206.979.150	198.601.136	95,95
JUMLAH		439.753.093.741	420.032.664.751	95,52
Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal				
Prosentase pelestarian cagar budaya	Program Pengelolaan Kebudayaan	508.569.300	428.679.396	84,29
Prosentase kelompok seni	Program Pengelolaan Kebudayaan	1.986.187.500	1.885.180.900	94,91



Indikator Kinerja	Sasaran / Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
budaya yang aktif				
	TOTAL	2.494.756.800	2.313.860.269	92,75
Meningkatnya Kesejahteraan Petani				
Nilai Tukar Petani (NTP)	Program peningkatan produktivitas, penerapan teknologi dan agribisnis Tanaman Pangan	5.716.463.575	5.561.185.078	97,28
	Program peningkatan produksi, penerapan teknologi dan agribisnis Hortikultura	456.113.600	428.346.439	93,91
	Program pemberdayaan SDM dan kelembagaan pertanian	442.409.400	417.392.520	94,35
	Program peningkatan produktivitas, penerapan teknologi dan agribisnis Perkebunan	3.711.377.800	3.075.171.733	82,86
	Program peningkatan populasi dan produksi ternak dan hasil ternak	12.139.386,000	2.265.344.065	18,66
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan	319.392.500	311.619.075	97,57
	Program pemenuhan pangan asal hewan	63.509.000	62.098.900	97,78
	TOTAL	22.848.650.875	12.121.157.810	53,05
Meningkatnya Kedaulatan Pangan				
Skor Pola Pangan Harapan	Program Ketahanan Pangan	665.092.500	308.038.847	46,32
Tingkat	Program	2.040.439.200	1.965.288.118	96,32



Indikator Kinerja	Sasaran / Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Konsumsi Ikan	Pengembangan Budidaya Perikanan			
	TOTAL	2.705.531.700	2.273.326.965	84,03
Meningkannya pariwisata daerah				
Pertumbuhan jumlah wisatawan	Program Pengembangan Pariwisata	3.073.495.000	2.789.324.995	90,75
Lama Tinggal wisatawan	Program Pengembangan Pariwisata	1.559.453.700	985.573.935	60,02
	TOTAL	4.632.948.700	3.774.898.930	81,48
Meningkatnya Investasi Sektor Riil				
Kontribusi sektor perindustrian	Program Pengembangan Perindustrian	655.789.300	620.617.873	94,64
Kontribusi sektor perdagangan	Program Pengembangan Perdagangan	2.278.359.500	1.938.885.741	85,10
	Program Pengelolaan Pasar	3.713.613.700	3.485.891.241	93,87
	TOTAL	5.991.973.200	5.424.776.982	90,53
Prosentase koperasi sehat	Program Pengembangan Koperasi dan UKM	123.748.200	95.443.902	77,13
	TOTAL	123.748.200	95.443.902	77,13
Prosentase ukm aktif	Program Pengembangan Koperasi dan UKM	84.545.720	77.399.507	91,55
	TOTAL	84.545.720	77.399.507	91,55
Pertumbuhan Investasi Daerah	Pengkajian potensi investasi dan Pengembangan kinerja	204.074.700	193.522.700	94,83
	Peningkatan Iklim Investasi	341.988.200	336.459.036	98,38
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	346.058.000	294.699.335	85,16
	Pengawasan, Pengendalian, Pengaduan dan advokasi Perizinan	189.007.580	165.385.850	87,50
	TOTAL	1.081.128.480	990.066.921	91,57



Indikator Kinerja	Sasaran / Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Perluasan kesempatan kerja	243.000.000	230.467.550	94,84
	Perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	99.866.000	94.094.962	94,22
	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	1.410.317.000	1.056.535.079	74,91
	TOTAL	1.753.183.000	1.381.097.591	78,78
Meningkatnya Pemerataan dan kualitas wilayah				
persentase Infrastruktur kondisi baik	Program penyelenggaraan jalan	54.471.626.900.	46.527.872.030	85,42
	Program penyelenggaraan jembatan	14.419.031.300	13.060.433.174	90,58
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	14.303.639.300	11.988.665.728	83,82
	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	1.853.355.500	1.485.216.962	80,14
	TOTAL	85.047.653.000	73.062.349.894	85,91
persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	Program Administrasi Pertanahan	215.251.500	165.815.100	77,03
	Program penyelenggaraan tata ruang	254,155,200	213,705,692	84,08
	TOTAL	469,406,700	379,520,800	80,85
Persentase kawasan kumuh perkotaan	Program pengembangan perumahan dan permukiman	4.940.752.900	4.341.253.533	87,86
	Program pengembangan dan penataan kota	21.247.709.970	18.128.361.848	85,32
	Program pembinaan jasa konstruksi	40.994.700	29.156.913	71,12



Indikator Kinerja	Sasaran / Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	TOTAL	26.229.457.570	22.498.672.295	85.78
Indikator Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Program pengelolaan lalu lintas dan perparkiran	8.190.791.500	7.702.321.629	94.04
	Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	1.606.930.960	1.531.026.611	95.28
	Program peningkatan pelayanan angkutan	3.570.486.500	3.399.918.343	95.22
	TOTAL	13.368.208.960	12.633.266.583	94.50
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup	1,639,347,125	1,435,777,155	87.58
	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	2,179,029,100	1,992,846,386	91.46
	Program pentaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup	512,058,000	358,196,977	69.95
	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	6,111,120,300	5,616,114,996	91.90
	JUMLAH	10,441,554,525	9,402,935,514	90.05
Misi 3: Meningkatnya Kualitasn Manajemen Pemerintahan				
Tingkat	Program	1.359.171.000	1.282.903.067	94,39



Indikator Kinerja	Sasaran / Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Konsistensi Program Pembangunan	perencanaan evaluasi dan informasi pengembangan daerah			
	Program Perencanaan dan Evaluasi Bidang Ekonomi, SDA dan Infrastruktur	962.827.900	952.259.288	98,94
	Program Perencanaan dan Evaluasi Bidang Pembnagunan Manusia dan Pemerintahan	566,534,600	511,862,137	90.35
	Program Perencanaan Evaluasi dan Kelitbangan Perangkat daerah	4,764,000	4,196,750	88.09
	Program Penelitian Dan Pengembangan	1,667,658,500	1,474,131,142	88.40
Opini laporan Keuangan Perangkat Daerah	Program Perencanaan Pendapatan dan Pelayanan pendapatan daerah	907,722,800	780,251,635	85.96
	Program pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah	497,783,700	468,719,610	94.16
	Program Peningkatan Pendapatan daerah	92,346,400	76,183,556	82.50
	Program Pengelolaan keuangan daerah	1,500,663,550	997,283,406	66.46
	Program Pengelolaan Aset	1,009,746,400	800,992,973	79.33



Indikator Kinerja	Sasaran / Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	3,052,362,425	2,348,831,677	76.95
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah (EKPPD)	Program Peningkatan Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintah	398,491,000	392,741,800	98,56
	Program Penyusunan dan Penatan Produk Hukum	1,417,835,000	1,410,301,517	99.47
	Program Pengembangan Keagamaan, kesejahteraan rakyat dan bina mental	3,467,120,100	3,158,691,166	91.10
Persentase kegiatan yang tepat waktu	Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	217,480,000	211,923,850	97.45
	Program Pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah	624,524,600	475,129,546	76.08
	Program Meningkatnya layanan pengadaan	430,948,200	409,291,454	94.97
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Program Penataan Kelembagaan, Tatalaksana dan Peningkatan Pelayanan Publik.	476,465,800	465,128,250	97.62
	Program Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah	2,457,749,775	2,264,694,852	92.15
	Program Meningkatnya penyelenggaraan kehumasan	7,292,701,998	6,576,966,391	90.19



Indikator Kinerja	Sasaran / Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
		28,404,897,748	25,062,821,067	88,23
Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	919,087,500	840,193,320	91.42
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	181,781,000	178,783,485	98.35
Indeks Profesionalisme ASN	Program Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	518,963,500	183,392,697	35.34
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4,630,675,300	4,106,602,570	88.68
	Program Pembinaan Kesejahteraan Aparatur dan Informasi Kepegawaian	142,995,864	131,328,657	91.84
Indeks Manajemen Kearsipan	Program Pengelolaan dan pelestarian arsip daerah	300,990,500	253,568,700	84.24
Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	13,816,546,800	11,266,307,238	81.54
Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2,275,054,700.	2,253,845,542	99.07



Indikator Kinerja	Sasaran / Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Program pengelolaan aplikasi informatika	2,000,004,260	1,949,495,806	97.47
Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Layanan Publik	Program peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	293,705,400	238,037,300	81.05
	Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil	178,418,500	149,147,475	83.59
	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	3,305,463,500	2,978,903,164	90.12
Transisi RPJMD	Program pengembangan data Statistik	437,663,000.00	426,550,829	97.46
	Program pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi	2,000,004,260.00	1,949,495,806	97.47
	Program pengembangan data Statistik	437,663,000.00	426,550,829	97.46
Rata-rata nilai indeks desa yang berpredikat mandiri	Program Pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa	1,127,395,000	1,121,342,364	99.46
Persentase desa yang berpredikat mandiri	Program Pembinaan dan fasilitasi perencanaan, evaluasi, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa	201,628,500	198,339,133	98.37
	Program pengembangan lembaga ekonomi	110,348,500	109,217,851	98.98



Indikator Kinerja	Sasaran / Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	masyarakat/desa dan			
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengelolaan asset desa	965,080,000	938,115,250	97.21
Indeks rasa aman	Program pemeliharaan keentraman dan ketertiban umum	1,280,046,500	1,159,842,500	90.61
	Program peningkatan perlindungan masyarakat	373,237,000	355,056,100	95.13
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1,230,507,300	1,219,652,836	99.12
Cakupan Desa	Program Penanganan tanggap darurat bencana	3,279,285,850	3,034,353,420	92.53
	Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	430,952,500	353,357,250	81.99
	Program rehabilitas dan rekontruksi pasca bencana	3,336,081,500	3,323,835,250	99.63
		88.563.302.955	87.035.458.151	98,27
Urusan Penunjang	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	3,794,900	3,793,600	99,96
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13,736,799,100	13,037,507,649	94,90



Indikator Kinerja	Sasaran / Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	6,908,877,575	6,626,699,683	95,91
	Program Peningkatan Disiplin	287,730,000	117,506,000	40,83
	Program pengelolaan administrasi kepegawaian	518,963,500	183,392,697	35.34
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	4,630,675,300	4,106,602,570	88.68
	Program pembinaan, kesejahteraan aparatur, dan informasi kepegawaian	142,995,864	131,328,657	91.84
	Program pelayanan administrasi perkantoran	37,243,064,570	32,634,126,342	87.62
	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	22,016,080,355	20,487,326,542	93.06
		85,488,981,164	77,328,283,740	90,45

D. ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai 100%. Terlihat mayoritas dari 20 Sasaran menunjukkan 100% yaitu sebanyak 6 sasaran RPJMD, banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Konsisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik dimana salah satunya adalah sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.



Tabel 3.40 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Misi 1
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas,
berkarakter dan berdaya Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
	Tujuan Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya.				
1	Sasaran Terpenuhiya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Pendidikan		97,67	93,91	3,76
2		Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olah Raga	100	89,93	10,07
3		Terpenuhiya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Kesehatan	98,44	96,82	1,62
4		Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat	100	89,87	10,13
5		Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal	100	92,75	7,25
6		Meningkatnya Nilai Kehidupan Bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	100	93,83	6,17
7		Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)	93,57	91,12	2,41
8		Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	79,24	77,58	1,66
9		Meningkatnya Pengarsutamaan gender serta perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	100	97,04	2,96



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
		RATA-RATA	96,55	95,52	1,03
	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya local	Prosentase pelestarian cagar budaya	84,29	100	15,71
		Prosentase kelompok seni budaya yang aktif	94,91	100	5,09
		RATA-RATA	89,6 %	100 %	10,4 %
		TOTAL	93.07	97.76	4.69
Tujuan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan					
	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	53,05 %	97,69 %	44,58 %
	Meningkatnya Kedaulatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	46,32 %	87,50 %	41,18 %
		Tingkat Konsumsi Ikan	96,32 %	100 %	3,68 %
		TOTAL	86,41 %	93,75 %	7,34 %
	Meningkatnya pariwisata daerah	Pertumbuhan jumlah wisatawan	90,75	72,35	(18,41)
		Lama Tinggal wisatawan	64,02	100	35,98
		TOTAL	77,39 %	86,18 %	8,79 %
	Meningkatnya Investasi Sektor Riil	Kontribusi sektor perindustrian	94,64	100	5,36
		Kontribusi sektor perdagangan	92,2	100	7.81
		Prosentase koperasi sehat	77,93	96,24	18,31
		Prosentase ukm aktif	91,54	99,80	8,26
		Pertumbuhan	91,47		



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisien si (%)
1	2	3	4	5	6
		Investasi Daerah			
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	87.99		
		TOTAL	89.7	99,208	9,508
	Meningkatnya Pemerataan dan kualitas wilayah	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	85.91 %	100 %	14.09 %
		Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang	80.85 %	100 %	19.15 %
		Persentase kawasan kumuh perkotaan	85.78 %	100 %	14.22 %
		Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	94.50 %	97.05 %	2.55 %
		TOTAL	86.76 %	99.26 %	12,50 %
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	90,05 %	94,48 %	4,43 %
	Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.				
	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan		85.91	98,87	12,96
		Tingkat Konsistensi Program Pembangunan	92.65	97,60	
		Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	77.50	100	
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah (EKPPD)	93.91	92,86	
		Persentase kegiatan yang tepat waktu	86.13	100	



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisien si (%)
1	2	3	4	5	6
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	91.00	100	
		Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	91.42	100	
		Indeks Persepsi anti Korupsi (IPAK)	98.35	98,23	
		Indeks Profesionalisme ASN	83.54	100	
		Indeks Manajemen Kearsipan	84.24	100	
		Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	81.54	100	
	Meningkatnya kualitas pelayanan public		94.81	99,56	4,75
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	99.07	100	
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	97.47	100	
		Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggara Layanan Publik	92.39	98,70	
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa		99.75	50	(49,75)
		Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	99.46	100	
		Persentase desa yang berpredikat mandiri	100	0	



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		94.82	100	5,18
		Indeks rasa aman	94.82	100	
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana		95.25	100	4,75
		Cakupan Desa tangguh bencana	95.25	100	
		RATA-RATA	94,11	89,69	
		TOTAL	93.07	97.76	4.69

E. PROGRAM YANG MENDUKUNG SASARAN

No	Program
Sasaran Strategis 1 :Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	
1	Program peningkatan mutu pendidikan nonformal
2	Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
3	Program peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar
4	Program peningkatan mutu pendidikan SD
5	Program peningkatan akses pendidikan SMP
6	Program peningkatan mutu pendidikan SMP
7	Program peningkatan akses pendidikan PAUD
8	Program peningkatan mutu PAUD
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	
1	Program pembinaan kepemudaan
2	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Sasaran Strategis 3 : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	
	Program pencegahan dan pengendalian penyakit
	Program pengembangan sumber daya kesehatan
	Program pelayanan kesehatan
	Program kesehatan masyarakat
	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
	Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
	Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya budaya literasi masyarakat	
	Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan



Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	
	Program pengelolaan kebudayaan
Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	
	Program pendidikan politik masyarakat
	Program ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi
	Program pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba
	Program peningkatan kewaspadaan nasional
	Program pengembangan wawasan kebangsaan
Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	
	Program penanganan fakir miskin
	Program perlindungan dan jaminan sosial
	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
	Program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Sasaran Strategis 8 : Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	
	Program pengendalian penduduk dan informasi keluarga
	Program kepesertaan dan peningkatan pelayanan KB
Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	
	Program peningkatan kualitas dan pembinaan ketahanan keluarga
	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya kesejahteraan petani	
	Program peningkatan produktivitas, penerapan teknologi dan agribisnis Tanaman Pangan
	Program peningkatan produktivitas penerapan teknologi dan agribisnis Hortikultura
	Program pemberdayaan SDM dan kelembagaan pertanian
	Program peningkatan produktivitas penerapan teknologi dan agribisnis Perkebunan
	Program peningkatan produktivitas ternak dan hasil ternak
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan
	Program pemenuhan pangan asal hewan
Sasaran Strategis 11 : Meningkatnya kedaulatan pangan	
	Program peningkatan ketahanan pangan
	Program pengembangan perikanan
Sasaran Strategis 12 : Meningkatnya pariwisata daerah	
	Program pengembangan pariwisata
Sasaran Strategis 13 : Meningkatnya investasi sektor riil	
	Program Pengembangan Industri
	Program pengembangan perdagangan



	Program pengelolaan pasar
	Program pengembangan koperasi dan UKM
	Program pengkajian potensi investasi dan pengembangan kinerja
	Program peningkatan iklim investasi
	Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan
	Program pengawasan, pengendalian, pengaduan dan advokasi perizinan
	Program perluasan kesempatan kerja
	Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenaga-kerjaan
	Program peningkatan produktivitas tenaga kerja
Sasaran Strategis 14 : Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	
	Program penyelenggaraan jalan
	Program penyelenggaraan jembatan
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
	Program pembangunan saluran drainase/gorong –gorong
	Program penyelenggaraan tata ruang
	Program Administrasi Pertanahan
	Program pengembangan perumahan dan permukiman
	Program pengembangan dan penataan kota
Sasaran Strategis 16 : Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan	
	Program perencanaan, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah
	Program perencanaan dan evaluasi bidang ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur
	Program perencanaan dan evaluasi bidang pembangunan manusia dan pemerintahan
	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah
	Program penelitian dan pengembangan
	Program perencanaan, pendataan dan pelayanan pendapatan daerah
	Program pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah
	Program peningkatan pendapatan daerah
	Program pengelolaan keuangan daerah
	Program pengelolaan asset
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah
	Program peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan
	Program penyusunan dan penataan produk hukum
	Program pengembangan keagamaan, kesejahteraan rakyat dan bina mental
	Program pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan
	Program pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah
	Program Layanan Pengadaan
	Program penataan kelembagaan, tatalaksana dan peningkatan pelayanan publik
	Program penyelenggaraan kehumasan
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan



	Program pengelolaan administrasi kepegawaian
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
	Program pembinaan, kesejahteraan aparatur, dan informasi kepegawaian
	Program pengelolaan dan pelestarian arsip daerah
Sasaran Strategis 17 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik	
	Program pengembangan komunikasi dan informasi publik
	Program pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi
	Program pengembangan data Statistik
	Program peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk
	Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil
	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
Sasaran Strategis 18 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	
	Program pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa
	Program pembinaan dan fasilitasi perencanaan, evaluasi, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa
	Program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat/desa dan pemberdayaan kawasan perdesaan
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
	Program pengelolaan aset desa
Sasaran Strategis 19 : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	
	Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
	Program peningkatan perlindungan masyarakat
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Sasaran Strategis 20 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	
	Program penanganan tanggap darurat bencana
	Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung tahun 2019 ini disusun agar dapat menjadi cerminan kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung selama tahun 2019. Sehingga diharapkan dapat bermanfaat untuk langkah evaluasi dan perbaikan kinerja untuk tahun-tahun yang akan datang. LKjIP ini menyajikan informasi tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assesment*) atas realisasi pelaksanaan rencana kinerja tahun 2019 melalui pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis melalui proses penyesuaian dan penajaman terhadap sasaran yang didukung indikator setingkat *outcome*. Kesimpulan tingkat capaian indikator kinerja dari 52 (lima puluh dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Tiga puluh enam (34) indikator kinerja (65,38%) dengan capaian 100% (kategori memuaskan);
2. Dua belas (14) indikator kinerja (26,92%) dengan capaian 86,00% sampai 99,99% (kategori Sangat baik);
3. Satu (1) indikator kinerja (0,02%) dengan capaian 70,00% sampai 85,99% (kategori baik);
4. Tiga (3) indikator kinerja (0,58%) dengan capaian kurang dari 55,00% (kategori Kurang).

Persentase capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 secara keseluruhan 92,09% (kategori sangat baik).

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Perubahan Pemerintah Kabupaten Temanggung



Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp701.862.172.368,00, dan telah direalisasikan sebesar Rp648.476.939.029,00 atau 89.22% (un-audit per tanggal 1 Maret 2019).

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung disusun sebagai wujud berkembangnya semangat akuntabilitas serta dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

B. SARAN DAN TINDAKLANJUT

Beberapa hal yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan capaian dan akuntabilitas kinerja sesuai hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB serta Inspektorat Kabupaten Temanggung secara keseluruhan, antara lain:

1. Membangun Budaya Kinerja dengan menyelaraskan ukuran kinerja, proses bisnis, kompetensi pegawai serta mekanisme pengendalian (monitoring dan evaluasi) kinerja secara berkelanjutan.
2. Menjabarkan kinerja organisasi (*cascading*) setiap OPD ke level individu dan memanfaatkan untuk pengukuran kinerja dan pemberian *reward and punishment*.
3. Melakukan optimalisasi integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja sehingga dapat mempercepat terwujudnya penerapan *performance based budgeting*.
4. Meningkatkan kualitas hasil evaluasi internal dengan meningkatkan kompetensi evaluator. Peningkatan kompetensi evaluator dilakukan secara berkelanjutan sehingga hasil evaluasi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pencapaian kinerja organisasi dan efektivitas penggunaan anggaran.



5. Meningkatkan kualitas dan cakupan evaluasi program/kegiatan, dengan memfokuskan kepada hasil (outcome) sehingga dapat meningkatkan hasil program prioritas pembangunan yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Temanggung.
6. Melaksanakan review RPJMD tahun 2018-2023 agar lebih menajamkan program/kegiatan yang mengarah pada pemenuhan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD sehingga pelaksanaan program/ kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien;

Adapun upaya yang telah dilaksanakan Pemkab Temanggung sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan keselarasan dokumen-dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan Renja), anggaran (RKA/DPA), dan kinerja (Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja) secara bertahap sesuai dengan siklus perencanaan, yaitu dengan membangun system *e-planning* dan *e-budgeting* yang terintegrasi;
2. Melakukan pengukuran setiap 3 bulan dengan menggunakan system e-SAKIP terhadap hasil capaian kinerja sebagai bahan pengendali pencapaian kinerja pada akhir tahun anggaran agar upaya pencapaian target kinerja dapat optimal;
3. Penyusunan RPJMD periode 2018-2023 telah sesuai dengan ketentuan.
4. Lebih memberdayakan Inspektorat Kabupaten untuk meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Perangkat Daerah, melalui upaya-upaya :
 - a) Membentuk Tim Evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang bekerja sesuai dengan pedoman yang berlaku
 - b) Mengirim dan mengikutsertakan auditor/pegawai Itkab pada Diklat Akuntabilitas Kinerja.
 - c) Bekerjasama dengan Bagian Organisasi Setda maupun Bappeda Kabupaten Temanggung untuk dapat menyelenggarakan Bimtek dan pendampingan di bidang akuntabilitas kinerja mulai dari komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, sampai dengan evaluasi



5. Meningkatkan peran Inspektorat Kabupaten dalam bidang pengawasan dan pengendalian yaitu penerapan SPIP untuk mendapatkan efisiensi kinerja yang lebih baik dan terwujudkan opini WTP

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 ini. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, khususnya tahun 2019 yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bupati Temanggung Tahun 2019 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator maupun sasaran yang belum memenuhi sesuai dengan target, akan dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga dimasa yang akan datang capaian kinerja akan lebih baik.

